

INOVASI

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS POTENSI LOKAL

TIM PENYUSUN

Pius Sugeng Prasetyo

Tutik Rachmawati

Theresia Gunawan

Trisno Sakti Herwanto

Albert Mangapul Parulian Lumban Tobing

Yosefa

Daniel Hermawan

Dhia Kalila

Mohamad Dida Fahryuda



Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

Penyusun/Penulis:

Pius Sugeng Prasetyo, Theresia Gunawan,
Tutik Rachmawati, et.al.

Diterbitkan oleh :



Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2 A | Jakarta 12730
Telepon : +62-21-7193711
Fax : +62-21-71791358
Email : info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id

Cetakan 1, Desember 2018

Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis.

Dilarang memperbanyak isi dari buku ini dalam bentuk apapun, termasuk foto kopi tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
PENGANTAR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	x
PENGANTAR KEMENKO PMK	xiii
PENGANTAR FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.....	xv

BAB I

PEMANFAATAN BERKAH ALAM: PENGALAMAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA TAJUN INDONESIA	1
A. Pendahuluan & Profil Desa Tajun	1
B. Faktor-Faktor Penentu Inovasi Pembangunan Ekonomi Desa (Defining Factors for Village Economy Development).....	3
B.1. Potensi Alam (Natural Endowment) Desa Tajun	3
B.2. Kepemimpinan	5
B.3. Potensi Kelembagaan sebagai Modal Sosial	9
B.4. Rencana Pembangunan Desa Tajun.....	10
C. Inovasi Pembangunan Ekonomi Lokal	24
C.1. Inovasi Kelembagaan: BUMDesa dan Lembaga Keuangan Mikro Desa.....	25
C.2. Inovasi Produk: Cengkeh Andalan Desa Tajun	42
D. Dampak Inovasi Desa Tajun	50

BAB II

POTENSI EKONOMI DESA TERINDAH DI DUNIA: DESA NAGARI

PARIANGAN	53
A. Pendahuluan	53
B. Analisis Potensi dan Sumber Daya Ekonomi	55
B.1. Potensi Wisata Nagari Pariangan.....	55
B.2. Catatan Khusus untuk Pengembangan Potensi Wisata.....	74
C. Peluang Potensi Wisata.....	77
D. Kesimpulan	80
E. Saran.....	82

BAB III

DESA WISATA TEMBI: 101 PERJUANGAN KOMUNITAS MANDIRI DI

TENGAH KETERBATASAN POTENSI	85
A. Sekilas Tentang Sejarah dan Potensi Tembi	85
A.1. Sejarah Singkat Tembi	85
A.2. Potensi Desa	86
B. Bentuk, Proses dan Dampak Inovasi Desa Pujon Kidul	88
B.1. Bentuk Inovasi Desa	88
B.2. Proses Inovasi Desa	90
B.3. Dampak Inovasi Desa	92
C. Faktor Pendorong Inovasi Desa.....	94
D. Analisis Proses Produksi Produk Unggulan	95
D.1. Tata Kelola Homestay di Desa Wisata Tembi	95
D.2 Proses Pembuatan Batik di Leksa Ganesha Batik Gallery...99	
D.3. Rantai Pasok Industri Kerajinan di Desa Wisata Tembi... 102	
D.4. Pariwisata Pendukung	104
E. Kesimpulan dan Saran	106

BAB IV

DESA WISATA PUJON KIDUL:

CERITA KEBERHASILAN REVITALISASI PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNTUK MENEKAN LAJU URBANISASI 109

- A. Sekilas Tentang Desa Pujon Kidul 109
- B. Bentuk, Proses dan Dampak Inovasi Desa Pujon Kidul 111
 - B.1. Bentuk Inovasi Desa 111
 - B.2. Proses Inovasi 115
 - B.3. Dampak Inovasi 118
- C. Faktor Pendorong Inovasi Desa 120
- D. Analisis Proses Produksi Produk Unggulan 122
- E. Kesimpulan 126

BAB V

MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI DESA BERBASIS POTENSI LOKAL DESA BORU KEDANG KECAMATAN WULANGGITANG, KABUPATEN

FLORES TIMUR - NTT 129

- A. Gambaran Umum Desa Boru Kedang 129
- B. Membangun dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa ... 131
 - B.1. Badan Usaha Milik Desa “Tanah Bojang” 132
 - B.2. Dukungan Jejaring Pendukung Pembangunan Ekonomi
Desa 144
- C. Belajar dari BUMDes Bangkit Mandiri, Desa Nita -
Kecamatan Nita 155
- D. Kesimpulan 160

CATATAN AKHIR 164

REFERENSI 168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Dinamis Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Desa untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan	24
Gambar 1.2. Analisa Market System Development Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih	28
Gambar 1.3. Analisa Market System Development.....	30
Gambar 1.4. Sampah Organik yang Difermentasi & Alat Pengayak	30
Gambar 1.5. Tumpukan Sampah Plastik yang Sudah Dipilah (a) & Pupuk Organik (b).....	31
Gambar 1.6. Struktur Pengurus BUMDesa MGA Desa Tajun	32
Gambar 1.7. Analisa Market System Development BUM Desa Mandala Giri Amertha	34
Gambar 1.8. Produk Layanan Keuangan BUMDesa MGA Desa Tajun	35
Gambar 1.9. Wawancara Ketika Pegawai LPD Melakukan 'Jemput Bola'	38
Gambar 1.10. Pembukuan Oleh Pegawai LPD Saat Melakukan 'Jemput Bola'	39

Gambar 1.11. Realisasi Penerimaan Negara dari Cukai Tembakau (Dalam Triliun)	43
Gambar 1.12. Analisa Market System Development Cengkeh Desa Tajun	45
Gambar 1.13. Cengkeh Sebelum Dijemur (a) & Sesudah Dijemur (b)	47
Gambar 1.14. Penjemuran Cengkeh di Area Rumah Warga Desa Tajun	48
Gambar 1.15. Alur Pendistribusian Cengkeh Kering Desa Tajun.....	49
Gambar 2.1. Struktur Pemerintahan Desa Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan- Kabupaten Tanah Datar	55
Gambar 2.2. Kuburan Panjang Tantejo Gurhano.....	56
Gambar 2.3. Balai Saruang (Tempat Pengadilan Jaman Dahulu).....	58
Gambar 2.4. Rumah Gadang.....	61
Gambar 2.5. Minuman Tradisional Kawa di Puncak Kawa	62
Gambar 2.6. Pemandangan dari Puncak Kawa.....	63
Gambar 2.7. Motif Batik yang Ditemukan Dalam Naskah Kuno	66
Gambar 2.8. Papan Informasi Kuburan Panjang	75
Gambar 3.1. Peta Desa Wisata Tembi	87
Gambar 3.2. Desa Wisata Tembi.....	88
Gambar 3.3. APBDesa Timbulharjo 2018.....	92
Gambar 3.4. Rumah Warga yang Dijadikan Homestay	93
Gambar 3.5. Rumah Warga yang Dijadikan Homestay	93
Gambar 3.6. Kamar Homestay	96

Gambar 3.7. Kamar Homestay Standar Hotel.....	97
Gambar 3.8. Kamar Homestay Standar Hotel	98
Gambar 3.9. Kamar Homestay Standar Hotel.....	98
Gambar 3.10. Proses Pembuatan Batik	99
Gambar 3.11. Aneka Kerajinan Desa.....	103
Gambar 4.1. Akses Masuk Desa Pujon Kidul	109
Gambar 4.2. Cafe Sawah dengan Latar Belakang Pemandangan Alam	112
Gambar 4.3. The Roudh 78	113
Gambar 4.4. Aneka Produk dan Jasa Pariwisata Pujon Kidul	123
Gambar 4.5. Hasil Produksi UMKM.....	125
Gambar 5.1. Peta Desa Boru.....	130
Gambar 5.2. Kantor Kepala Desa Boru Kedang	131
Gambar 5.3. Potensi Wisata Air Terjun Wair Poar – Desa Boru Kedang.....	134
Gambar 5.4. Anyam Bambu yang Dilombakan – Sumber Foto: Hengky Ola 2017.....	135
Gambar 5.5. Instalasi Pengolahan Air Minum dari Sumber Air di Desa Boru Kedang	138
Gambar 5.6. Instalasi Pengolahan Air Minum dari Sumber Air di Desa Boru Kedang	138
Gambar 5.7. Hasil Pengujian Air Minum Oleh ITS	139
Gambar 5.8. Harga Eceran Pupuk Bersubsidi.....	141

Gambar 5.9. Poster Pupuk Non Subsidi	142
Gambar 5.10. Gedung Pemecah Kemiri.....	149
Gambar 5.11. Mesin Pemecah Kemiri	149
Gambar 5.12. Biji Kemiri.....	150
Gambar 5.13. Gedung Yayasan Ayu Tani.....	151
Gambar 5.14. Dialog dengan Kepala Yayasan Ayu Tani	151
Gambar 5.15. Gedung KSU Jantan	152
Gambar 5.16. Struktur Organisasi dan Struktur Manajemen KSU Jantan.....	153
Gambar 5.17. Data Pembelian dan Penjualan Kakao	154
Gambar 5.18. Timbangan Elektronik KSU Jantan.....	155
Gambar 5.19. Proposal Usulan Pinjaman Dana Gulir.....	156
Gambar 5.20. Proposal Pinjaman Kredit Usaha Mandiri	157
Gambar 5.21. Contoh Produk Kain Tenun yang Dijual di BUMDes Bangkit Mandiri	158
Gambar 5.22. Peneliti dan Pengurus Koperasi BUMDes Bersama Kecamatan Nita	158
Gambar 5.23. Kartu Nama BUMDes Bangkit Mandiri	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Desa Tajun	5
Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa Tajun	7
Tabel 1.3. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12
Tabel 1.4. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa.....	15
Tabel 1.5. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	21
Tabel 1.6. APB Desa Tajun 2018 – Bidang.....	22
Tabel 1.7. Rangkuman RKP Desa 2018 Desa Tajun.....	23
Tabel 1.8. Inovasi Kelembagaan Desa Tajun.....	25
Tabel 1.9. Modal Pengembangan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu	29
Tabel 1.10. Alokasi SHU BUMDesa MGA Desa Tajun.....	34
Tabel 1.11. Alokasi Keuntungan LPD Desa Adat Pekraman Tajun	40

Tabel 1.12. Kinerja LPD Desa Adat Pekraman Tajun Tahun 2016, 2017, dan 2018	41
Tabel 1.13. Informasi Harga Cengkeh per Tanggal 14 September 2018	46
Tabel 1.14. Kategori Petani Cengkeh di Desa Tajun	48
Tabel 3.1. Harga Homestay	97
Tabel 3.2. Paket Kegiatan Kerajinan Tangan	104
Tabel 3.3. Paket Kegiatan Kuliner	104
Tabel 3.4. Paket Kegiatan Kesenian	105
Tabel 3.5. Wisata Outbound	106
Tabel 4.1. Pendapatan BUMDes Pujon Kidul (Januari-Oktober 2018).....	119

PENGANTAR

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Desa yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan dambaan bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan desa. Hal ini juga semakin diperkuat dengan kesadaran bahwa keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kekuatan desa dalam menopang berbagai kebutuhan baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Buku ini merupakan hasil kegiatan penelitian eksplorasi yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan untuk meneliti desa-desa dari berbagai sudut pandang seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pembangunan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan kepala desa. Sedangkan buku ini lebih memfokuskan pada berbagai langkah yang dilakukan oleh desa khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi desa.

Dari lima desa yang diteliti yaitu Desa Paringan - Padang (Sumatera Barat), Desa Tembi - Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta), Desa Pujon Kidul - Malang (Jawa Timur), Desa Tajun - Bali, dan Desa Boru Kedang - Flores Timur (Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa desa-desa tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan kreativitas dan inovasi khususnya dalam meningkatkan aspek ekonomi desa yang berimplikasi

pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Catatan yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap desa selalu berangkat dari potensi yang dimiliki baik potensi yang menyangkut sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki. Potensi yang dimaksud ini bukan berarti potensi yang sudah tersedia yang langsung bisa menjadi unggulan desa yang bersangkutan. Dalam banyak kasus menunjukkan bahwa semua sumber yang ada harus dimulai dan dikemas dalam proses inovasi yang berawal dari ide kreatif dan keberanian dari tokoh desa baik aparat desa maupun tokoh masyarakat setempat.

Disisi lain juga sangat disadari bahwa keberhasilan mereka tidak mungkin hanya bisa dilakukan sendiri namun mereka juga membuka diri dengan membangun dan memanfaatkan jejaring yang dimiliki baik dengan pihak pemerintah daerah setempat maupun pihak non pemerintah yang dalam hal ini sektor usaha swasta maupun kalangan akademisi. Langkah membangun jejaring ini menegaskan bahwa sikap dan respon yang terbuka dari pihak desa akan menjadi isu yang signifikan dalam upaya membangun desa khususnya pada sektor ekonomi desa. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembangunan di sektor ini bukan semata-mata untuk menekankan dimensi ekonomi bisnis saja, melainkan pembangunan ini diproyeksikan agar dapat meningkatkan dimensi lain baik sosial masyarakat, partisipasi / kepedulian masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup yang tetap ditopang oleh kearifan lokal (*local wisdom*) yang tidak boleh dilupakan dalam rangka menjaga orisinalitas dan identitas lokal tanpa harus memunculkan resistensi terhadap kemajuan-kemajuan yang diintroduksikan oleh pihak-pihak eksternal.

Kami tim peneliti yang terdiri dari dosen-dosen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Daniel Hermawan, S.AB., MBA; Yosefa, S.T., M.M.; Trisno Sakti Herwanto, SIP., MPA; Albert Mangapul Parulian Lumban Tobing, S.T., M.AB.; Tutik Rachmawati, Ph.D., Dr. Theresia Gunawan; dan Dr. Pius Sugeng Prasetyo) serta mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Dhia Kalila, S.AP.; Mohamad Dida Fahryuda, S.AP.; William Tandi Wijaya, Michael Sandy Lim) mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), serta pihak Friedrich Ebert Stiftung (FES) - Indonesia. Demikian juga pihak lain baik aparat tingkat desa maupun masyarakat desa yang dalam penelitian ini sudah banyak membantu untuk memberikan berbagai informasi dan data guna penulisan buku ini. Kerjasama ini tentu

saja tidak hanya sebatas pada penelitian tentang Pembangunan Ekonomi Desa saja, melainkan diharapkan ada suatu keberlanjutan untuk bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dapat diseminasikan kepada berbagai pihak sehingga dapat menjadi inspirasi yang mungkin dapat diwujudkan di desa-desa lain sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hansen William, S.E., M.M. dan Harris Kristanto yang banyak membantu dalam proses mereview dan mengedit buku. Buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna baik dari segi konten maupun mungkin dalam hal penyajian, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak yang membaca buku ini tentu saja sangat diharapkan.

Akhir kata semoga buku ini dapat menjadi wujud kepedulian dan kontribusi kami dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui inovasi pembangunan di desa dalam berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Bandung, Desember 2018

Dr. Pius Sugeng Prasetyo
Koordinator Tim Peneliti

PENGANTAR

KEMENKO PMK

Salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini atau biasa disebut dengan Nawacita adalah 'Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan'. Implementasi nyata dari Nawacita ini adalah Program Dana Desa. Tahun 2015 sebagai tahun pertama pelaksanaan Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp.20,67 Triliun kepada 74.093 Desa. Pada tahun 2016 Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp.46,98 Triliun kepada 74.754 Desa. Tahun 2017 Dana Desa meningkat lagi menjadi Rp.60 Triliun 74.910 Desa. Tahun 2018 Dana Desa terus meningkat sebesar Rp.60 Triliun kepada 74.957 Desa. Dana Desa tahun 2019 akan segera dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.70 Triliun kepada 74.953 Desa. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Dana Desa dilakukan penyederhanaan persyaratan penyaluran serta penerapan afirmasi kepada desa-desa yang masih tertinggal terutama di luar Jawa dan di Indonesia Timur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa, berbagai program pembangunan sarana prasarana yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa dilakukan secara padat karya dengan semaksimal mungkin menggunakan bahan baku lokal. Pengawasan penggunaan Dana Desa juga terus ditingkatkan, melalui pelibatan/partisipasi masyarakat dan transparansi penggunaan, perencanaan dan penganggaran Dana Desa.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan desa baik melalui dukungan Dana Desa maupun program-program lainnya, perlu adanya

sinergi antara hasil pembangunan desa dan hasil pembangunan nasional secara menyeluruh. Hasil pembangunan sarana prasarana fisik skala kawasan, skala regional dan di perkotaan telah terlihat, sehingga akses keluar masuk dari dan ke desa semakin terbuka. Dengan kondisi sarana dan prasarana mobilitas orang dan barang yang semakin baik saat ini, maka menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya. Desa juga harus mampu melihat hasil pembangunan sarana dan prasarana fisik ini sebagai suatu kesempatan. Desa harus mengembangkan produk lokalnya, dengan tujuan untuk dapat dijual ke luar desa dalam rangka memperoleh *comparative advantage*. Produk lokal di desa juga harus mampu bersaing untuk memperoleh *competitive advantage* bilamana banyak barang mengalir masuk ke desa. Sejalan dengan itu kelembagaan desa seperti BUMDes dan koperasi harus semakin dikembangkan untuk meningkatkan *bargaining position* dari produk lokal desa. Demikian pula kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan keterampilan khususnya di bidang TIK dan literasi keuangan harus dikembangkan agar masyarakat desa dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan usahanya secara kekinian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Universitas Katolik Parahyangan yang telah melakukan penelitian dan menyusun buku ini. Semoga praktek baik yang ada di buku ini dapat menginspirasi desa-desa lain dalam mengelola sumber daya ekonomi di wilayahnya. Bagi pemerintah pusat, buku ini juga dapat menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan penggunaan Dana Desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bandung, Desember 2018

Dr. Herbert Siagian, M.Sc.

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

PENGANTAR

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

Buku “Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal” yang ada dihadapan pembaca ini adalah tulisan hasil riset yang dilaksanakan tim peneliti Universitas Katolik Parahyangan Bandung bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), sebagai realisasi salah satu kegiatan terkait desa yang tercantum di dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara FES dengan Kemenko PMK. Wacana untuk mewujudkan desa maju, mandiri dan sejahtera sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah menjadi topik perbincangan yang ‘seksi’ dan menjadi salah satu fokus landasan/arahan kegiatan pembangunan pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk membuktikan komitmen dan keseriusannya untuk membangun desa yang lebih sejahtera, diantaranya dengan meningkatkan alokasi dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun sejak lahirnya UU Desa*), pembangunan infrastruktur serta dukungan pendamping dan tenaga ahli desa. Melalui sarana tersebut pembangunan di desa, tidak hanya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di desa tetapi juga diharapkan mampu melahirkan ide ide baru. Misalnya mendapatkan sumber-sumber cadangan pangan, energi alternatif, serta lahirnya sumber-sumber ekonomi kreatif seperti turisme. Selain itu beberapa masalah mendasar di desa juga diharapkan dapat terselesaikan, misalnya pelayanan publik, tumbuhnya lapangan pekerjaan

melalui program 'padat karya' sehingga dapat menekan angka urbanisasi, angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Mimpi desa untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang mereka miliki telah menjadi kenyataan.

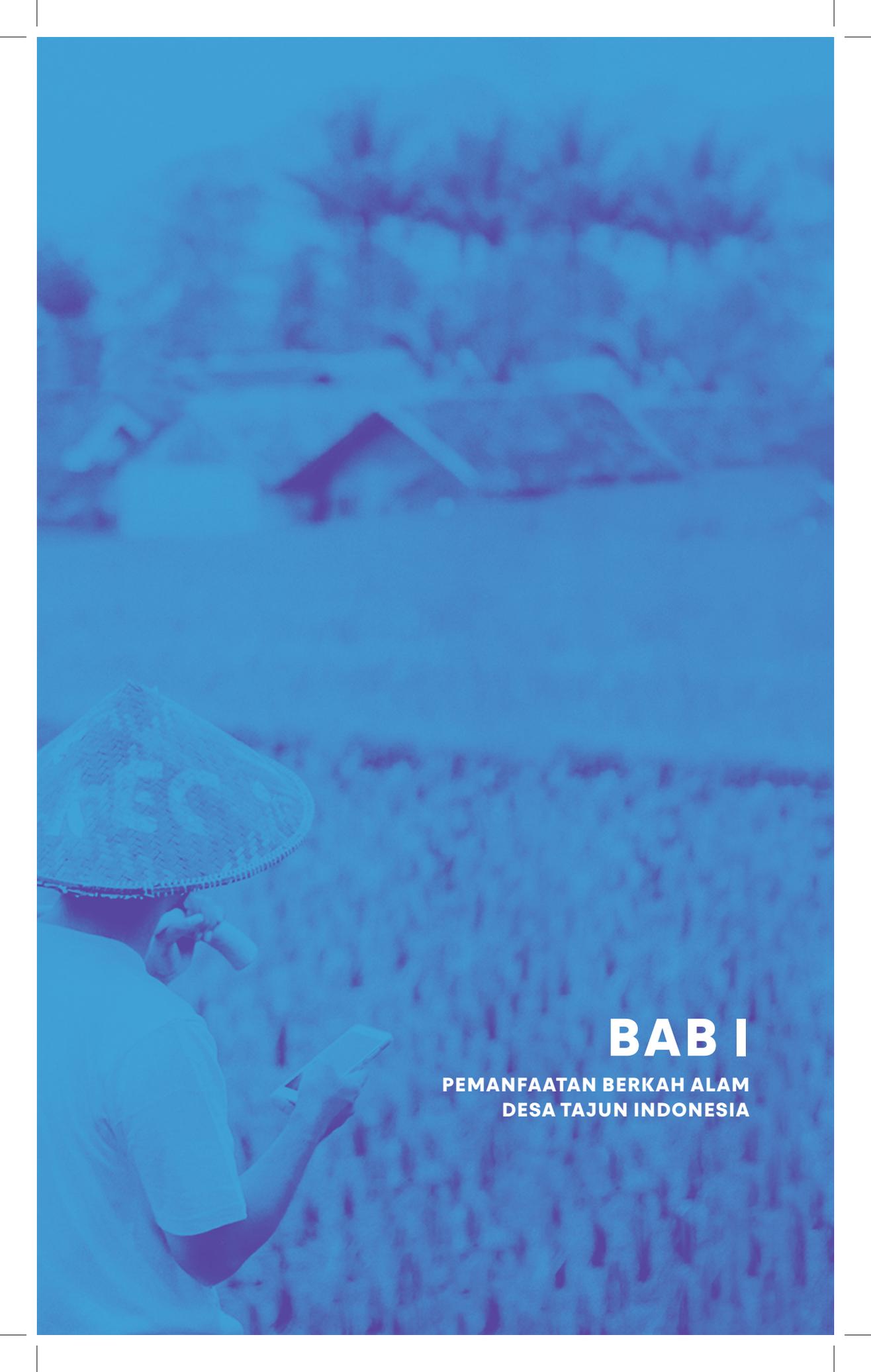
Penelitian di lima desa yang dilakukan dosen-dosen UNPAR ini bertujuan untuk merekam praktik-praktik baik, inovasi dan kreativitas yang dilakukan desa guna mengembangkan pembangunan ekonomi di desa mereka. Hasil penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengalaman kepada desa-desa lain di Indonesia dan juga menjadi rekomendasi untuk pembuat kebijakan untuk mengembangkan/memperbaiki kebijakan.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti UNPAR, diantaranya Dr.Pius Sugeng Prasetyo, Koordinator Tim Peneliti, yang telah melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya. Tentunya saya juga sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Herbert Siagian, Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sebagai 'focal point' kegiatan desa dan semua pihak di Kemenko PMK yang telah berkontribusi untuk meningkatkan kerjasama baik ini.

Jakarta, Desember 2018

Dormiana Yustina Manurung

Program Koordinator FES Kantor Perwakilan Indonesia



BAB I

PEMANFAATAN BERKAH ALAM
DESA TAJUN INDONESIA

BAB I

PEMANFAATAN BERKAH ALAM: PENGALAMAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA TAJUN INDONESIA

Tutik Rachmawati^a, Yosefa^b, Mohamad Dida Fahryuda^c

A. Pendahuluan & Profil Desa Tajun

Dalam sejarah dunia, Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling diperebutkan oleh negara-negara imperialis seperti Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Dua kerajaan imperialis ini bahkan sanggup berperang merebutkan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah. Dalam episode kedua *Spice Trail* (Jejak Rempah) oleh Jurnalis berkebangsaan Inggris, *Kate Humble*, Indonesia merupakan salah satu negara yang dikunjungi karena jejak rempah pala (*nutmeg*) dan cengkeh (*clove*). Rempah-rempah menyebabkan dua kerajaan terbesar di Dunia - Inggris dan Belanda, memulai perjalanan besar untuk mendapatkan kekayaan melimpah dari pala dan cengkeh yang merupakan produk bernilai tinggi. Begitu tingginya nilai pala dan cengkeh hingga pada akhirnya menyebabkan negara-negara penghasil rempah seperti Indonesia menjadi daerah jajahan dan mengalami penderitaan luar biasa selama beratus-ratus tahun. *Elizabeth Pisani* dalam bukunya berjudul 'Indonesia etc.' juga membahas mengenai bagaimana Kerajaan Belanda yang bahkan bersedia menukarkan Manhattan (dulu bernama New Amsterdam) dengan Pulau Banda yang kaya akan pala. Hal tersebut menggambarkan tingginya nilai rempah-rempah yang dimiliki oleh pulau-pulau di Indonesia.

^a Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^b Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^c Alumnus Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Selain pala, cengkeh juga merupakan salah satu hasil andalan perkebunan Indonesia. Pada tahun 2010 Indonesia memiliki 456.000 hektar lahan cengkeh dengan produksi mencapai 140.000 metrik ton¹. Beberapa daerah penghasil terbesar penghasil cengkeh adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun tidak berada diantara kelima provinsi tersebut, Desa Tajun yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali merupakan salah satu contoh desa penghasil cengkeh yang berkualitas di Indonesia. Produksi cengkeh Desa Tajun diperjualbelikan tidak hanya dalam lingkup lokal provinsi Bali namun di tingkat nasional. Sebagian besar konsumen produksi cengkeh Desa Tajun merupakan produsen-produsen lanjutan yang mengolah cengkeh menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi.

Desa Tajun merupakan salah satu desa dari 13 Desa yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Tajun merupakan desa dengan ketinggian 500 – 600 meter² dari permukaan laut dengan batas – batas wilayah administrasi desa sebagai berikut³.

- a. Sebelah Utara : Desa Tunjung, Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng
- b. Sebelah Timur : Desa Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Bangli
- c. Sebelah Selatan : Desa Satra, Kec. Kintamani, Kab. Buleleng
- d. Sebelah Barat : Desa Mengening, Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng

Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa menuju Kecamatan adalah sejauh 20 km (45 menit jika menggunakan kendaraan bermotor), dari Pemerintah Kabupaten sejauh 35 km (1 jam jika menggunakan kendaraan bermotor), dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi adalah 82 km (2 jam jika menggunakan kendaraan bermotor)⁴. Luas wilayah desa Tajun adalah 16,97 km² ⁵. Sebesar 75% dari luas wilayah tersebut Desa Tajun tersebut diperuntukan untuk wilayah perkebunan seluas 1635 ha/m², dimana 1621 ha/m² digunakan untuk tanah perkebunan perorangan dan 14 ha/m²

1 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/06/5-provinsi-produsen-cengkeh-tertinggi-di-indonesia>

2 <https://desatajun.blogspot.com/p/data-desa.html>

3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng. Data Komunikasi dan Informatika: Desa/Kelurahan di Kecamatan Kubutambahan 2014. Singaraja.

4 Ibid

5 Ibid. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa luas wilayah Desa Tajun adalah 16,94 km²

digunakan untuk tanah perkebunan negara).⁷ Dengan wilayah perkebunan yang luas tersebut maka tidak mengherankan bahwa Desa Tajun memiliki 1.000 keluarga yang memiliki tanah perkebunan, dimana: 200 keluarga memiliki 10 - 50 ha tanah, 300 keluarga memiliki 50 - 100 ha tanah, 450 keluarga memiliki 100 - 500 ha, dan 46 keluarga memiliki 500 - 1000 ha tanah.⁸ Jumlah tersebut masih lebih besar dibanding jumlah keluarga yang tidak memiliki tanah perkebunan, yaitu sebanyak 865 keluarga.⁹ Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mata pencaharian pokok penduduk di Desa Tajun adalah sebagai petani (2.067 laki-laki dan 2.022 perempuan)¹⁰ dengan produk unggulan usaha perkebunan Desa Tajun adalah cengkeh.

B. Faktor-Faktor Penentu Inovasi Pembangunan Ekonomi Desa

Dalam bagian berikut ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang menjadi aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan ekonomi desa Tajun. Aspek-aspek tersebut adalah (1) Potensi alam (natural endowment) Desa Tajun, (2) Kepemimpinan, (3) Potensi Kelembagaan sebagai Modal Sosial dan (4) Rencana Pembangunan Desa Tajun. Dengan memahami keempat aspek tersebut maka pembaca artikel ini diharapkan mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana Desa Tajun dapat menjadi desa yang maju, unggul berkelanjutan.

B.1. Potensi Alam (Natural Endowment) Desa Tajun

Desa Tajun terletak dipaling utara Pulau Bali. Dengan letak geografis yang tinggi dari permukaan air laut (sekitar 450 - 1.000 mdl)¹¹, maka iklim atau suhu udara Desa Tajun pada umumnya adalah dingin (suhu rata-rata harian berkisar antara 28 - 32 °C)¹² dan berangin. Hal ini dibuktikan oleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian lapangan. Kondisi malam hari pada saat dilakukan wawancara dengan tokoh-tokoh di Desa Tajun biasanya dingin dan berangin kencang.

Meskipun terletak di Pulau Bali yang merupakan tujuan wisata dunia, desa Tajun tidak memiliki potensi atau anugerah alam seperti halnya desa-desa lain di Pulau Bali. Desa Tajun tidak cukup memiliki potensi alam

7 Berdasarkan dokumen Profil Desa Tajun yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tajun

8 Ibid

9 Berdasarkan dokumen Profil Desa Tajun yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tajun

10 Ibid

11 Ibid

12 Ibid

yang dapat dijual atau 'bernilai' untuk wisata. Hal ini berarti bahwa desa Tajun tidak memiliki obyek wisata yang potensial menjadi tempat tujuan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Potensi wisata paling dekat dengan Desa Tajun adalah Pantai Lovina yang menjadi tujuan wisata pantai dan mengamati lumba-lumba. Namun jarak dari Pantai Lovina ke Desa Tajun adalah sejauh 35 km sehingga dampak wisata Pantai Lovina juga tidak terasa sampai ke Desa Tajun. Pada saat penelitian ini dilakukan, Kepala Desa Tajun memiliki rencana untuk mengembangkan dua pura besar yang terletak di Desa Tajun yaitu Pura Bukit Sinunggal (atau sering disebut Pura Puncak Sinunggal) dan Pura Dalem sebagai potensi wisata religi atau wisata spiritual. Namun demikian, belum ada rencana nyata atau langkah-langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut.

Letak geografis dan hambatan letak geografis tersebut menyebabkan masyarakat desa Tajun harus berusaha lebih keras lagi mengelola potensi sumber alam yang tersedia agar dapat berkompetisi dengan desa - desa lain yang dikaruniai potensi alam sebagai modal pembangunan wilayah berbasis wisata.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Desa Tajun, terbukti bahwa baik masyarakat, kelompok adat (desa adat) hingga pemerintahan sendiri (desa dinas)¹³ justru dapat membangun Desa Tajun dengan sangat baik, bahkan melebihi sebagian besar desa-desa lain yang ada di Indonesia khususnya Pulau Bali. Keberhasilan pembangunan desanya tersebut dibuktikan dengan keberhasilan pengelolaan keuangan di Desa Tajun melalui berbagai usaha yang telah mencapai omzet miliaran rupiah.¹⁴ Hal inilah yang menjadikan alasan dipilihnya Desa Tajun sebagai salah satu desa yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁵ Berdasarkan pada temuan-temuan peneliti pada saat pengumpulan data di Desa Tajun di Bulan September 2018, Pendapatan Asli Desa Tajun diperoleh dari berbagai

- 13 Untuk memahami perbedaan desa Dinas dengan desa Adat silahkan merujuk pada artikel yang ditulis oleh Tutik Rachmawati berjudul 'Inovasi Desa Kerta mewujudkan Desa Mandiri Energi yang Berkelanjutan' dan artikel yang ditulis oleh Theresia Gunawan berjudul 'Desa Mengwi yang Unggul dalam Tradisi dan Kearifan Lokal yang diakui oleh Dunia. Kedua artikel tersebut dapat ditemukan dalam buku berjudul Inovasi: Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan, Edisi Kedua in Prasetyo dkk. (2017).
- 14 <http://bali.bisnis.com/read/20170314/538/775618/desa-tajun-buleleng-miliki-usaha-beromzet-miliaran>
- 15 Penelitian tentang 'Research on Developing Sustainable Local Economic in the Village' tahun 2018, dengan pendanaan dari Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia dilakukan dengan menggunakan desain penelitian studi kasus yang berfokus pada lima (5) desa yang dipilih karena memiliki pengalaman terbaik 'best practice' usaha-usaha desa (BUMDES). Selain Desa Tajun di Bali, empat desa yang lainnya adalah (1) Desa Pujon Kidul - Jawa Timur, (2) Desa Timbulharjo. DI Yogyakarta (3) Desa Nagari Pariangan - Sumatera Barat dan (4) Kecamatan Wulanggitang-Nusa Tenggara Timur

pengolahan potensi desa dan berdampak positif terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi Desa Tajun. Berdasarkan informasi dari website desa Tajun (<http://tajun-buleleng.desa.id>), potensi desa Tajun tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Potensi Desa Tajun

Potensi Desa	
a) Perkebunan	b) Sektor Industri
Cengkeh	Tuak Tajun
Durian	Kerajinan Ukiran Batu
Manggis	Kerajinan Tenun
Kokoa	Kerajinan Anyaman Bambu

Sumber: <http://tajun-buleleng.desa.id>

Dari dua jenis potensi Desa Tajun tersebut, yang merupakan potensi andalan desa tersebut adalah produksi perkebunan yaitu Cengkeh.

B.2. Kepemimpinan

Saat ini Desa Tajun dipimpin Ir. Gede Ardana sebagai kepala desa. Gede Ardana menjadi kepala desa Tajun sejak tahun 2007 dan akan menjalankan jabatannya hingga 2019. Hal ini berarti bahwa Gede Ardana telah menjadi kepala desa selama dua kali periode kepala desa.¹⁶

Gede Ardana memiliki pengalaman kepemimpinan yang sangat baik. Sebelum menjabat sebagai kepala desa Tajun, Beliau memiliki pengalaman 20 (dua puluh) tahun bekerja sebagai manager di bidang perbankan. Setelah memasuki masa pensiun Gede Ardana kembali ke kampung halamannya yaitu Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pengalaman dan kompetensi yang Beliau miliki dari bekerja di perbankan sungguh sangat bermanfaat untuk diterapkan untuk pembangunan di desa Tajun. Pengalaman manajerial di bidang perbankan diterapkan untuk manajemen Desa. Hal ini sangat terlihat dalam observasi peneliti selama berada di Desa Tajun. Rutinitas Gede Ardana berkantor di kantor desa, cara Beliau memimpin para staf pemerintahan desa, juga cara Beliau memberdayakan dan mengembangkan kemampuan stafnya terutama untuk staf muda untuk mempercepat pembangunan di desa Tajun, seluruhnya menunjukkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial yang efektif.

16 Satu periode jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun

Kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang baik oleh Gede Ardana didukung dengan momentum yang baik, yaitu masa kepemimpinannya sebagai kepala desa selama dua periode. Dengan memperhatikan kinerja pemimpin yang terpilih melalui proses politik, apabila pemimpin tersebut berprestasi pada periode pertama kemudian terpilih kembali di periode kedua, biasanya pemimpin tersebut memiliki momentum yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini tentu saja juga berlaku untuk pemimpin di tingkat desa yang juga dipilih melalui proses demokrasi yaitu kepala desa. Hasil penelitian terhadap 11 desa inovatif, unggul dan berkelanjutan oleh peneliti UNPAR juga membuktikan hal ini. Dari sebelas desa yang telah diteliti tersebut sebagian besar kepala desanya juga telah menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai kepala desa. Dengan dua kali periode kepemimpinan, para kepala desa tersebut memiliki kesempatan yang lebih panjang dan lebih banyak untuk menuntaskan inisiatif inovatif mereka.¹⁷

Desa Tajun merupakan desa ketiga di Bali yang menjadi fokus penelitian tentang desa Inovatif, Unggul dan Berkelanjutan oleh tim peneliti. Dua desa yang lainnya yaitu Desa Kerta dan Desa Mengwi. Ketiga desa di Bali yang telah diteliti tersebut menunjukkan kinerja kepemimpinan dan manajerial yang luar biasa. Dari tingkat pendidikan misalnya, Kepala Desa Kerta dan Kepala Desa Mengwi memiliki tingkat pendidikan master (magister). Kepala Desa Tajun memiliki pengalaman bidang kerja dibidang perbankan yang mampu menunjang kinerjanya sebagai kepala desa. Hal tersebut ditambah lagi dengan aspek adat istiadat atau budaya/kebiasaan yang berlaku di Bali, yaitu kewajiban setiap laki-laki dewasa untuk kembali ke kampung halamannya (bagi mereka yang merantau) atau untuk terus tinggal di tempat kelahirannya. Hal ini dipahami dari hasil wawancara¹⁸ dengan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekraman Tajun.

Dengan pengalaman yang mumpuni di bidang perbankan, Gede Ardana mengembangkan potensi desa terutama melalui pembentukan BUMDES. BUMDES yang pada hakekatnya merupakan badan usaha yang berorientasi *profit* merupakan jenis organisasi yang sesuai dengan pengalaman kerja Gede Ardana. Selain itu, pemilihan staf pemerintahan desa yang akan berperan sangat signifikan juga dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk kinerja pembangunan desa yang lebih baik. Hasil observasi dan wawancara dengan aparat pemerintah desa Tajun membuktikan hal ini.

17 Untuk memahami penjelasan ini lebih lanjut, pembaca dapat membaca detailnya dalam buku berjudul Inovasi: Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan, Edisi Kedua in Prasetyo dkk. (2017).

18 Wawancara dilakukan di Kantor LPD pada tanggal 13 September 2018, pukul 10.00 - 13.00

Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Tajun merupakan seorang yang masih muda, lulus sarjana dengan proyek akhir yang memenangkan sebuah penghargaan. Urusan perencanaan merupakan urusan yang paling penting dalam pemerintahan desa karena di bagian inilah setiap rencana pembangunan di Desa Tajun disusun dan direncanakan. Siapapun yang menjadi penanggung jawab urusan perencanaan haruslah seseorang yang berpandangan visioner juga inovatif. Dua karakter ini biasanya melekat pada generasi muda. Pertimbangan ini yang tampaknya diperhatikan oleh Gede Ardana. Kaur Perencanaan yaitu Gede Sukra Ardipa dan Kaur Kesejahteraan Desa Tajun, Komang Sujana terpilih dalam seleksi kaur-kaur yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Kubutambahan di Tahun 2017. Mereka adalah peserta tes yang mencapai posisi terbaik no. 1 dan no.2. diantara 17 seleksi tersebut. Mereka berdua adalah generasi muda, bahkan Komang Sujana telah mencapai pendidikan magister. Hal tersebut tentu saja memperkuat tim kerja aparat pemerintah Desa Tajun.

Saat ini ada 14 orang aparat pemerintahan Desa Tajun, dengan beragam tingkat pendidikan yaitu: SD, SMP, SMA, Diploma, S1, dan S2. Detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa Tajun

Jabatan	Pendidikan Terakhir
Kepala Desa	S1
Sekretaris Desa	SMK
Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan	SMA
Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan	S1
Kepala Urusan (Kaur) Pemberdayaan Masyarakat	SMA
Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Masyarakat	S2
Kepala Urusan (Kaur) Umum	SMA
Kepala Urusan (Kaur) Keuangan	S1

Sumber: Dokumen Profil Desa Tajun

Hal yang menonjol yang lain yang ditunjukkan oleh Gede Ardana sebagai pemimpin Desa Tajun adalah pemahamannya tentang pentingnya empat konsep utama pembangunan di desa yaitu (1) pelatihan, (2) modal, (3) tempat (place) dan (4) daya beli.

Untuk aspek pelatihan dan modal, upaya yang dilakukan di Gede Ardana adalah dengan pembentukan kelompok tani yang bukan hanya merupakan wadah untuk membagi informasi terkait harga bibit atau peralatan tani lainnya tetapi juga merupakan akses masuknya dana bantuan sosial dari provinsi atau kabupaten.¹⁹ Saat ini telah ada 12 kelompok tani yang ada di Desa Tajun yang terdiri dari Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dua kelompok ini telah mengakses pinjaman sampai dengan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tanpa peristiwa kredit macet, dimana pada awalnya dana yang disediakan untuk simpan pinjam hanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja.²⁰ Dengan demikian, melalui pembentukan kelompok - kelompok ini bantuan permodalan didapatkan, dan selanjutnya aspek pelatihannya juga bisa difasilitasi melalui KWT dan KUBE. Pelatihan-pelatihan diberikan baik oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi (Dinas Pertanian memberikan pelatihan intensifikasi produksi pertanian) dan juga oleh swasta (PT. Sampoerna memberikan pelatihan pengelolaan pohon cengkeh dan pemberian pupuk gratis).

Dalam aspek tempat (place) dan daya beli, pendekatan yang dilakukan oleh Gede Ardana adalah dengan membangun Pasar Desa Tajun yang terletak tidak jauh dari gedung megah BUM Desa Mandala Giri Amertha. Dengan adanya pasar desa ini, maka uang hanya beredar di desa dan mengurangi jumlah uang yang keluar dari desa. Berdasarkan hasil observasi, Pasar Desa Tajun sangat ramai dan segala kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Tajun tersedia di pasar tersebut.

Aspek kepemimpinan yang lain yang penting adalah kunci pengambilan setiap keputusan penting oleh kepala desa dengan menggunakan data-data. Hal tersebut dapat diketahui saat wawancara dengan Gede Ardana. Dalam setiap penjelasannya Gede Ardana selalu menyebutkan '... [berdasarkan] data kita mengatakan'. Dari kalimat tersebut membuktikan bahwa data adalah hal yang penting bagi seorang pemimpin seperti Gede Ardana untuk membuat setiap kebijakan atau program di tingkat desa.

19 Berdasarkan wawancara dengan Kepala BUMDes yang dilakukan di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 - 12.00

20 Ibid

B.3. Potensi Kelembagaan sebagai Modal Sosial

Seperti halnya desa-desa di Bali, Desa Tajun memiliki keunikan yang berasal dari adat istiadat yang berlaku umum di Bali yaitu adanya lembaga adat berupa desa adat (Kelian Banjar Adat). Baik desa dinas maupun desa adat berdampingan dan memiliki tugas yang sama yaitu mengurus dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Keberadaan desa adat ini tentunya bukan hanya di Provinsi Bali. Di 34 (tiga puluh empat) provinsi lainnya di Indonesia juga dapat ditemukan desa-desa adat. Namun hanya di Bali saja desa adat memiliki praktik baik yaitu berperan aktif menjadi partner (rekan) pembangunan di desa, berdampingan dengan desa dinas.

Desa adat di Bali menjadi perekat sosial di masyarakat Bali yaitu kebiasaan masyarakat untuk berkumpul dan berkegiatan sosial dibawah payung adat istiadat keagamaan Hindu. Kebiasaan untuk berkumpul dan berkegiatan sosial tidak hanya melalui desa adat tapi juga dalam kelompok kelompok kecil dalam lembaga suka duka dan juga subak.²¹ Selain lembaga desa adat, suka duka, dan subak, di Desa Tajun juga masih ditemukan peran lembaga karang taruna yang menjadi tempat bagi remaja dan pemuda pemudi (dalam Bahasa Bali disebut teruna & teruni) berkegiatan.

Potensi tiga lembaga di Desa Tajun ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat tinggi untuk dapat membangun desa. Woolcock (2002, hal. 22) mendefinisikan modal sosial sebagai norma, jejaring (relasi/hubungan) yang memungkinkan terjadinya aksi bersama (*collective action*). Modal sosial seringkali dipahami sebagai 'trust' (saling percaya) yang terdapat dalam sebuah organisasi/lembaga. Modal sosial juga dapat dipahami sebagai kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*capacity*) untuk bekerjasama dan terlibat dalam aksi bersama untuk mencapai kemanfaatan bersama (*mutual benefit*) dan mengurangi terjadinya upaya upaya mendumpleng (*free riding*). Khan dkk. (2007) menjelaskan bawah modal sosial berfokus pada 'kepercayaan, saling bertanggung-jawab, tanggung jawab bersama/masyarakat, dan rasa sosial (*civic sense*). Definisi menurut Khan dkk. (2007) ini menggambarkan modal sosial yang dimiliki oleh Desa Tajun. Melalui lembaga seperti desa adat, subak, suka duka dan teruna teruni, Desa Tajun memiliki aspek-aspek modal sosial yang sangat kuat.

21 Untuk memahami tentang subak sebagai lembaga masyarakat adat di Bali, silahkan merujuk pada artikel yang ditulis oleh Tutik Rachmawati berjudul 'Inovasi Desa Kerta mewujudkan Desa Mandiri Energi yang Berkelanjutan' dalam buku berjudul Inovasi: Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan, Edisi Kedua in Prasetyo dkk. (2017).

B.4. Rencana Pembangunan Desa Tajun

Adalah sebuah hal yang klise bahwa perencanaan yang baik berarti 50% dari pekerjaan telah diselesaikan. Namun meskipun hal tersebut klise, tidak semua desa dan tidak semua kepala desa mampu untuk membuat perencanaan pembangunan yang baik. Desa Tajun, dibawah kepemimpinan Gede Ardana dan didukung oleh kinerja seluruh aparat desa dinas serta kepemimpinan desa adat, memiliki perencanaan pembangunan yang sangat baik. RPMJ Desa Tajun disusun oleh suatu tim yang dibentuk oleh Gede Ardana sebagai kepala desa. Tim tersebut diberi nama Tim 11 yang bekerja dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Perbekel (Kepala Desa) Tajun. Hasil kerja dari tim 11 dijelaskan dalam tabel-tabel RAPB Desa tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Tajun²², RPJM Desa Tajun dibuat berdasarkan visi dan misi Kepala Desa Tajun yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Dusun (MusDus). Biasanya MusDus diadakan sekitar bulan Juni akhir dan dihadiri oleh aparat pemerintahan Desa Tajun, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tajun (LPMDes Tajun), anggota PKK, tokoh masyarakat Desa Tajun (seperti mantan Kepala Sekolah, Kelian Desa Pakraman, Kelian Subak Abian), 6 (enam) orang Kelian Banjar Dinas (dari Bakungan, Pudeh, Pasek, Batu Ngadeg, Tampul Lawang, dan Bayad), pendamping desa (baik dari lokal desa maupun dari kecamatan), perwakilan kepala lingkungan, serta warga Desa Tajun. Mereka semua ada yang diundang menggunakan surat resmi (30 – 50 surat) yang dikirim melalui ojek, dan melalui Jasa Calling²³ di Desa Tajun. Musyawarah Desa (MusDes) diadakan tiga hari sesudah diadakan MusDus. Orang-orang yang hadir dalam MusDes sama dengan orang-orang yang hadir dalam MusDus. Hasil dari MusDus dan MusDes direkap oleh Kaur Perencanaan dan nantinya menghasilkan daftar bantuan untuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kebutuhan Bersama.

Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala Desa Tajun menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku selama 6 tahun sejak kepala desa baru terpilih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan desa dengan menggunakan potensi desa. Selain itu,

22 Wawancara dilakukan di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 – 12.00

23 Jasa pemberian informasi menggunakan pengeras suara di atas mobil yang berkeliling di sekitar Desa Tajun

RPJM Desa Tajun juga disusun dengan cara mengintegrasikan kebijakan dan program di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dengan kebutuhan dan potensi yang ada di tingkat desa²⁴. Menurut penjelasan Gede Ardana, RPJM Desa Tajun diarahkan kepada empat fokus utama yaitu:

- 1) Pro Growth (fokus pada upaya meningkatkan pendapatan/daya beli masyarakat)
- 2) Pro Poor (ada alokasi yang jelas dalam RPJM Desa untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu sebesar 5% dari Sisa Hasil Usaha)
- 3) Pro Job (menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Tajun untuk mengurangi angka kemiskinan)
- 4) Pro Environment (berdasarkan filosofi Tri Hita Karana²⁵)
- 5) Pro Culture (melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Tajun)

Dengan penjelasan dari Gede Ardana ini dapat terlihat bagaimana kemampuan kepala Desa Tajun memahami persoalan di desa dan menjalankan perannya sebagai pemimpin pemerintahan di Desa Tajun. Hanya sedikit sekali kepala desa di Indonesia yang memiliki kemampuan artikulasi yang sangat baik seperti halnya Gede Ardana. Sekali lagi ini menggambarkan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya.

RPJM Desa tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang berlaku selama satu tahun. Dalam hal RKP ini Desa Tajun juga telah mempraktekkan nilai-nilai keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas, karena RKP tahunan Desa Tajun diinformasikan secara terbuka di website desa Tajun yaitu di <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/kategori/6>. Demikian juga dengan APBD tahunan Desa Tajun telah dipublikasikan secara terbuka di website tersebut. Berikut ini adalah informasi APB Desa 2018 Desa Tajun.

24 Program Bali Mandara merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Bali Made Mangku Pastika 2008 – 2013 dan 2013 – 2018, yang terdiri dari program Bedah Rumah, gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu), Sistem Pertanian Terintegrasi (simantri) dan Jaminan Kredit Daerah (jamkrida). Selain itu RPJM RPJM Desa Tajun yang menyesuaikan dengan MP3KI yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia.

25 Untuk memahami filosofi Tri Hita Karana, silahkan merujuk pada artikel yang ditulis oleh Theresia Gunawan berjudul 'Desa Mengwi yang Unggul dalam Tradisi dan Kearifan Lokal yang diakui oleh Dunia' yang dapat ditemukan dalam buku berjudul Inovasi: Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan, Edisi Kedua in Prasetyo dkk. (2017).

Tabel 1.3. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Tunjangan tetap penghasilan Perbekel dan perangkat	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Kades & aparatur Desa	2018	Rp 524,878,200.00	ADD
		2	Operasional BPD	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan tugas BPD	2018	Rp 3,500,000.00	ADD
		3	Tunjangan Kesehatan Perbekel dan Perangkat	Desa Tajun	12 Bulan	Tersedianya Tanggungan Kesehatan Perangkat Desa	2018	Rp 10,810,800.00	ADD
		4	Honorarium Tenaga Kearsipan	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Pegawai kebersihan Kantor	2018	Rp 19,200,000.00	ADD
		5	Alat kebersihan	Desa Tajun	12 Bulan	meningkatkan kebersihan Kantor Desa	2018	Rp 500,000.00	ADD
		6	ATK Pemdes	Desa Tajun	12 Bulan	memperlancar administrasi kantor	2018	Rp 6,000,000.00	ADD
		7	Benda POS	Desa Tajun	12 Bulan	Mengetahui pengembangan program	2018	Rp 1,500,000.00	ADD
		8	Perjalanan Dinas	Desa Tajun	12 Bulan	Koordinasi pelaksanaan tugas	2018	Rp 15,000,000.00	ADD
		9	Transport/uang saku	Desa Tajun	12 Bulan	Koordinasi pelaksanaan tugas	2018	Rp 3,000,000.00	DLL
		10	Bayar Listrik, Pulsa Wifi	Desa Tajun	12 Bulan	memperlancar kegiatan Pemdes	2018	Rp 6,096,800.21	ADD
		11	Cetak Administrasi kantor/pengandaan	Desa Tajun	12 Bulan	Data terdokumentasi	2018	Rp 1,000,000.00	ADD
		12	Jasa pengantar Surat	Desa Tajun	12 Bulan	Surat tepat waktu	2018	Rp 500,000.00	ADD

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13	Biaya koling	Desa Tajun	12 Bulan	Informasi sampai ke masyarakat pedalaman	2018	Rp 1,500,000.00	ADD
		14	Tunjangan anggota BPD	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan BPD	2018	Rp 15,600,000.00	ADD
		15	Konsumsi Tamu	Desa Tajun	12 Bulan	meningkatkan rasa hormat menghormati	2018	Rp 3,000,000.00	PAD
		16	Administrasi Rekening Koran	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	2018	Rp 100,000.00	ADD
		17	Makan Minum Rapat	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatnya Kelancaran Rapat	2018	Rp 3,000,000.00	ADD & PAD
		18	Honor PTPKD	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas	2018	Rp 17,100,000.00	PAD
		19	Honor TPK	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas	2018	Rp 8,400,000.00	PAD
		20	Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan disiplin kerja	2018	Rp 7,500,000.00	ADD
		21	Pemeliharaan gedung kantor	Desa Tajun	12 Bulan	meningkatkan kenyamanan kantor	2018	Rp 5,000,000.00	ADD
		22	Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor	Desa Tajun	12 Bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas	2018	Rp 5,000,000.00	ADD
		23	Musyawarah Desa	Desa Tajun	12 Bulan	Menyelesaikan permasalahan dan solusinya	2018	Rp 4,000,000.00	PAD
		24	Perawatan kendaraan Inventaris	Desa Tajun	12 Bulan	Kelancaran transportasi	2018	Rp 4,000,000.00	PAD
		25	Penyusunan Laporan dan Profil desa	Desa Tajun	12 Bulan	mengetahui tingkat perkembangan Desa	2018	Rp 1,800,000.00	ADD
26	Pendataan DDK	Desa Tajun	1600 KK	mengetahui tingkat perkembangan Desa	2018	Rp 13,600,000.00	ADD		

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	27	Kegiatan Pengelolaan SID	Desa Tajun	12 Bulan	Tersedianya Sistem Informasi Desa berbasis Web	2018	Rp 2,600,000.00	ADD		
		28	Perengkapan dan peralatan kantor	Desa Tajun	12 Bulan	penataan kantor Desa	2018	Rp 12,000,000.00	ADD		
		29	Langganan Koran	Desa Tajun	12 Bulan	Mendapatkan informasi terbaru	2018	Rp 1,080,000.00	ADD		
		30	Kegiatan pembinaan Lembaga Adat (Insentif Subak & 2 Desa Pekraman)	Desa Tajun	10 orang	Meningkatkan Kesejahteraan Lembaga Adat dan Subak	2018	Rp 49,500,000	ADD		
		31	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Desa Tajun	11 Orang	Terlaksananya Penyusunan RKP	2018	Rp 4,750,000	PAD		
		32	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan Kerjasama antar Desa	Desa Tajun	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan kerjasama antar desa	2018	Rp 5,250,000	ADD		
		33	Pengadaan Jaringan Wifi	Desa Tajun	1 Unit		2018	Rp 7,500,000	ADD		
		34	Baliho Informasi APBDES	Desa Tajun	1	Transparansi Penggunaan Apbdes	2018	Rp 500,000	ADD		
		35	Operasional Desa Pakraman dan Subak	Desa Tajun	2 Desa Pakraman & 8 Subak Abian	Meningkatkan Kesejahteraan Lembaga Adat dan Subak	2018	Rp 80,000,000	BKK		
		Jumlah Kegiatan 35								Rp 844,765,800.21	
		Prosentase terhadap Anggaran Total (28%)									

Sumber: <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/58-Rencana-Kerja-Pembangunan-Desa-Tahun-2018>

Tabel 1.4. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	No. Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	1	Rabat Beton jalan setapak Lingkungan Pamesan	BD. Tampul L.	230 m	Memperlancar arus barang jasa	2017	Rp 1,189,360.44	Silpa DD & DD
		2	Betonisasi lingkungan Arimbawa menuju Lingkungan Tumpuk	BD. Tampul L.	230 m	Memperlancar arus barang jasa	2017	Rp 44,759,500	DD
		3	Betonisasi Lingkungan Liligundi	BD. Pasek	900 m	Memperlancar arus barang jasa	2017	Rp 141,781,500	Silpa Dana Desa 2017
		4	Betonisasi Jalan Lingkungan Gede Mullasa Menuju Dadia Jro Dana	BD. Pudeh	135 m	Memperlancar arus barang jasa	2017	Rp 24,617,400.00	Silpa Dana Desa 2017
		5	Perbaikan saluran drainase Lingkungan T. Lawang	BD. Tampul Lawang	7 m	Memperlancar Arus Air	2018	Rp 2,974,000	Silpa Dana Desa 2017
		6	Pembangunan Bale Piasan Pura	BD. Bayad	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Desa Pakraman	2018	Rp 100,000,000	Pajak Daerah
		7	Senderan sebelah timur pertigaan jalan menuju Tumpuk	BD. Pudeh	24 m	Menanggulangi loncor	2018	Rp 19,918,000	DD

2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	8	Betonisasi Lingkungan Jro Bayu dan Lingkungan Komang Budi Merta	BD. Pudeh	344 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 66,852,000	DD
		9	Senderan di Badunge	BD. Pasek	25 m	Menanggulangi Ionsor	2018	Rp 30,514,500	DD
		10	Pelebaran Gorong-gorong di Badunge	BD. Pasek	7 m	Memperlancar Arus Air	2018	Rp 19,395,800	DD
		11	Senderan sebelah timur rumah made jana	BD. Pasek	66,5 m	Menanggulangi Ionsor	2018	Rp 43,895,000	DD
		12	Rabat Beton Lingkungan Buahhan Pasek	BD. Pasek	312 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 70,125,200	DD
		13	Rabat Beton Lingkungan Bakungan	BD. Bakungan	265 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 61,319,400	DD
		14	Tambal Sulam Lingkungan Batu Ngadeg	BD. Batu Ngadeg	572 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 79,537,400	DD
		15	Rabat Beton dan Senderan Jalan Lingkungan Wayan Kariawan	BD. Batu Ngadeg	100 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 32,396,300	DD
		16	Rabat Beton Jalan Kancing Gumi	BD. Batu Ngadeg	400 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 79,465,500	DD
		17	Rabat Beton Jalan setapak Lingkungan Komang Raka	BD. Batu Ngadeg	555 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 42,867,300	DD

2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	18	Penyengker Pura Dalem Banjar Bakungan	BD. Bakungan	73 m	Penataan Pura	2018	Rp 34,954,000	Pajak dan Restribusi
		19	Betonisasi Jalan Setapak menuju Pura Subak Bakung Sari	BD. Bakungan	450 m	Memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 31,317,300	SILPA ADD
		20	Btonisasi Jalan Pengalokasian TPA	Desa Tajun	177 m	Penataan Kebersihan lingkungan	2018	Rp 41,615,700	DD
		21	Pengembangan Tribun di Lapangan Giri Mukti	Desa Tajun	65, 4 m ³	Meningkatkan minat olahraga pemuda	2018	Rp 60,823,000	DD
		22	Perbaikan Saluran Drainase/Got Lingkungan Pasek	Desa Tajun	25 m	Memperlancar Arus Air	2018	Rp 9,359,500	DD
		23	Rabat Beton di Penataran Padmasana	Desa Tajun	18, 8 m	Meningkatnya kenyamanan dalam sembahyang	2018	Rp 10,000,000	PAD
		24	Tambal Beton Jalan lingkungan Puseh	Desa Tajun	150 0 m	memperlancar arus barang jasa	2018	Rp 10,000,000	PAD
		25	Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa	Desa Tajun	25 Titik	Meningkatnya keamanan Desa	2018	Rp 5,000,000	PAD
		26	Pelestarian Lingkungan Hidup	Desa Tajun	5 ora ng	Penataan Kebersihan lingkungan	2018	Rp 4,500,000	PAD
		27	Senderan Jaba Sisi Pura Dalem	Desa Tajun			2018	Rp 67,520,000	BKK
		28	Upacara Ngajum Melis	Desa Tajun			2018	Rp 43,430,000	BKK

2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	29	Upacara Neduh di Pura Bale Agung	Desa Tajun			2018	Rp 84,050,000	BKK
		30	Piodalan di Pura PusehDesa Pakraman Bayad	Bd. Bayad			2018	Rp 58,500,000	BKK
		31	Piodalan di Pura Desa Ds. Pakraman Bayad	Bd. Bayad			2018	Rp 66,000,000	BKK
		32	Piodalan di Pura Dalem Desa Pakraman Bayad	Bd. Bayad			2018	Rp 70,500,000	BKK
		33	Piodalan Pura Subak Batu Ngadeg	Desa Tajun			2018	Rp 35,000,000	BKK
		34	Mecaru Kesanga Subak batu Ngadeg	Desa Tajun			2018	Rp 2,000,000	BKK
		35	Mecaru Keenem Subak batu Ngadeg	Desa Tajun			2018	Rp 8,000,000	BKK
		36	Rehab Bale Pesamuan dan Pewaregan Subak Tanah Barak	Desa Tajun			2018	Rp 20,000,000	BKK
		37	Upacara Piodalan Subak Tanah Barak	Desa Tajun			2018	Rp 15,000,000	BKK
		38	Mecaru Subak Tanah Barak	Desa Tajun			2018	Rp 10,000,000	BKK

2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	39	Piodalan, Ngelanus dan Mecaru Subak Batu Rimpi	Desa Tajun		2018	Rp 45,000,000	BKK
		40	Pembangunan Gedong Pura Subak bukit Pudeh	Desa Tajun		2018	Rp 45,000,000	BKK
		41	Piodalan Pura Subak tumpul Sari	Desa Tajun		2018	Rp 30,000,000	BKK
		42	Pembangunan Pelelingih dan Pemesean Ring Jaba Sisi Subak Tumpul Sari	Desa Tajun		2018	Rp 15,000,000	BKK
		43	Piodalan Pura Subak Bukit Buahhan	Desa Tajun		2018	Rp 39,750,000	BKK
		44	Mecaru Subak bukit Buahhan	Desa Tajun		2018	Rp 5,250,000	BKK
		45	Piodalan Pura Subak Abian Pengubengan	Desa Tajun		2018	Rp 30,000,000	BKK
		46	Upacara Mecaru Kesanga Subak Abian Pengubengan	Desa Tajun		2018	Rp 2,000,000	BKK
		47	Upacara Mecaru Keenem Subak Abian Pengubengan	Desa Tajun		2018	Rp 13,000,000	BKK

2	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	48	Pembangunan pelinggih Pengapit Lawang Subak Tampak Sa	Desa Tajun	2018	Rp 6,218,000	BKK
		49	Piodalan Pura Tampak Sa	Desa Tajun	2018	Rp 32,250,000	BKK
		50	Mecaru dan nyungsang Pura Tampak Sa	Desa Tajun	2018	Rp 6,532,000	BKK
			Jumlah Kegiatan 50	Propentase terhadap Anggaran Total (62%)			
						Rp 1,839,177,660.44	

Sumber: <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/58-Rencana-Kerja-Pembangunan-Desa-Tahun-2018>

Tabel 1.5. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
3	Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	1	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan pemahaman tentang adat dan Budaya	2018	Rp 9,800,000	ADD
		2	Desa Tajun	33 orang	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan Desa	2018	Rp 1,500,000	ADD
		3	Desa Tajun	21 orang	Meningkatkan kegiatan hansip	2018	Rp 19,800,000	ADD
		4	Desa Tajun	1 Tahun	Meningkatnya aktivitas Masyarakat	2018	Rp 25,000,000	ADD
		5	Desa Tajun	19 orang	Meningkatkan Kesejahteraan Pengulu Desa	2018	Rp 4,171,450	BKK
		6	Desa Tajun	12 Bulan	Meningkatkan rasa Nasionalisme	2018	Rp 500,000.00	ADD
		7	Desa Tajun	120 Balita/67 lansia	Meningkatkan kesehatan Masyarakat Balita dan Lansia	2018	Rp 17,400,000	ADD
		8	Desa Tajun	2 Ds. Pakraman	Meningkatkan Kelancaran Kegiatan PHDI	2018	Rp 20,000,000	BKK
		9	Desa Tajun			2018	Rp 5,000,000.00	ADD
Jumlah Kegiatan 9							Rp 103,171,450	
Prosentase terhadap Anggaran Total (3%)								

Sumber: <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/58-Rencana-Kerja-Pembangunan-Desa-Tahun-2018>

Tabel 1.6. APB Desa Tajun 2018 – Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan Pelatihan Perbelak dan Perangkat Desa	Desa Tajun	15 Orang	Meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa	2018	Rp 3,000,000.00	ADD
		2	Pakaian Seragam PKK	Desa Tajun	40 Orang	Meningkatkan kreativitas PKK	2018	Rp 10,000,000.00	PAD
		3	Pelatihan KUR untuk PKK	Desa Tajun	30 Orang	Meningkatnya Pelaksanaan KUR	2018	Rp 17,400,000.00	ADD
		4	Beasiswa Berprestasi	Desa Tajun	5 Sekolah	Meningkatkan motivasi siswa	2018	Rp17,550,000.00	ADD
		5	Pakaian Seragam Untuk WHDI	Desa Tajun	25 orang	Meningkatkan Keseragaman Pengurus WHDI	2018	Rp 5,000,000.00	ADD
		6	Pelestarian Lingkungan Hidup	Desa Tajun	5 orang	Penataan Kebersihan lingkungan	2018	Rp 13,500,000	PAD
		7	Kegiatan Operasional TK	Desa Tajun	5 Guru	Meningkatnya Kesejahteraan Guru	2018	Rp 12,000,000	ADD
		8	Bantuan untuk Sembako Lansia	Desa Tajun	30 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan Lansia	2018	Rp 6,500,000	PAD
		9	Pengadaan buku Perpustakaan	Desa Tajun		Meningkatkan Minata Baca Masyarakat	2018	Rp 10,000,000	ADD
Jumlah Kegiatan 8									
Prosentase terhadap Anggaran Total (3%)								Rp 94,950,000	

Sumber: <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/58-Rencana-Kerja-Pembangunan-Desa-Tahun-2018>

Tabel 1.7. Rangkuman RKP Desa 2018 Desa Tajun

No.	Keterangan	Total Pemasukan	Total Pengeluaran	Persentase
A.	RAPB Desa Tajun 2018	Rp 2,982,408,110.00		100%
B.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 844,765,800.21	0.2832 ≈ 28.32%
Total Belanja				28.32% ≈ 28%
C.	Bidang Pembangunan Desa			
	• Bidang Pembangunan		Rp. 1,839,177,660.44	0.6167 ≈ 61.67%
	• Bidang Pembinaan Masyarakat		Rp. 103,171,450.00	0.0346 ≈ 3.46%
	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 94,950,000.00	0.0318 ≈ 3.18%
	• Bidang Modal di BUMDesa		Rp. 100,000,000.00	0.0335 ≈ 3.35%
Total Belanja				71.66% ≈ 72%

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 1.3 -1.6

Dengan besaran prosentase belanja bidang pembangunan terhadap keseluruhan RAPB Desa yaitu 72% maka rencana pembangunan di desa Tajun amat sangat baik. Di tingkat pemerintah kabupaten atau kota biasanya hanya mengalokasikan besaran belanja pembangunan sampai dengan maksimal 40%, sedangkan anggaran untuk belanja pegawai sebesar maksimal 60%, bahkan banyak kabupaten dan kota yang memiliki porsi 30% - 70%. Membandingkan dengan tingkat kabupaten/kota, maka Desa Tajun memiliki rencana pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebijakan terintegrasi yang memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi, kebutuhan masyarakat dan potensi desa Tajun sendiri.

Kepala Desa Tajun, Gede Ardana, menyampaikan bahwa kinerja RPJM Desa atau RKP Desa tidak lagi didasarkan pada ukuran-ukuran output melainkan dampak jangka panjang (impact). Dengan besaran APB Desa

mencapai hampir Rp 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), direncanakan kegiatan-kegiatan yang berdampak jangka panjang dan memberdayakan seperti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemauan warga Desa Tajun.

C. Inovasi Pembangunan Ekonomi Lokal

Dalam bagian ini akan dilakukan analisa terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Desa Tajun dalam membangun perekonomian desanya. Penelitian terdahulu oleh tim peneliti UNPAR tentang Desa inovatif, unggul dan berkelanjutan²⁶ yang telah dilaksanakan di tahun 2016 dan 2017 menghasilkan sebuah model pembangunan dan pengembangan desa yang inovatif, unggul dan berkelanjutan. Model tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1. Model Dinamis Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Desa untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan

Sumber: Prasetyo et. al (2017) Inovasi untuk mewujudkan Desa Unggul & Berkelanjutan

Model tersebut dapat digunakan untuk memahami upaya sebuah desa untuk membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi di desa, namun sayangnya model tersebut tidak cukup untuk memahami bagaimana setiap potensi di desa digali dan dikembangkan. Dengan demikian analisa tentang inovasi pengembangan ekonomi Desa Tajun ini menggunakan alat analisa yang disebut sebagai 'market system development' (Springfield, 2009) atau disebut sebagai pembangunan sistem pasar yang merupakan

26 Prasetyo dkk. (2017), Inovasi: Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan, Edisi Pertama & Edisi Kedua

perkembangan dari analisa value chain (rantai nilai). Dengan analisa market system development, maka dapat dipahami bagaimana rantai nilai potensi desa Tajun dan semua aspek-aspek yang mendukung rantai nilai potensi tersebut.

Tabel 1.8. Inovasi Kelembagaan Desa Tajun

Inovasi Kelembagaan Desa Tajun
1. Badan Usaha Milik Desa (Milik Desa Dinas) <ul style="list-style-type: none">a. Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih (U.P.S)b. Unit Usaha Simpan Pinjam (dengan produk-produk keuangan seperti: tabungan, deposito, tabungan Hari Raya, simpanan Masa Depan, kredit)c. Unit Usaha Pasar Desad. Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadue. Unit Usaha Sarana Produksi Pertanianf. Pelayanan Jasa Lainnya (pelayanan yang disediakan yaitu pelayanan SAMSAT, Transfer (Setor/Tarik Tunai) Bank Kerjasama, Pulsa Listrik & HP (Telepon Genggam) dan Bank Sampah
2. Lembaga Perkreditan Desa (Milik Desa Adat)
3. Kelompok-kelompok Petani Cengkeh

Inovasi pembangunan ekonomi lokal yang dilakukan oleh Desa Tajun dapat dikategorikan menjadi dua aspek yaitu (1) inovasi kelembagaan keuangan mikro (*micro financial institutions*) dan (2) inovasi produk. Tabel Berikut ini menjelaskan tentang inovasi kelembagaan yang ada di Desa Tajun.

C.1. Inovasi Kelembagaan: BUMDesa dan Lembaga Keuangan Mikro Desa

Dalam bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai kelembagaan yang ada di Desa Tajun. Seperti yang telah dijelaskan diatas, modal sosial yang tinggi dimiliki oleh Desa Tajun, termasuk didalamnya adalah kemauan dan kemampuan warga masyarakat Desa Tajun untuk berkumpul dan berorganisasi. Dua lembaga yang menonjol di Desa Tajun adalah BUMDES Mandala Ciri Amertha dan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Tajun.

C.1.1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mandala Giri Amertha (MGA)

BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun telah didirikan pada tahun 2010, empat tahun sebelum Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan. UU tersebut memberikan peluang besar bagi desa-desa di Indonesia untuk membangun desa dengan menggunakan dana desa yang diamanatkan oleh UU tersebut.

Dari aspek waktu, Desa Tajun merupakan desa yang visioner. Tidak seperti desa-desa lainnya di Indonesia yang baru memiliki BUMDesa dengan menggunakan dana desa sebagai modal pembentukan BUMDesa, Desa Tajun tidak menunggu dana desa. Desa Tajun menggunakan alokasi dana desa (perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten) untuk menjadi modal mendirikan BUMDes Mandala Giri Amertha.

Melalui BUMDes Mandala Giri Amertha (MGA), pendapatan masyarakat desa Tajun yang sebagian besar dari hasil cengkeh yang bernilai tinggi dapat dikelola dengan lebih baik. Cengkeh merupakan hasil perkebunan yang bersifat musiman, artinya berkebun cengkeh bagi para petani memang mendatangkan hasil yang sangat tinggi namun hanya pada saat-saat panen saja. Di luar masa panen, para petani cengkeh yang hanya mengandalkan pada cengkeh dan tidak memiliki sumber pendapatan yang lain akan mengalami kesulitan, dan akan menjadi lebih sulit bagi para petani yang tidak memiliki kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik. BUMDesa MGA, melalui seluruh produk layanannya, menyediakan wadah bagi warga desa (terutama petani cengkeh) untuk dapat mengelola keuangan hasil cengkehnya dengan lebih baik. Tentunya bukan hanya petani cengkeh, namun setiap warga desa Tajun (apapun mata pencaharian yang dimilikinya) dapat mengakses layanan yang disediakan oleh BUMDesa MGA. Keberadaan BUMDesa MGA ini meningkatkan literasi keuangan warga Desa Tajun. Bagi petani cengkeh yang menghadapi kesulitan dalam hal pembiayaan untuk perawatan pohon cengkeh miliknya dan memerlukan pinjaman maka dapat mengajukan pinjaman kepada BUMDes MGA.

Selain meningkatkan literasi keuangan warga desa, BUMDesa MGA juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi cengkeh di Desa Tajun. BUMDesa MGA menyediakan informasi terkait harga cengkeh di pasaran yang diunggah pada halaman jejaring sosial hingga website desa guna memudahkan petani untuk mengetahui harga cengkeh di pasaran dan dalam pengambilan keputusan tentang

kepada siapa atau pihak mana cengkeh tersebut nantinya hendak dijual. Informasi tersebut juga berguna dalam membandingkan informasi harga yang biasanya diinformasikan oleh pengepul atau dalam hal ini pembeli cengkeh dengan informasi di pasaran yang telah dihimpun sebelumnya oleh aparatur desa. Ada 2 (dua) unit usaha yang dibentuk oleh BUMDesa MGA, yaitu Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu.

1. Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih

Air bersih yang dibutuhkan untuk penyiraman pohon cengkeh termasuk dalam penggunaan air untuk Skala Ekonomi Produktif. Petani dapat menggunakan air yang disediakan oleh BUMDes Desa Tajun dengan harganya yang cukup terjangkau meskipun harga air untuk kebutuhan Skala Ekonomi Produktif lebih mahal dari pada harga air untuk MCK. Sebelum adanya Unit Pengelolaan Sarana Air Bersih ini, petani cengkeh menggunakan air sungai untuk menyiram pohon cengkeh, namun di musim kemarau air sungai tentu surut. Sebenarnya petani cengkeh di Desa Tajun telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menemukan titik – titik sumber mata air yang sayangnya lalu hilang karena longsor saat musim hujan. Untuk mencegah hal itu, masyarakat Desa Tajun membuat biopori. Artomo (2015)²⁷ mendeskripsikan bahwa “Biopori merupakan pori mikro di dalam tanah, berbentuk saluran sambung menyambung, yang dibentuk oleh akar tanaman dan fauna tanah”. Biopori memiliki banyak manfaat, antara lain:²⁸

- a. Mengurangi debit air masuk ke selokan sehingga dapat mengurangi debit air
- b. Memberikan gas yang baik bagi ozon jika yang dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori adalah sampah organik
- c. Tidak memakan tempat
- d. Melawan intrusi air laut ke dalam tanah
- e. Biaya pembuatan lebih hemat dibandingkan alternatif lain seperti pembuatan sumur resapan, parit resapan, atau kolom resapan

Menurut Kepala BUMDesa Tajun²⁹, semua petani di Desa Tajun membuat biopori dengan tujuan agar air tidak mengalir ke kebun orang lain dan mencegah longsor.

27 Artomo (2015), Halaman Hijau

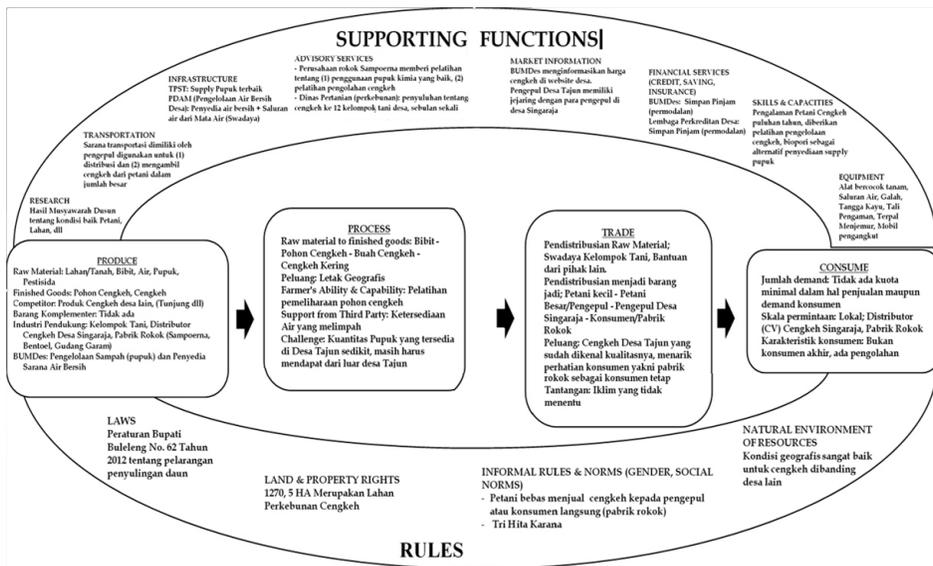
28 Ibid

29 Wawancara dilakukan di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 – 12.00

Saat ini sudah 1.200 dari 1.900 Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan PDAM, dimana 1 water meter digunakan oleh 3 KK.³⁰ Sebanyak 701 KK sisanya menggunakan sumber mata air dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimana air tersebut berasal dari bak penampungan air hujan yang kemudian dialirkan menggunakan pipa air yang berasal dari KSM juga dan water meter yang didapat dari BUMDesa Tajun.³¹

Selain penduduk Desa Tajun, air yang digunakan juga disalurkan ke 2 (dua) desa lain. Hal ini dikarenakan pada saat Aparat Pemerintah Desa Tajun mengajukan laporan pengadaan sarana prasarana air bersih, Pemerintah Kabupaten memberikan ijin dengan syarat bukan hanya Desa Tajun saja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut serta Desa Tajun berkewajiban membantu maintenance dari desa-desa yang menggunakan sarana prasarana tersebut.³²

Analisa market system development pada gambar berikut menjelaskan lebih detail terkait Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih yang dimiliki oleh Desa Tajun.



Gambar 1.2. Analisa Market System Development Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih

30 Wawancara dilakukan dengan Kepala BUMDesa Tajun di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 - 12.00

31 Ibid

32 Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Tajun di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 - 12.00

2. Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu

Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu mengolah sampah – sampah hasil konsumsi masyarakat Desa Tajun untuk dijadikan pupuk organik. Unit usaha yang didirikan pada tahun 2012 ini memudahkan petani Desa Tajun untuk dapat mengakses pupuk – pupuk dengan harga murah. Hal ini menguntungkan para petani yang tidak memiliki ternak dan mampu menghasilkan pupuk kandang. Meskipun demikian, saat ini kebutuhan pupuk organik di Desa Tajun masih belum terpenuhi karena kurangnya *raw material* yang dimiliki (masyarakat mulai menggunakan sampah rumah tangga mereka untuk digunakan dalam biopori yang dibuat oleh mereka sendiri).

Padahal Desa Tajun sudah mendapatkan tambahan pasokan sampah daun dari desa tetangga, yaitu: Desa Tunjung, Desa Depeha, dan Desa Sembiran. Pembuatan unit usaha ini sejalan dengan Program Bali Clean and Green yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Program Buleleng Bebas Sampah Plastik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.³³ Sesudah membuat unit usaha ini, aparat Pemerintah Desa Tajun kemudian membuat Bank Sampah atau Rumah Kompos sebagai lokasi penampungan sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan karena sebelum Rumah Kompos terbentuk, sampah-sampah hanya di taruh di atas tanah beratap terpal.³⁴ Modal untuk mengembangkan unit usaha ini didapatkan dari beberapa pihak yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

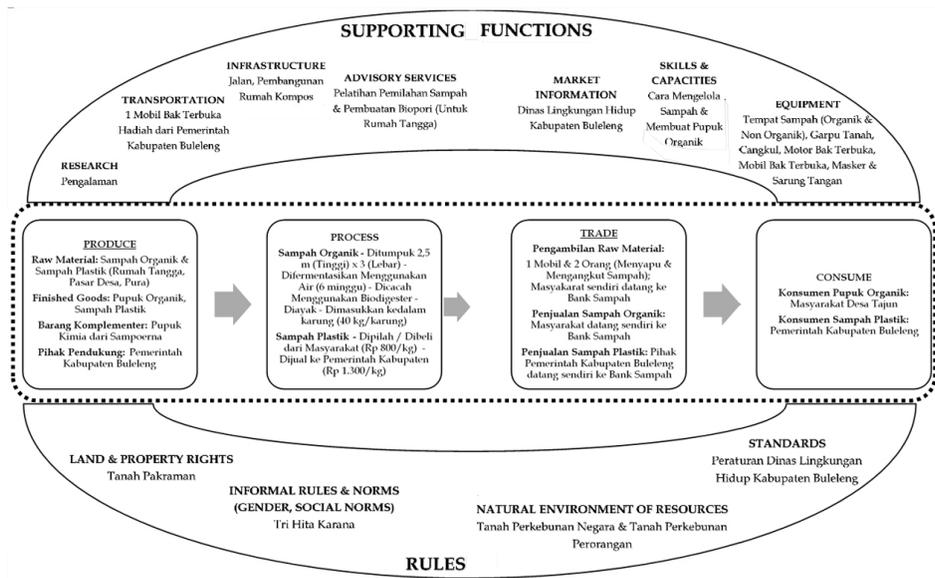
Tabel 1.9. Modal Pengembangan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu

No.	Pihak	Bantuan
1	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali	Mesin, Pelatihan
2	Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali	Dana, Mobil Bak Terbuka
3	BUMDesa Tajun	Tanah, Sumber Daya Manusia

Sumber: Wawancara dengan Kepala BUMDesa Tajun

33 Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Tajun di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 10.00 – 12.00

34 Wawancara dilakukan dengan Kepala BUMDesa Tajun di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 – 12.00



Gambar 1.3. Analisa Market System Development Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu

Analisa market system development pada gambar sebelumnya menjelaskan lebih detail terkait Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu yang dimiliki oleh Desa Tajun. Berikut ini gambar-gambar yang diambil dari lokasi Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu (Rumah Kompos atau Bank Sampah).



Gambar 1.4. Sampah Organik yang Difermentasi & Alat Pengayak



Gambar 1.5. Tumpukan Sampah Plastik yang Sudah Dipilah (a) & Pupuk Organik (b)

BUMDesa MGA didirikan dengan modal hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari penyertaan Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun demikian, saat ini asset BUMDesa MGA Desa Tajun telah mencapai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).³⁵ Hanya berjarak 5 tahun sejak berdirinya, pada tahun 2015, BUMDesa MGA mampu membangun Gedung BUMDesa MGA yang megah. Dana pembangunan bersumber dari dana desa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan hasil keuntungan BUM Desa MGA sebesar Rp 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). BUMDesa Tajun juga memenangkan Juara I Tingkat Nasional di tahun 2016. Selanjutnya, dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambil dari sumber Dana Desa (DD) yang akan menjadi penyertaan modal bagi BUMDesa MGA.^{36,37}

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tajun, keberhasilan BUMDesa tidak melulu harus dinilai berdasarkan besaran asset yang dimiliki atau *profit* yang dihasilkan³⁸ namun lebih kepada kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDesa ini kepada setiap lapisan masyarakat yang menjadi nasabah atau anggota BUMDesa tersebut. Tidak seperti badan usaha umumnya di sektor swasta, kualitas BUMDesa akan sangat ditentukan oleh kepercayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap para pengurus BUMDesa, rekam jejak kerja para pengurus BUMDesa serta kejujuran, keterbukaan dan pertanggungjawaban dari para

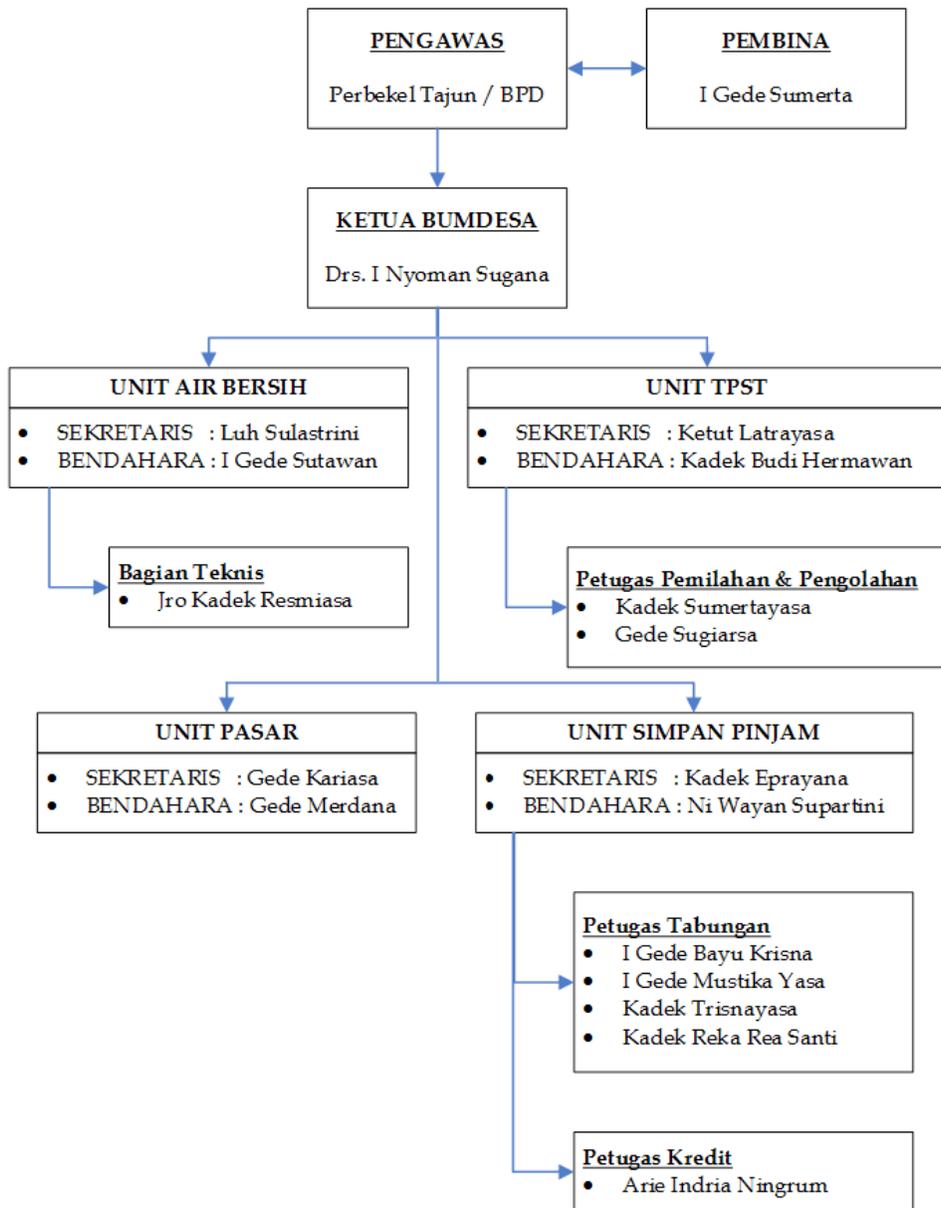
35 Ibid

36 Dapat diperhatikan pada Tabel 1.3 - Tabel 1.7 tentang APBDesa tahun 2018

37 Dapat dilihat di <http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/kategori/6>

38 Wawancara dengan Ir. Gede Ardana pada tanggal 12 September 2018 di Kantor Desa Tajun Buleleng, Bali.

pengurus BUMDesa tersebut. Dalam aspek ini, Desa Tajun jelas memiliki modal (lebih tepatnya modal sosial) yang sangat baik seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Berikut ini struktur struktur pengurus BUMDesa MGA Desa Tajun.



Gambar 1.6. Struktur Pengurus BUMDesa MGA Desa Tajun

Sumber: www.tajun-buleleng.desa.id

Tabel sebelumnya menunjukkan struktur pengurus BUMDesa MGA Desa Tajun, dimana penanggung jawab BUMDesa MGA adalah Ketua BUMDes, Drs. I Nyoman Sugana, dan setiap unit usaha memiliki Bendahara dan Sekretaris yang bertanggung jawab terhadap unit usaha yang dikepalainya. Ketiga jabatan tersebut dibantu oleh 18 (delapan belas) orang pengurus. Jumlah pengurus ini disesuaikan dengan jumlah unit usaha yang dimiliki oleh BUMDesa MGA.

Visi BUMDesa MGA adalah “mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tajun melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan moto “Mari Bersama Membangun Desa”.³⁹ Ada 5 poin dalam misi BUMDesa ini, yaitu:⁴⁰

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil
- b. Pengembangan layanan sosial melalui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin
- c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- e. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

BUMDesa MGA memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) dari setiap unit usaha yang dimilikinya. SHU adalah “pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku (tahun buku BUMDesa sama dengan tahun kalender).”⁴¹ SHU yang didapatkan oleh BUMDesa MGA dialokasikan untuk berbagai hal seperti dalam tabel berikut dan analisa market system development BUMDesa MGA Desa Tajun dapat dilihat pada gambar berikut ini.

39 Diambil dari www.tajun-buleleng.desa.id

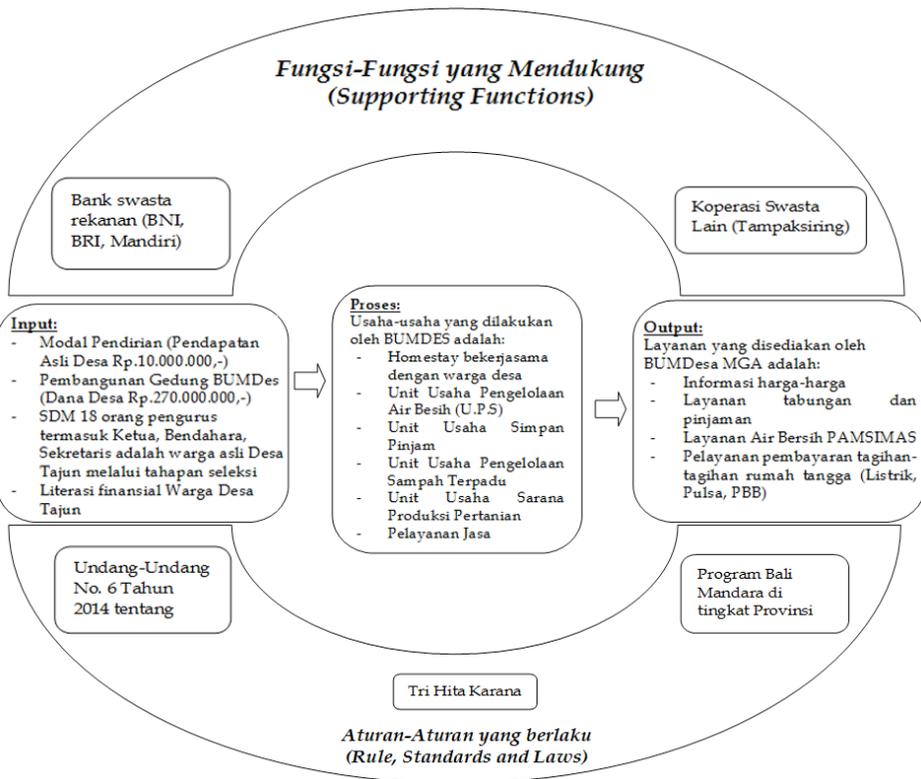
40 Ibid

41 Ibid

Tabel 1.10. Alokasi SHU BUMDesa MGA Desa Tajun

Keterangan	Persentase
Penguatan Modal BUMDesa MGA	50%
Dana Pembangunan Desa	25%
Dana Jasa Produksi	15%
Dana untuk Gaji pengurus & pegawai	5%
Dana Sosial	5%

Sumber: www.tajun-buleleng.desa.id



Gambar 1.7. Analisa Market System Development BUM Desa Mandala Giri Amertha

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDesa MGA⁴², diketahui bahwa BUMDesa tersebut memiliki produk layanan keuangan berupa Paket Simpanan Masa depan (SIMASDA), Buku Tabungan, dan Tabungan Hari Raya. Paket SIMASDA merupakan paket simpanan yang berjangka waktu 1 (satu) hingga 20 (dua puluh) tahun dengan setoran yang diberikan bervariasi per kelipatan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan biasanya digunakan para orang tua untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak mereka. Penggunaan buku tabungan mirip seperti buku tabungan bank, dimana masyarakat dapat menabung dan mendapatkan bunga per bulan. Tabungan Hari Raya digunakan masyarakat untuk mempersiapkan pengeluaran hari raya yang biasa diadakan di Bali. Biasanya dalam sekali perayaan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak sedikit. Oleh karena itu masyarakat diajarkan untuk menabung demi acara tersebut. Berikut ini adalah gambar produk layanan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa MGA.



Gambar 1.8. Produk Layanan Keuangan BUMDesa MGA Desa Tajun

42 Wawancara dilakukan dengan Kepala BUMDesa Tajun di Kantor Desa pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.00 - 12.00

C.1.2. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekraman Tajun

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat⁴³ merupakan lembaga berbasis desa adat yang ada di Bali dan menjadi kekhasan Bali. LPD diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. LPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi mengurus dua hal yaitu (1) agama dan (2) adat istiadat. Namun dengan LPD memberikan pelayanan bidang keuangan mikro, maka dua fungsi tersebut bertambah yaitu fungsi keuangan mikro desa adat. Hal ini berarti bahwa, meskipun di tempat lain di Indonesia ada desa adat namun tidak akan ditemukan LPD seperti halnya di Bali. Bentuk yang paling dekat dengan LPD Desa Adat berdasarkan wawancara dengan Ketua LPD adalah 'lumbung nagari'. Dua lembaga ini berdasarkan pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013, dibebaskan dari pembayaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena LPD telah mengalokasikan 20% dari keuntungannya untuk langsung digunakan untuk keperluan mensejahterakan warga desa Adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPD, keberadaan LPD dan BUMDesa MGA diumpamakan sebagai fungsi 'suami dan istri' yang saling mendukung dalam sebuah rumah tangga.

LPD Desa Adat Pekraman Tajun⁴⁴ dibentuk di tanggal 9 September tahun 2001 dengan bermodal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambilkan dari sisa urunan untuk pembangunan pura desa adat. Saat ini modal LPD telah mencapai Rp 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah)⁴⁵. Bidang kegiatan dan layanan yang disediakan oleh LPD tidak boleh keluar dari wilayah Desa Adat. LPD dibentuk dari embrio perkumpulan suka duka yang menjadi ciri khas Bali. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris LPD didapatkan informasi bahwa saat ini LPD tidak diperbolehkan menerima penyertaan modal dari dana desa. Namun baik ketua LPD maupun sekretaris LPD mengakui bahwa apabila secara hukum dan perundang-undangan LPD boleh menerima penyertaan modal dari dana desa maka akan sangat berkontribusi terhadap

43 Desa Adat di Bali dibentuk dengan memenuhi beberapa syarat yaitu (1) terdiri dari minimal 200 kepala keluarga, (2) memiliki tiga kahyangan yaitu pura desa, pura dalam, dan pura puseh, (3) memiliki lahan makam tersendiri

44 Desa Adat Pekraman Tajun hanya melayani warga yang tinggal di Desa Tajun. Desa dinas Tajun sendiri terdiri dari dua desa adat, yaitu desa Tajun dan desa Bayan. Desa Bayan memiliki desa adat sendiri. Wilayah kerja Desa Adat Pekraman Tajun hanya di Desa Tajun, artinya LPD Desa Adat Pekraman Tajun tidak akan diperbolehkan memberikan pelayanan kepada warga desa Bayan meskipun mereka juga merupakan bagian dari warga desa Dinas Tajun. Desa Bayan memiliki LPD sendiri.

45 Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPD

perkembangan LPD karena dapat meningkatkan angka kecukupan modal sampai dengan minimal 12% (dua belas persen) dan maksimal 39% (tiga puluh sembilan persen). Saat ini satu-satunya cara mengembangkan modal LPD adalah disisihkan dari keuntungan LPD⁴⁶. Tingkat kesehatan LPD akan dinilai dari keseimbangan antara jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dengan jumlah dana yang dapat disalurkan melalui berbagai kredit. Sesuai dengan Perda tentang LPD maka struktur organisasi LPD terdiri dari:

- a) Pengawas internal dan pengawas eksternal yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang pengawas sebagai berikut:
 - a. Pengawas Internal, yaitu:
 - Ketut Partiwā (pernah menjabat sebagai Kepala Desa Adat)
 - Ir Gede Ardana (catatan: Gede Ardana telah menjadi pengawas LPD sebelum terpilih menjadi Kepala Desa, karena pengalaman beliau bekerja diperbankan. LPD sendiri mengadopsi beberapa praktik perbankan untuk pengelolaannya)
 - Made Sumarka (Kepala Desa Adat Pekraman Tajun)
 - b. Pengawas Eksternal, yaitu:
 - Lembaga Pengawas LPD tingkat Kabupaten (Bidang Pemberdayaan)
 - Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 - Lembaga Pengawas LPD tingkat Provinsi yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- b) Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus (yaitu ketua, sekretaris, bendahara⁴⁷ yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa Adat (Prarem), dengan masa kepengurusan sampai dengan 60 tahun, berdasarkan Peraturan Daerah)
- c) Pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pegawai. Pegawai LPD direkrut melalui tes seleksi oleh pengurus dan ini adalah salah satu kewenangan LPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPD dan sekretaris LPD maka diketahui bahwa pegawai LPD Desa Adat Pekraman Tajun yang berpendidikan sarjana menerima gaji dengan sistem prosentase dan menerima sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta

46 Berdasarkan hasil wawancara, LPD di Bali berbeda bentuk kelembagaannya dengan koperasi. Perbedaan utama adalah bahwa koperasi membayar pajak sementara LPD tidak membayar pajak. Perbedaan berikutnya adalah koperasi boleh melakukan kegiatan diluar wilayah tempat koperasi itu berasal, hal ini tentu berbeda dengan LPD yang hanya boleh melaksanakan kegiatannya dilingkungan desa adat dimana LPD tersebut berasal.

47 Istilah ketua diganti dengan Pamucuk, Sekretaris dengan Penyarikan dan Bendahara dengan Patengen untuk menunjukkan kekhasan Bali

rupiah), dimana ini adalah gaji terendah yang diterima oleh pegawai. Selain menerima gaji dan insentif, para pegawai juga mendapatkan pelatihan-pelatihan pengelola LPD dari Pemerintah Kabupaten maupun kabupaten. Pegawai-pegawai LPD ini selama bekerja akan disupervisi dan dikenali sedemikian rupa oleh pengurus, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat menggantikan pengurus yang sekarang, tentunya dengan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa Adat (Prarem).

- d) Jumlah pengurus dan pegawai ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi LPD. Saat ini seluruh pengurus dan pegawai di LPD mendapatkan gaji dengan sistem prosentase (30% dari keuntungan yang dihasilkan oleh LPD akan dialokasikan untuk gaji pegawai). Justru dengan sistem gaji prosentasi inilah pengurus LPD merasa ini adalah sistem yang lebih adil dan memberikan mereka semangat untuk bekerja lebih baik, karena bila LPD menghasilkan laba lebih banyak berarti gaji mereka juga akan lebih besar. Pegawai mendapatkan insentif (sebesar satu permil⁴⁸) berdasarkan saldo tabungan yang dipungut oleh para pegawai yang melakukan 'jemput bola' kepada nasabah LPD-LPD. Sistem 'jemput bola' juga dilakukan oleh petugas tabungan BUMDesa MGA.
- e) Berikut ini adalah foto-foto para pegawai LPD yang melakukan pelayanan 'jemput bola' kepada nasabah di pasar tradisional Desa Tajun.



Gambar 1.9. Wawancara Ketika Pegawai LPD Melakukan 'Jemput Bola'

48 Permil adalah perseribu, dimana 1 permil = $1/1.000$. Permil merupakan bentuk pecahan bilangan yang memiliki simbol ()

NO.	NAMA	NOMOR TABUNGAN	JUMLAH	SALDO NASABAH	TT PETUGAS
1	Ist. Dewi Renni	5206	Rp. 100.000,-	7.811,-	
2	Ist. Evi	4495	Rp. 150.000,-	2.797,-	
3	Ist. KRYA	5205	Rp. 50.000,-	1.966,-	
4	Ist. ANINI	5207	Rp. 20.000,-	561,-	
5	Ist. Nwila	5209	Rp. 20.000,-	101,-	
6	Ist. Sri Maharani	5411	Rp. 60.000,-	241,-	
7	Ist. SYHA ALIA MIMAH	3182	Rp. 200.000,-	2.200,-	
8	Ist. APRILIA	3233	Rp. 50.000,-	6.385,-	
9	Ist. SIKHIT	5600	Rp. 20.000,-	430,-	
10	Ist. ESTI	5607	Rp. 20.000,-	1.780,-	
11	Ist. CANDINA	2083	Rp. 50.000,-	1.507,-	
12	Ist. ESTERIA	2666	Rp. 100.000,-	1.207,-	
13	MIRB	338	Rp. 30.000,-	14.062,-	
14	AYAHAN MUMBI	5242	Rp. 100.000,-	1.152,-	
15	Ist. ANITA	5730	Rp. 50.000,-	2.170,-	
16	Ist. DWI PRABHA	2077	Rp. 100.000,-	2.407,-	
17	Ist. SURI	5662	Rp. 20.000,-	200,-	
18	Ist. IRI MARIANI	533	Rp. 10.000,-	614,-	
19	Ist. HENRI	2023	Rp. 100.000,-	35.225,-	
20	Ist. IRI CANDINA	4573	Rp. 150.000,-	2.761,-	
21			Rp.		
22			Rp.		
23			Rp.		
24			Rp.		
25			Rp.		

Gambar 1.10. Pembukuan Oleh Pegawai LPD Saat Melakukan 'Jemput Bola'

f) LPD Desa Adat Pekraman Tajun merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan jasa keuangan (simpan pinjam) yaitu tabungan⁴⁹ (sepelan) dan deposito (sesepelan) serta layanan berbagai kebutuhan warga desa Tajun (LPD telah menjalin kerjasama dengan berbagai toko kebutuhan rumah tangga dan elektronik). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Tajun sebagai warga desa adat bersifat rutin. Namun untuk Bali sendiri, kegiatan-kegiatan adat dan keagamaan merupakan kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan, karena hal itu yang membuat ekonomi Bali terus dapat bergerak maju (pariwisata). Namun pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan dan adat istiadat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk Upacara Ngaben yang diadakan secara individual biasanya membutuhkan biaya sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk membantu warga desa dalam hal pembiayaan tersebut maka dibuatlah LPD. Dengan keberadaan LPD Upacara Ngaben bisa dilaksanakan secara massal dan hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

49 Istilah tabungan dan deposito sudah mulai dihilangkan dari LPD dan digantikan dengan istilah yang menggambarkan kekhasan Bali yaitu sepelan dan sesepelan

- g) Karena lembaga ini merupakan lembaga adat, maka apabila ada peristiwa kredit macet, yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengalami kredit macet adalah sanksi adat/sanksi sosial (biasanya diumumkan secara terbuka kepada warga masyarakat sehingga timbul rasa malu, serta tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan adat dan pelayanan Administrasi dari LPD). Meskipun saat ini kinerja LPD sudah sangat baik, namun LPD Desa Adat Pekraman Tajun pernah mengalami krisis dan bangkrut 2 (dua) kali yaitu selama kepengurusan yang lama antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2001. Krisis tersebut disebabkan oleh manajemen pengurus yang salah dan tidak baik. Pengurus yang sekarang merupakan LPD yang ke-3 dan menjadi pengurus yang berhasil memperbaiki kinerja LPD Desa Adat Pekraman Tajun meskipun awalnya mereka bekerja untuk LPD tanpa digaji.
- h) Di Bali sendiri, terdapat Badan Kerjasama LPD se-Bali yang beranggotakan lebih dari 1400 LPD se-Bali dengan jumlah asset total sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Dalam badan kerjasama ini, terdapat 20 (dua puluh) desa yang berfokus kepada kebencanaan juga.

Desa adat di Bali, termasuk Desa Adat Pekraman Tajun memiliki pendapatan asli desa adat. Asset yang dimiliki oleh LPD saat ini telah mencapai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh LPD Desa Adat Pekraman Tajun akan dibagi-bagi dengan porsi sebagai berikut.

Tabel 1.11. Alokasi Keuntungan LPD Desa Adat Pekraman Tajun

Alokasi	Prosentase
Pendapatan Asli Desa adat	20%
Penguatan Modal LPD Desa Adat Pekraman Tajun	60%
Jasa Produksi (yaitu untuk Gaji Pengurus dan karyawan)	10%
Dana Sosial (sumbangan kematian, sumbangan bencana, sumbangan untuk anak-anak sekolah yang putus sekolah)	10%

Sumber: Wawancara dengan Ketua LPD Desa Tajun, Konfirmasi oleh Kepala Desa Tajun

Sampai saat penelitian ini dilakukan, nasabah LPD telah mencapai 80% dari seluruh warga desa Desa Adat Pekraman Tajun. Berikut ini adalah data detail nasabah LPD.

Tabel 1.12. Kinerja LPD Desa Adat Pekraman Tajun Tahun 2016, 2017, dan 2018

No.	Jenis Layanan	Jumlah nasabah	Besaran Dana
Per Agustus 2018			
1	Tabungan	4155	Rp. 7.800.000,-
2	Deposito	148	Rp. 15.560.500.000,-
3	Kredit	483	Rp. 20. 456. 613.000,-
Per Desember 2017			
1	Tabungan	3984	Rp. 8.755.888.000,-
2	Deposito	156	Rp. 14.223.000.000,-
3	Kredit	476	Rp. 18. 456. 037.000,-
Per Desember 2016			
1	Tabungan	3800	Rp. 8.923.874.000,-
2	Deposito	158	Rp. 14.506.800.000,-
3	Kredit	490	Rp. 22.320.916.000,-

Sumber: Wawancara dengan Ketua LPD Desa Tajun, Konfirmasi oleh Kepala Desa Tajun

LPD Desa Adat Pekraman Tajun amat sangat mementingkan konsep layanan yang baik, dan saat ini telah menjalin kerjasama dengan bank-bank seperti Bank Mandiri (dalam bentuk produk Mantap Mandiri Taspen), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).⁵⁰ BUMDesa MGA Desa Dinas Tajun pun pada saat berdirinya di tahun 2010, mereka belajar tentang pengelolaan BUMDesa dari LPD Desa Adat Pekraman Tajun. Dengan pengalaman gagal dua kali dan kehilangan kepercayaan dari nasabah, yaitu warga Desa Adat Pekraman Tajun, maka LPD Desa Adat Pekraman Tajun patut dikagumi ketangguhannya untuk bangkit dari krisis.

C.1.3. Kelompok-Kelompok Tani

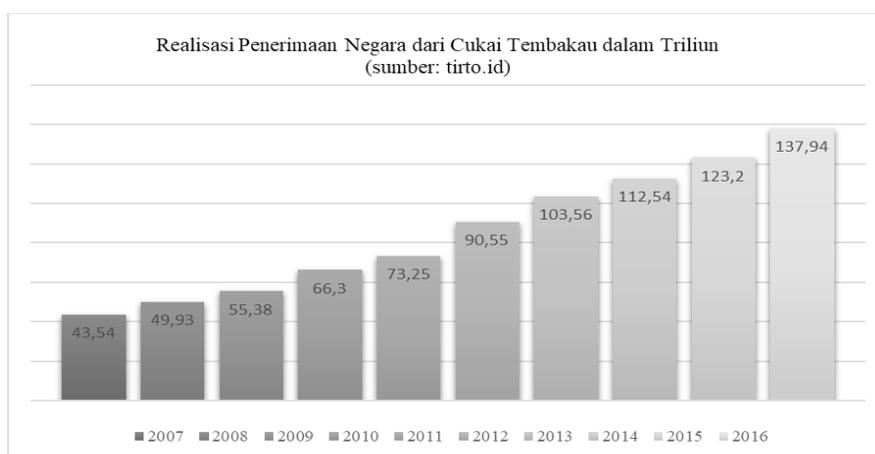
Inovasi kelembagaan berikutnya adalah pembentukan kelompok-kelompok petani cengkeh. Kelompok tani ini dibentuk berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Pembentukan kelompok tani ini bahkan diresmikan melalui surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tajun sehingga dilindungi oleh payung hukum. Pengelompokan petani Desa Tajun bertujuan untuk memudahkan penyebaran informasi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan cengkeh hingga hal - hal umum yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak di Desa Tajun. Kelompok tani ini juga berguna dalam hal pendistribusian barang - barang mentah atau kebutuhan yang dibutuhkan mereka dalam menanam, merawat hingga memanen pohon cengkeh yang mereka miliki, bahkan hingga proses pemasarannya. Salah satu contoh tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan tindakan swadaya oleh para petani dalam mengakses titik - titik sumber mata air guna mengairi perkebunan mereka. Saat ini Desa Tajun memiliki kurang lebih 12 Kelompok Tani aktif yang tersebar diberbagai daerah di Desa Tajun. Meskipun begitu, masih terdapat petani yang belum tergolong kedalam 12 Kelompok Tani tersebut. Kelompok tani ini juga memfasilitasi akses petani-petani terhadap pembiayaan mikro (micro finance) dengan model tanggung renteng.

C.2. Inovasi Produk: Cengkeh Andalan Desa Tajun

Cengkeh merupakan salah satu produk agrikultur yang dimiliki oleh Desa Tajun yang hingga saat ini masih menjadi primadona dibandingkan dengan produk agrikultur lain yang dimiliki oleh desa tersebut. Hal ini tidak hanya disebabkan karena rempah ini merupakan rempah khas asli yang

50 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPD

Indonesia miliki, tetapi juga penggunaan cengkeh sebagai bahan baku untuk produk rokok yang menjadikan hasil pertanian ini menjadi salah satu sumber harapan bagi masyarakat Desa Tajun dalam mendongkrak kondisi ekonomi serta roda kehidupan mereka, mengingat banyak warga Indonesia sendiri yang mengkonsumsi rokok dalam kesehariannya. Bahkan penelitian “The Tobacco Atlas 3rd Edition” pada tahun 2009 menyebutkan bahwa perokok di Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN, dengan persentase 46.16% dari keseluruhan penduduk negara-negara ASEAN⁵¹. Rokok juga memiliki peranan penting dalam berbagai hal misalnya saja, kontribusi rokok terhadap pendapatan negara melalui cukai pengolahan tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Per tahun 2008 sendiri, penerimaan cukai tembakau meningkat 29 kali lipat dari Rp 1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) di tahun 1990 menjadi Rp 49.900.000.000.000,- (empat puluh sembilan triliun sembilan ratus miliar rupiah).⁵² Hal ini kemudian berlanjut hingga tahun 2016 dimana pada tahun tersebut, realisasi penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp 137.940.000.000.000 (seratus tiga puluh tujuh triliun sembilan ratus empat puluh miliar rupiah).⁵³



Gambar 1.11. Realisasi Penerimaan Negara dari Cukai Tembakau (Dalam Triliun)

Sumber: tirto.id

Tingginya penerimaan negara dari cukai tembakau tersebut salah satunya disebabkan oleh konsumsi masyarakat Indonesia terhadap rokok (atau dikenal dengan istilah pengeluaran rumah tangga terhadap rokok). Di tahun 2003 hingga 2006 sendiri, pengeluaran rumah tangga terhadap

51 <http://www.ums.ac.id/jumlah-perokok-di-indonesia-masih-tinggi.html>

52 TCSC - IAKMI. Peningkatan Cukai Tembakau dan Dampak Perekonomian. Jakarta

53 <http://tirto.id/seberapa-banyak-rokok-sumbang-pemasukan-kas-negara.html>

rokok mengalami peningkatan dari semula Rp 103.356/bulan menjadi Rp 117.624/bulan.⁵⁴ Hal tersebut juga didukung dengan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Family Life Survey (IFLS) yang menyatakan bahwa pengeluaran rumah tangga terhadap rokok mengalami peningkatan dari 3,6% di tahun 1993 menjadi 5,6% di tahun 2014.⁵⁵ Dengan melihat potensi yang luas tersebut, maka masyarakat Desa Tajun memilih untuk menggantungkan penghidupan pada cengkeh yang bernilai tinggi.

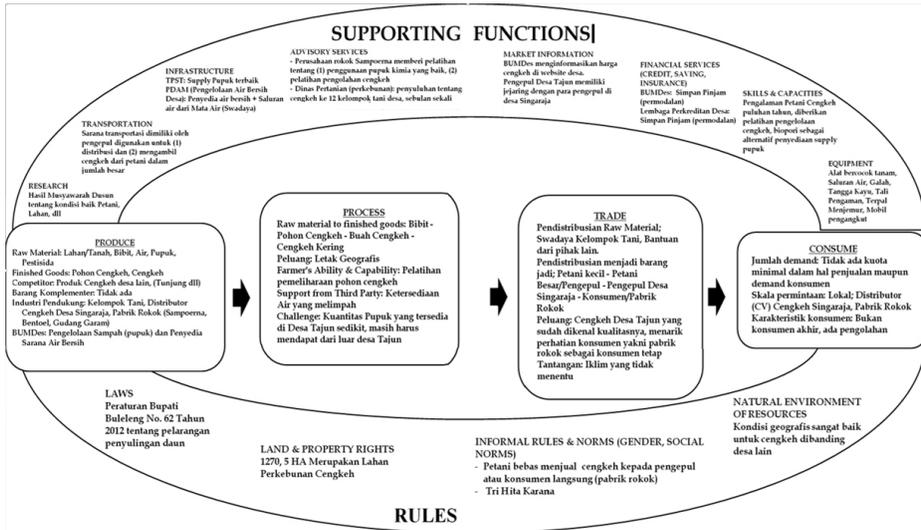
Penanaman cengkeh di Desa Tajun di mulai tahun 1975. Saat itu Petani Desa Tajun menanam jeruk sebagai produk utama. Kemudian, beberapa dari petani memulai menanam cengkeh untuk menambah pendapatan. Dengan memanfaatkan letak geografis dan iklim Desa Tajun yang sangat baik dan menguntungkan bagi pertumbuhan pohon cengkeh. Petani Desa Tajun memperoleh bibit cengkeh dari Kota Blitar, Jawa Timur, dengan cara swadaya yang dilakukan oleh masing-masing petani.

Pada tahun 1983, produksi jeruk Desa Tajun mengalami kemunduran, disebabkan wabah penyakit yang menyerang perkebunan jeruk di Desa Tajun. Pada saat itu, petani mulai hijrah dari bertanam jeruk menjadi bertanam cengkeh. Proses pembelian bibit pun masih dilakukan hingga akhir tahun 90an hingga akhirnya di awal tahun 2000, Petani cengkeh Tajun mulai berinovasi untuk menghasilkan bibit cengkeh unggul yang mereka nilai baik dan cocok untuk digunakan di desa mereka. Hal ini terus dilakukan hingga saat ini. Petani-petani cengkeh di Desa Tajun secara swadaya mengembangkan bibit cengkeh mereka sendiri dan tidak lagi menggantungkan pada bibit cengkeh dari Blitar. Waktu yang dibutuhkan dari bibit pohon cengkeh menjadi pohon cengkeh dewasa yang menghasilkan (panen) adalah kurang lebih 5 (lima) tahun. Proses penjualan cengkeh akan sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca yang dapat membantu proses pengeringan cengkeh berlangsung cepat.

Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan tentang Analisa Market System Development Cengkeh Desa Tajun. Bagan ini menggambarkan secara jelas rantai nilai cengkeh dari input sampai dengan produk cengkeh sampai ke pengguna. Selain itu juga dijelaskan mengenai fungsi-fungsi yang mendukung rantai nilai cengkeh, juga aturan dan dukungan pemerintah.

54 TCSC - IAKMI. Peningkatan Cukai Tembakau dan Dampak Perekonomian. Jakarta

55 <http://merdeka.com/uang/penelitian-pengeluaran-masyarakat-indonesia-untuk-beli-rokok-terus-naik.html>



Gambar 1.12. Analisa Market System Development Cengkeh Desa Tajun

Seperti yang tercantum dalam bagan Analisa Market System Development Cengkeh Desa Tajun, Desa Tajun telah mandiri dalam hal penyediaan bibit cengkeh. Walaupun demikian, dalam hal penyediaan pupuk masih belum terpenuhi dengan baik. Meskipun untuk rantai nilai produksi cengkeh BUMDes MGA telah membuat Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu dan memproduksi pupuk organik, namun kebutuhan untuk pupuk bagi pohon-pohon cengkeh masih harus dipenuhi melalui pembelian pupuk dari luar Desa Tajun. Tidak hanya pupuk organik yang dibutuhkan dalam penanaman cengkeh, namun juga diperlukan pupuk anorganik. Hal ini berarti bahwa akan ada tantangan yang luar biasa sulit untuk produk cengkeh Desa Tajun untuk dikembangkan menjadi produk cengkeh organik. Selain itu diperlukan juga investigasi lebih mendalam apakah dalam industri yang menggunakan bahan baku cengkeh, produk cengkeh yang dikembangkan dengan menggunakan pupuk organik dibutuhkan dan bernilai lebih tinggi, atau produk organik bukanlah sebuah hal yang diinginkan oleh industri cengkeh. Menurut peneliti, masih ada potensi permintaan cengkeh organik terutama untuk Industri Kosmetik. Meskipun dari tabel penerimaan dari cukai tembakau Indonesia terus meningkat, namun diperlukan pemahaman visioner oleh petani-petani Desa Tajun terhadap perkembangan industri rokok yang membutuhkan cengkeh. Kedepannya, para petani Desa Tajun harus mempersiapkan strategi pengembangan produk cengkeh menjadi produk olahan lainnya.

C.2.1. Produksi Cengkeh Desa Tajun

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, cengkeh merupakan salah satu rempah yang bernilai tinggi. Berikut ini adalah informasi mengenai harga cengkeh per tanggal 14 September 2018 yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para petani cengkeh di Desa Tajun.

Tabel 1.13. Informasi Harga Cengkeh per Tanggal 14 September 2018

No.	Kelompok Cengkeh	Keterangan Kualitas		Harga /Kilogram
		Kadar Air	Melalui Proses Pemilahan	
1.	Cengkeh Kualitas Super	Rendah	Ya	Rp 91.000,- s/d Rp 92.000,-
2.	Cengkeh Kualitas Biasa	Sedang	Ya	Rp 85.000,- s/d Rp 90.000,-
3.	Cengkeh Asalan	Tinggi	Tidak	Rp 80.000,- s/d Rp 84.000,-

Sumber: Wawancara dengan Petani dan Pengepul Cengkeh Desa Tajun

Meskipun dibandingkan dengan harga komoditas perkebunan yang lain cengkeh dianggap berharga tinggi. Hal tersebut tampak dari tabel tentang informasi harga cengkeh. Harga - harga diatas bukan merupakan harga terbaik yang pernah didapat oleh Petani Cengkeh Desa Tajun. Petani cengkeh pernah mendapatkan harga cengkeh sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram pada beberapa tahun silam. Harga cengkeh tentu dipengaruhi oleh permintaan terhadap cengkeh baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pengalaman ini membuktikan bahwa resiko keberlanjutan produksi cengkeh perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan sustainability atau keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Desa Tajun yang akan sangat beresiko apabila hanya mengandalkan pada produksi cengkeh.

Proses pemetikan cengkeh di Desa Tajun masih menggunakan alat-alat tradisional yaitu alat bantu tangga kayu atau galah yang dimodifikasi untuk dapat memetik cengkeh serta memisahkan buah cengkeh dari dahan atau pohonnya. Selain itu, pemetik cengkeh juga masih menggunakan tali yang

diikatkan kepada tubuh guna melindungi mereka saat proses pemetikan berlangsung. Saat ini Desa Tujung adalah satu-satunya desa yang memiliki kemampuan terbaik dalam memetik cengkeh.⁵⁶ Oleh karena itu Petani Desa Tajun harus bersaing dengan desa lain saat meminta penduduk Desa Tujung memetik cengkeh yang sudah panen. Meskipun demikian, saat ini penduduk Desa Tajun ada yang tetap berperan sebagai pemetik cengkeh. Harga yang dibayarkan untuk memetik cengkeh berbeda-beda. Jika para pemetik disuruh memetik pohon cengkeh di area atas maka biaya yang harus dibayar berkisar antara Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) hingga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogram.⁵⁷ Tetapi jika mereka memetik pohon cengkeh di area bawah maka biaya yang harus dibayar adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.⁵⁸ Biasanya para pemetik memiliki tim sendiri dalam memetik cengkeh.

Pengolahan hasil panen cengkeh memang memerlukan proses yang panjang, seperti halnya hasil panen yang lain. Cengkeh yang sudah di panen harus dipilah sesuai dengan jenisnya, yaitu bagian dari buah cengkeh, tangkai, serta bunganya. Selama observasi di Desa Tajun, peneliti menemukan bahwa petani-petani cengkeh melakukan proses pengeringan secara tradisional yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari. Ketiga bagian cengkeh tersebut kemudian dihamparkan pada sebuah alas terpal sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari sampai benar-benar kering. Petani memanfaatkan halaman rumah mereka untuk proses pengeringan tersebut. Kualitas hasil proses pengeringan menentukan harga jual cengkeh seperti yang sudah disebutkan diatas.



Gambar 1.13. Cengkeh Sebelum Dijemur (a) & Sesudah Dijemur (b)

56 Berdasarkan wawancara dengan mantan petani dan pengepul cengkeh Desa Tajun

57 Berdasarkan wawancara dengan mantan petani dan pengepul cengkeh Desa Tajun

58 Ibid



Gambar 1.14. Penjemuran Cengkeh di Area Rumah Warga Desa Tajun

Cengkeh kering kemudian akan diolah menjadi bahan baku pembuatan rokok. Bagian tangkai serta bunga yang sudah kering akan diolah melalui proses penyulingan sebagai bahan baku pembuatan minyak cengkeh. Perusahaan – perusahaan besar yang membeli cengkeh kering dari Desa Tajun adalah PT. HM Sampoerna Tbk., PT. Gudang Garam Tbk., PT. Bentoel Internasional Investama Tbk., dan terakhir PT. Djarum.⁵⁹

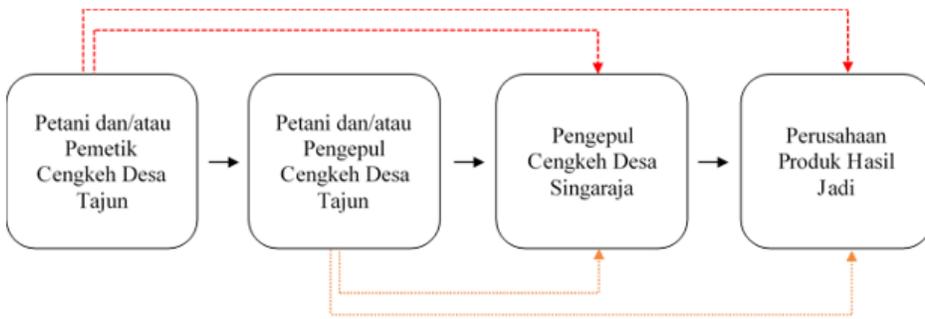
Tabel 1.14. Kategori Petani Cengkeh di Desa Tajun

Jenis Petani	Keterangan
Petani kecil	Lahan sempit, baru memulai membudidayakan cengkeh
Petani besar	Lahan luas, merangkap sebagai pengepul (baik di Desa Tajun maupun luar desa Tajun/Singaraja)
Tenaga pemetik	Mendapatkan cengkeh dari hasil bekerja sebagai pemetik cengkeh (upah tambahan)

Pohon cengkeh dapat tumbuh mencapai 8 – 12 meter dan mampu untuk bertahan hidup selama bertahun – tahun⁶⁰. Di tahun kelima sejak pohon cengkeh ditanam, pohon cengkeh biasanya baru akan menghasilkan biji cengkeh. Satu pohon cengkeh, dapat menghasilkan kurang lebih 50 – 100 kg cengkeh basah (hasil petik). Kuantitas panen per pohon tentu akan sangat dipengaruhi oleh usia pohon, iklim, penggunaan pupuk dan lain sebagainya.

59 Berdasarkan wawancara dengan petani dan pengepul cengkeh Desa Tajun

60 <https://ilmubudidaya.com/cara-menanam-cengkeh>



Keterangan:

- Alur penjualan cengkeh (mayoritas, berlaku pada banyak petani di Desa Tajun)
- Alur penjualan cengkeh (alternatif, dilakukan oleh beberapa petani di Desa Tajun)

Gambar 1.15. Alur Pendistribusian Cengkeh Kering Desa Tajun

Bagan diatas menjelaskan bahwa proses penjualan cengkeh kering meliputi:

- Petani dan/atau Pemetik kepada Petani dan/atau Pengepul di Desa Tajun
- Petani dan/atau Pemetik kepada Pengepul di Desa Singaraja
- Petani dan/atau Pemetik kepada Perusahaan produk hasil jadi
- Petani dan/atau Pengepul di Desa Tajun kepada Pengepul di Desa Singaraja
- Petani dan/atau Pengepul di Desa Tajun kepada Perusahaan produk hasil jadi
- Pengepul di Desa Singaraja kepada Perusahaan produk hasil jadi.

C.2.2. Dampak Produksi Cengkeh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tajun

Produksi cengkeh di Desa Tajun berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Tajun. Dua dampak utama dari cengkeh dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, cengkeh kering memberikan pendapatan yang sangat tinggi bagi masyarakat Desa Tajun. Kedua, produksi cengkeh menciptakan lapangan pekerjaan dari petani hingga tenaga pemetik cengkeh. Produksi cengkeh di Desa Tajun bahkan berhasil menarik tenaga kerja dari luar Desa Tajun, contohnya Desa Tunjung yang bekerja sebagai pemetik cengkeh. Tenaga kerja tidak hanya dibutuhkan pada saat panen yaitu untuk memetik cengkeh, namun juga di tahap perawatan pohon cengkeh, misalnya pemberian pupuk dan penyiraman air pada pohon cengkeh.

Perhitungan kasar biaya yang dikeluarkan oleh seluruh petani Desa Tajun pada saat masa panen untuk ongkos petik adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).⁶¹ Namun sayangnya para pekerja pemetik cengkeh ini bukan hanya berasal dari Desa Tajun, namun juga berasal dari luar desa Tajun. Dengan demikian sejumlah uang yang seharusnya didapatkan oleh para petani dan beredar di Desa Tajun dari hasil panen raya cengkeh, akan hilang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) karena dibayarkan kepada pemetik cengkeh (tenaga kerja) dari luar Desa Tajun bahkan sampai dengan wilayah Karangasem. Untuk mengurangi hilangnya uang beredar di Desa Tajun inilah maka aparat pemerintah Desa Tajun mendirikan pasar desa. Langkah tersebut merupakan langkah yang sangat tepat untuk mempertahankan uang beredar di Desa Tajun.

Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tajun serta petani cengkeh Desa Tajun, didapatkan informasi bahwa:

- a. Ongkos petik cengkeh oleh pemetik cengkeh Desa Tajun adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kg cengkeh
- b. Ongkos pemisahan cangkang cengkeh Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kg cengkeh
- c. 1 (satu) hektar lahan cengkeh akan menghasilkan 2 (dua) ton cengkeh kering yang akan menghasilkan 200 (dua ratus) kilogram cengkeh kering
- d. Dari 4 (empat) kwintal cengkeh basah akan didapatkan 1 (satu) kwintal cengkeh kering
- e. Dengan demikian dalam waktu satu hari, pemetik cengkeh akan mendapatkan upah maksimal sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari saat panen raya cengkeh.

D. Dampak Inovasi Desa Tajun

BUMDesa MGA dikembangkan sebagai sebuah sistem yang secara integral saling mendukung untuk pengembangan seluruh potensi Desa Tajun. Sebagai contoh (dapat dilihat dalam Analisa Market System Development Cengkeh Desa Tajun di Gambar 12), Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan pendukung utama kebutuhan peningkatan produktivitas usaha cengkeh bagi petani-petani di Desa Tajun. Pengembangan BUMDes sebagai sebuah sistem yang terintegritas ini belum dipahami oleh semua desa di Indonesia.

61 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tajun

Pembangunan ekonomi di Desa Tajun tidak dilakukan secara parsial tetapi sebagai sebuah sistem yang terhubung satu sama lain dan saling menguatkan. Hal ini lah yang menyebabkan Desa Tajun menjadi maju.

Dampak yang paling signifikan dalam kesejahteraan masyarakat Desa Tajun ditunjukkan oleh Desa Tajun sebagai penerima penghargaan dalam bidang penurunan angka kemiskinan yang diberikan oleh Gubernur Bali pada tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gede Ardana sebagai Kepala Desa Tajun, memang dipahami bahwa apabila menggunakan ukuran angka kemiskinan standard nasional (standard survei Badan Pusat Statistik) maka tidak akan ditemukan lagi orang miskin di Desa Tajun. Tentu kepala desa yang baik tidak akan berhenti bekerja membangun desanya walaupun seluruh warganya telah mencapai garis kesejahteraan. Yang dilakukan oleh Gede Ardana adalah tetap memasukkan rumah tangga yang berada tepat di garis kesejahteraan dan membuat standar penilaian kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding standar nasional. Dengan demikian, masih terus akan ada dorongan untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di Desa Tajun ini juga merupakan hasil dari RPJM Desa Tajun yang menyesuaikan dengan MP3KI yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia.

Berbagai inovasi dan prestasi yang dicapai oleh Desa Tajun yang telah diuraikan diatas membuat Desa Tajun menjadi rujukan praktik penyelenggaraan pemerintah terutama untuk upaya perencanaan pembangunan desa. Selain itu keberhasilan pengelolaan BUMDesa Mandala Ciri Amertha juga menjadikan Desa Tajun menjadi rujukan berbagai desa dari dalam negeri maupun luar negeri (kunjungan paling baru di Bulan November 2018 adalah dari perwakilan negara Ethiopia). Dengan menjadi rujukan banyak pihak yang ingin belajar tentang bagaimana Desa Tajun dapat menjadi desa yang maju, maka Desa Tajun terus menerus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Pengetahuan dan pengalaman tidak akan pernah habis di bagi, justru sebaliknya semakin sering dibagi maka semakin bertambah pula pengetahuan dan pengalaman Desa Tajun untuk menjadi Desa yang terus maju, unggul dan berkelanjutan.



BAB II

POTENSI EKONOMI DESA TERINDAH DI DUNIA

DESA NAGARI PARIANGAN

BAB II

POTENSI EKONOMI DESA TERINDAH DI DUNIA: DESA NAGARI PARIANGAN

**Theresia Gunawan^a, Albert Mangapul Parulian Lumban Tobing^b,
Dhia Khalila Rinjany^c**

A. Pendahuluan

Nagari Pariangan merupakan nagari atau desa yang terletak di kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Desa ini juga merupakan salah satu desa yang terletak di lereng Gunung Merapi. Desa terletak pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah seluas 17.97 km² (Wikipedia, 2018). Nagari Pariangan ini terdiri dari empat jorong atau empat desa kecil lainnya, antara lain: Jorong Pariangan, Jorong Guguak, Jorong Padang Panjang, serta jorong Sikaladi. Adapun batas-batas wilayah Nagari Pariangan adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Nagari Bukik Batabuah,
Kabupaten Agam
- Selatan berbatasan dengan : Nagari Simabus dan Nagari
Batu Basa
- Barat berbatasan dengan : Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh
- Timur berbatasan dengan : Nagari Sawah Tengah

^{a b} Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^c Alumnus Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Nagari Pariangan juga dipercaya sebagai salah satu Nagari tertua di ranah Minang Kabau. Lebih lanjut, Desa Nagari ini dipercaya merupakan nagari yang menjadi tempat asal muasal nenek moyang minangkabau. Pada tahun 2008, Tim dari American Budget Traveller datang ke Nagari Pariangan untuk meminta data terkait dengan desa tersebut kepada salah satu Tokoh di Nagari Pariangan, yaitu Pak Irwan Malin Basa. Adapun kedatangan American Budget Traveller ini terkait dengan program mereka yang berhubungan dengan penentuan desa-desa di dunia yang dapat dijadikan referensi untuk berlibur. Lebih lanjut lagi, referensi yang dikeluarkan oleh American Budget Traveller ini dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu *the most beautiful village*, maupun *the dirtiest village in the world*. Pada saat itu, American Budget Travellerpun mengadakan survey kepada lebih kurang 2000 turis yang datang ke Nagari Pariangan untuk menanyakan unsur-unsur apa yang membuat Nagari Pariangan itu menjadi kota yang indah. Di akhir survey tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2012, American Budget Traveller memutuskan bahwa Nagari Pariangan merupakan desa ke-empat (4) terindah di dunia. Selain Pariangan, desa-desa lain yang termasuk dalam kategori desa terindah di dunia versi majalah itu adalah Desa Wengen di Swiss, Desa Eze- Prancis, Niagara on The Lake- Kanada, dan Cesky Krumlov- Ceko-slovakia (Harian Haluan, 2016). Adapun salah satu pertimbangan yang membuat Nagari Pariangan menjadi salah satu desa terindah di dunia adalah karena aspek budaya, *landscape* dan adat yang masih lestari dan masih kuat dipegang oleh penduduk desa nagari pariangan (Wawancara dengan Pak Irwan, Oktober, 2018). Menurut hasil wawancara dengan Wali Nagari, diketahui bahwa saat ini saja pengunjung yang datang ke Nagari Pariangan bisa mencapai 2000 orang pada hari sabtu dan minggu. Sedangkan di hari libur seperti 7 hari sebelum dan sesudah lebaran, pengunjung yang datang ke Nagari Pariangan bisa mencapai 40.000 pengunjung. Jumlah ini tentunya bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi terdapat kemungkinan jumlah ini akan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya saat desa ini telah berbenah dan benar-benar siap menjadi desa wisata.

Saat ini, Nagari Pariangan di pimpin oleh seorang Wali Nagari yang bernama April Khatib Sidi.



Gambar 2.1. Struktur Pemerintahan Desa Nagari Pariangan,
Kecamatan Pariangan- Kabupaten Tanah Datar

B. Analisis Potensi dan Sumber Daya Ekonomi

B.1. Potensi Wisata Nagari Pariangan

Menurut Pak Irwan, salah satu pertimbangan yang membuat Nagari Pariangan menjadi salah satu desa terindah di dunia adalah budaya, pemandangan, dan adat yang masih asri dan sangat terjaga. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Nagari Pariangan ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang sangat besar dari ketiga aspek tersebut. Lebih jauh lagi, Nagari Parianganpun merupakan daerah yang memiliki sangat banyak situs-situs sejarah yang dapat dilirik sebagai potensi wisata. Adapun beberapa situs sejarah serta tempat-tempat yang menyuguhkan keindahan alam di Nagari Pariangan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

Kuburan Panjang Tanteto Gurhano

Kuburan panjang merupakan salah satu makam tua yang terdapat di Nagari Pariangan yang memiliki panjang sekitar 25 meter dan lebar sebesar 1,2 meter. Menurut sejarahnya, diketahui bahwa makam ini merupakan makam dari seseorang yang bernama Tantejo Gurhano yang dipercayai

sebagai arsitek pertama dari Rumah Gadang Minang Kabau. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak, diketahui bahwa Tantejo Gurhano memperoleh inspirasi bentuk rumah gadang dari perahu yang dia bawa saat ia berlayar (Sumber: Buku Nagari Pariangan). Terdapat suatu keunikan dari Kuburan Panjang ini yaitu apabila diukur dengan langkah kaki seseorang, maka tidak akan menemukan ukuran yang sama panjang untuk kedua sisinya. Meskipun dilakukan berulang kali oleh satu orang yang sama. Selain itu, terdapat dua kepercayaan mengapa ukuran kuburan ini sangat panjang mencapai 25 meter, yaitu: a) mitos yang mempercayai bahwa Tantejo Gurhano ini memiliki badan yang sangat tinggi menyerupai raksasa; b) kepercayaan yang mempercayai bahwa Tantejo Gurhano memiliki tinggi badan yang normal layaknya manusia biasa, hanya saja saat ia meninggal jasadnya dikremasi lalu abunya ditaburi di tanah sepanjang 25 meter. Kepercayaan ini didasari fakta bahwa pada saat Tantejo Gurhano hidup adalah masa dimana hindu masuk sehingga jasad dari orang yang meninggal haruslah dikremasi. Sehingga ada anggapan bahwa abu dari jasad yang dikremasi tersebut disebar di atas tanah sepanjang 25 meter. Saat ini kuburan Panjang dianggap sebagai kuburan keramat dimana masih ada kepercayaan untuk berdoa di kuburan tersebut.



Gambar 2.2. Kuburan Panjang Tantejo Gurhano

Balai Panjang

Secara sederhana, bangunan Balai Panjang merupakan tempat Niniak Mamak atau tetua adat di Nagari Pariangan bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara, apabila terdapat penduduk Nagari yang melanggar hukum adat yang ada di sana. Saat warga Nagari Pariangan melanggar hukum adat, maka penentuan sanksi atas kesalahannya terlebih dahulu diputuskan atau dimusyawarahkan di tingkat tetua adat atau Niniak Mamak. Ketika Niniak Mamak telah memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara, maka dilakukanlah sidang terhadap terdakwa secara adat oleh majelis hakim. Hal ini dilakukan untuk menentukan hukuman yang setimpal kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut.

Menurut buku Nagari Pariangan, diketahui bahwa balai di Nagari Pariangan merupakan tempat yang berbatu dan terdiri dari tempat duduk serta batu sandaran. Adapun batu sandaran tersebut digunakan untuk diduduki oleh Niniak mamak untuk bermusyawarah. Selain itu, Undang-undang terkait adat dibuat oleh niniak mamak dulunya ditempat itu.

Balai Pasujian

Balai Pasujian pada jaman dahulu kala digunakan sebagai tempat untuk memeriksa dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nagari Pariangan. Pemeriksaan atau penyelidikan atas sebuah perkara dilakukan di Balai ini. Adapun penyelidikan dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan Datuk Rajo Api. Datuk Rajo Api ini memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti atas kesalahan yang telah diberikan oleh penduduk Nagari Pariangan. Apabila di Balai Pasujian ini, terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka dia dapat dibebaskan dan tidak perlu menjalani sidang selanjutnya yang akan dilakukan di Balai Panjang. Namun apabila terdakwa terbukti salah maka dia akan dibawa ke Balai Katiak untuk menjalani hukuman agar memperoleh pengakuan, yang kemudian akan disidangkan di Balai Panjang.

Balai Katiak

Balai Katiak yang artinya balai yang ketek (kecil) yang digunakan sebagai tempat tahanan atau penjara bagi tersangka yang melakukan kesalahan di Nagari Pariangan. Tempat ini digunakan untuk menahan baik tersangka maupun terdakwa baik sebelum ataupun sesudah putusan yang dijatuhkan di Balai Saruang.

Balai Saruang

Balai Saruang merupakan salah satu balai yang terdapat di Nagari Pariangan yang digunakan sebagai tempat peradilan atas segala suatu perkara yang terjadi di Nagari Pariangan. Berdasarkan buku Nagari Pariangan, diketahui bahwa Bahandaro Kayo sebagai tampauk Tangka Alam Minangkabau dapat memutuskan segala suatu perkara serta dapat memutuskan hukuman atas perkara tersebut yang tidak bisa dibanding lagi. Dalam memutuskan perkara, Bahandaro Kayo dibantu oleh Niniak mamak yang ada di Nagari Pariangan.



Gambar 2.3. Balai Saruang (Tempat Pengadilan Jaman Dahulu)

Foto diatas merupakan gambaran balai saruang jika terlihat dari luar. Sayangnya, peneliti tidak dapat mendokumentasikan balai tersebut dari dalam dikarenakan saat itu balai sedang tidak digunakan untuk mengadili perkara apapun, sehingga balai yang ada di Nagari Pariangan terkunci.

Pemandian Air Panas

Letak wilayah Nagari Pariangan di lereng Gunung Merapi membuat daerah ini memiliki udara yang sangat sejuk. Selain itu, air yang mengalir di sepanjang Nagari Parianganpun begitu dingin. Namun anehnya, di hilir desa air yang mengalir tidak hanya air yang dingin, namun terdapat aliran air yang mengeluarkan air yang sangat panas. Sumber daya alam inilah yang digunakan oleh warga Nagari Pariangan, khususnya yang berada di Jorong Pariangan sebagai tempat pemandian air panas. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat beberapa tempat pemandian air panas, yang terdiri dari pemandian air panas pria dan wanita. Pemandian air panas yang ada di Nagari Pariangan bukanlah berbentuk kolam air panas yang dapat digunakan untuk berendam, namun lebih kepada pancoran air panas yang terletak di dalam satu ruangan. Namun antara satu pancoran dengan pancoran air panas lainnya dalam keadaan tidak bersekat, sehingga selama kita mandi maka kita bisa berbicara dan bercengkrama dengan pengunjung lain atau warga lokal Nagari Pariangan yang sedang mandi disana. Pemandian air panas ini lebih sering digunakan oleh warga lokal pariangan. Biasanya, warga lokal akan pergi dari rumah menuju ke pemandian air panas pada pagi hari dan sore hari menjelang magrib. Saat melakukan observasi ke tempat pemandian Air Panas, diketahui bahwa pemandian air panas tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi oleh warga lokal, melainkan juga untuk mencuci baju. Sehingga waktu yang digunakan oleh warga lokal untuk berada di pemandian air panas lebih lama dari biasanya, sehingga waktu untuk saling bertegur sapa dan bercengkrama dengan warga lainnya juga lebih lama. Peneliti melihat nilai kekeluargaan dan keakraban dari Nagari Pariangan pada saat mereka bertemu di Pemandian Air Panas. Sehingga, peneliti menilai bahwa pemandian air panas bukan hanya menjadi tempat mandi bagi warga lokal, melainkan telah menjadi tempat atau media komunikasi antara warga yang tinggal di Nagari Pariangan.

Selain itu, menurut buku Nagari Pariangan diketahui bahwa Nagari Pariangan memiliki 20 tapian mandi, yang terdiri dari: a) lima tapian di Jorong Pariangan; b) empat tapian di Jorong Sikaladi; c) empat tapian yang terletak di Jorong Guguak serta d) tujuh tapian mandi yang terletak di Jorong Padang Panjang. Kedua puluh tapian mandi air panas ini merupakan potensi yang sangat besar yang dapat digunakan oleh penduduk Nagari Pariangan sebagai tempat wisata bagi turis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Nagari Pariangan.

Rumah Gadang

Rumah Gadang merupakan salah satu potensi wisata yang besar di Nagari Pariangan. Rumah Gadang merupakan rumah adat minangkabau yang ada di Nagari Pariangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk atau desain dari rumah gadang terinspirasi dari bentuk kapal yang digunakan oleh Tantejo Garhano pada saat berlayar. Rumah Gadang ini biasanya dibuat dari kayu, serta memiliki beberapa bagian. Di halaman depan rumah gadang biasanya terdapat dua bangunan kecil yang bernama Rangkang yang digunakan untuk menyimpan hasil panen, seperti padi. Rumah gadangnya sendiri memiliki beberapa bagian. Adapun bagian tersebut terdiri dari: a) bagian bawah yang digunakan untuk menyimpan ternak; b) bagian tengah yang digunakan untuk tempat tinggal dari anggota keluarga serta c) bagian atap rumah yang digunakan untuk menyimpan peralatan pertanian serta untuk menyimpan hasil pertanian.

Secara fungsinya, rumah gadang ini merupakan tempat tinggal bersama dari sebuah kaum. Secara sederhana dapat dipahami bahwa keluarga yang menempati rumah gadang tersebut bukanlah berasal dari satu keluarga. Biasanya rumah gadang ini diperuntukkan untuk pasangan suami istri yang baru menikah dan belum memiliki modal yang cukup untuk membangun rumah sendiri. Maka rumah gadang ini dapat digunakan oleh mereka dengan aturan berbagi dengan keluarga lainnya. Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah kamar di dalam rumah gadang pasti lebih dari satu dan berjumlah ganjil. Lebih jauh lagi,

Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain (Wikipedia, 2018). Rumah Gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku/kaum tersebut secara turun temurun dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut (Wikipedia, 2018).

Keunikan lainnya dari rumah gadang ini yaitu letak dari kamar mandi dan dapur yang tidak menyatu dengan rumah induk. Kamar mandi dan dapur terletak terpisah dan di luar rumah induk. Hal ini dilakukan untuk menghindar rumah induk terbakar sekaligus apabila terjadi kebakaran

di dapur. Keunikan lainnya dari rumah gadang ini adalah fakta bahwa rumah gadang ini merupakan rumah yang tahan akan gempa. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa, maka arsitektur Rumah Gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang Rumah Gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau (kaso) besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi Rumah Gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga Rumah Gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa (Wikipedia, 2018).

Menurut Buku Nagari Pariangan, diketahui bahwa secara keseluruhan Nagari Pariangan memiliki 69 Rumah Gadang, yang terdiri dari: a) 27 Rumah Gadang di Jorong Pariangan; b) 9 Rumah Gadang di Jorong Sikaladi serta c) 33 Rumah Gadang di Jorong Padang Panjang. Jumlah diatas bukanlah jumlah yang sedikit tentunya, yang mana dapat menjadi potensi wisata yang menghasilkan bagi Nagari Pariangan.



Gambar 2.4. Rumah Gadang

Puncak Kawa

Selain situs bersejarah yang masih sangat kuat nilai adat istiadatnya, Nagari Pariangan juga memiliki hamparan alam yang begitu asri dan indah. Dikarenakan Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, maka Nagari Pariangan memiliki hamparan bukit yang begitu hijau, dan indah. Menurut hasil observasi, salah satu *spot* yang paling indah serta menyuguhkan pemandangan hampir seluruh daerah Nagari Pariangan adalah Puncak Kawa. Puncak ini dikenal sebagai puncak kawa, dikarenakan pendatang dapat menikmati minuman khas Nagari Pariangan yang dikenal dengan minuman kawa. Minuman kawa ini merupakan minuman sejenis kopi. Apabila kopi biasanya dibuat dari biji kopi, minuman kawa ini terbuat dari daun kopi kawa. Warung yang menjual minuman kawa ini membandrol satu porsi minuman kawa seharga Rp 5.000,- . Selain menjual minuman kawa, warung ini juga menjual makanan seperti goreng pisang yang dapat disantap bersama dengan minuman kawa. Keunikan lainnya dari minuman kawa ini adaah cara penyajiannya. Apabila kopi disajikan pada secangkir kopi, tidak begitu dengan minuman kawa. Satu porsi minuman kawa disajikan dalam sebuah batok kelapa. Sehingga penikmatnya dapat mencium bau khas dari batok kelapa pada saat meminum minuman kawa ini.



Gambar 2.5. Minuman Tradisional Kawa di Puncak Kawa



Gambar 2.6. Pemandangan dari Puncak Kawa

Desa Dinas dan Desa Adat serta Kearifan Lokal

Desa ini juga merupakan desa yang menganut dua sistem kepemimpinan yaitu desa Dinas dan desa Adat. Desa Dinas dan desa Adat saling bersinergi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sehari-hari karena selalu ada komunikasi bersama dari pemerintah desa dengan pemimpin adat untuk rencana dan kebijakan desa Nagari Pariagan. Kekerabatan yang begitu kental di Desa ini terbentuk dari kebiasaan adat-istiadat yang selalu mengutamakan kebersamaan dan musyawarah.

Kepemilikan tanah adalah harta yang termasuk dalam harta pusako tinggi, yang kepemilikannya adalah kepunyaan bersama, sehingga tidak mudah untuk memperjual-belikan tanah kepada orang asing. Harta pusako tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun oleh sebuah kaum yaitu harta yang berupa: tanah, sawah, tanah peladangan, rumah, dan sebagainya. Karena orang Minangkabau menganut sistem matrilineal maka garis keturunan mengikuti pihak ibu/ perempuan. Jadi yang berhak menerima harta pusako tinggi adalah orang-orang yang segaris keturunan atau sekaum seketurunan, sehingga harta pusako tinggi adalah harta yang dimiliki bersama. Para kaum yang telah menerima

warisan pusako tinggi, memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, serta mengolah harta pusako tinggi yang diterima secara bersama-sama. Beberapa manfaat dari harta pusako tinggi adalah: 1) untuk mempererat tali silaturahmi kaum yang sedarah, 2) agar mengenang dan menghargai nenek moyangnya melalui peninggalannya, 3) sebagai contoh untuk kaum generasi mendatang agar tetap memikirkan generasi berikutnya, 4) membantu kesejahteraan keluarga kaum.

Kewenangan untuk mengatur penggunaan harta pusako tinggi dipegang oleh kaum wanita yang tertua sedangkan *mamak* penghulu kaum membantu untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusako tinggi. Dengan pengelolaan tersebut, diharapkan pusako tinggi bermanfaat untuk seluruh anggota kaum mereka dan menjadi milik bersama.

Namun walaupun petuah adat melarang untuk menjual harta pusako tinggi, namun masih ada kearifan lain memungkinkan pusako tinggi dapat dijual yaitu kaum penerima waris ditimpa musibah sehingga membutuhkan biaya maka berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum dapat diputuskan apakah harta pusako tinggi akan dijual atau digadaikan (Zamris, Amri, Fuazan, 2004).

Masyarakat juga sangat teguh memegang tradisi dan peraturan adat karena adanya sanksi sosial yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang warga, bukanlah merupakan tanggung jawab pribadi orang tersebut namun menjadi tanggung-jawab bersama kaumnya. Kesalahan yang dibuat bukan hanya berdampak buruk bagi pribadi, namun juga bagi komunitas. Hal ini dirasa sangat positif dilakukan untuk mencegah seseorang melanggar aturan adat di Nagari Pariangan. Secara sederhana, ketika seseorang di dalam kaum melakukan kesalahan, maka yang harus membayar denda sebagai hukuman atas kesalahan adalah para kaumnya.

Selain itu, saat seseorang melakukan kesalahan maka dia akan memperoleh sanksi sosial, seperti: tidak akan adanya orang yang hadir setiap kali orang tersebut mengadakan acara, baik acara pernikahan maupun acara penting lainnya. Hukuman itu seperti sanksi sosial yang diberikan oleh Nagari Pariangan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Nilai kekeluargaan dalam menanggung kesalahan yang diperbuat oleh perorangan merupakan nilai yang baik dan dirasa efektif untuk mencegah kejahatan yang diperbuat oleh perorangan.

Namun, nilai kekeluargaan ini belum digunakan atau diaplikasikan untuk peningkatan ekonomi bersama seperti pembagian hasil potensi daerah yang dikomersialkan. Saat ini potensi yang dapat dikomersialisasikan, baik itu potensi adat, potensi kuliner, maupun potensi situs sejarah, belum dikelola secara profesional di dalam kaumnya. Mereka menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh dari potensi-potensi itu hanyalah milik perseorangan yang mengelola bukan menjadi hak milik dari kaum atau masyarakat adat. Jika kita membandingkan dengan desa-desa yang ada di Bali, hal ini sedikit berbeda. Desa-desa di Bali juga merupakan desa adat yang masih memegang nilai adat di dalam kehidupan sehari-harinya, namun mereka telah dapat mengelola potensi budaya dan adat secara bersama-sama sehingga dapat membawa keuntungan secara ekonomi kepada warganya.

Batik Dengan Naskah Kuno Nenek Moyang Minangkabau

Di Desa Nagari Pariangan yang dipercaya sebagai asal-muasal nenek moyang masyarakat Minangkabau juga ditemukan banyak catatan naskah kuno yang ditemukan di dalam surau maupun yang disimpan oleh warganya. Naskah-naskah kuno tersebut memiliki sarat makna dan filosofi tentang kehidupan masyarakat Minangkabau zaman dahulu. Pakar naskah kuno, Dr. Pramono atau filolog Universitas Andalas Padang Sumatera Barat mengatakan bahwa Desa Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak naskah kuno terkait dengan obat-obatan, sastra, sejarah serta keagamaan (Antara Sumbar, 2017).

Budayawan Minangkabau Bpk. Irwan Malin Basa, dengan jeli dapat melihat bagaimana cara kreatif untuk melestarikan naskah kuno tersebut ke dalam kehidupan masyarakat modern. Tercetuslah ide untuk menjaga naskah kuno tersebut dengan menuangkannya ke dalam motif batik sehingga naskah kuno tersebut dapat nikmati oleh berbagai generasi dan bahkan berpeluang bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Saat ini sebanyak 13 dari 25 macam motif batik khas Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penemu motif batik Pariangan, Irwan Malin Basa di Batusangkar, mengatakan bahwa motif batik dengan naskah kuno telah memiliki 13 HKI, dan sisanya sedang dalam proses untuk mendapatkan paten (Antara Sumbar, 2018).

Pewarnaan batik dengan naskah kuno ini dibuat dari bahan-bahan tumbuhan yang juga ditemukan dalam naskah kuno seperti durian, jambu biji, kulit jengkol, daun sawo, daun jati, daun pokat, daun putri malu, daun katul, mangga, mengkudu, dan beberapa tumbuhan lainnya. Untuk mendukung kegiatan membatik ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Koperidag telah mengadakan pelatihan membatik yang diikuti 30 orang peserta pelatihan yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah dari Desa Nagari Pariangan pada bulan Oktober 2017.

Dari hasil pelatihan tersebut, saat ini telah terbentuk 3 kelompok UKM kelompoknya yang masing-masing memiliki 10 orang anggota yang telah mengikuti pelatihan dibidang produksi Batik yaitu menggambar pola, mencanting, mewarnai batik. Dan saat ini, masing-masing anggota ini telah mampu memproduksi 10 helai kain batik dalam tiap bulan, sehingga masyarakat telah mampu memproduksi sekitar 100 batik tulis setiap bulannya. Kadis Koperindag Tanah Datar, Abdul Hakim mengatakan bahwa saat ini sedang diupayakan agar batik tuo Pariangan dapat dijadikan seragam untuk seluruh PNS dan pelajar yang ada di Tanah Datar (Kaba 12, 2018).



Gambar 2.7. Motif Batik yang Ditemukan Dalam Naskah Kuno

Tantangan Pengembangan Potensi Wisata

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tantangan dari pengembangan potensi wisata di Nagari Pariangan, baik hambatan secara umum, maupun secara spesifik berdasarkan jenis-jenis potensi wisata yang ada di Nagari Pariangan. Secara umum, hambatannya dapat berupa beberapa hal, yaitu: a) transportasi; b) Infrastruktur dan sumber daya anggaran serta c) sumber daya manusia. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan hambatan secara umum secara lebih terperinci.

a) Transportasi

Menurut hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa Nagari Pariangan belum memiliki moda transportasi yang memadai yang dapat digunakan oleh para pendatang saat berkunjung ke Nagari Pariangan. Satu-satunya moda transportasi yang terdapat di Nagari Pariangan adalah Ojek. Lebih jauh lagi, jumlah ojek disanapun masih sangat terbatas. Sehingga dikhawatirkan jumlah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan yang banyak dari pendatang. Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat belum adanya tindakan dari pemerintah Nagari Pariangan untuk mendorong warga desanya agar berpartisipasi untuk menyediakan moda transportasi lainnya agar dapat digunakan untuk disewakan kepada pendatang, baik itu moda transportasi dalam bentuk mobil, ataupun motor. Selama ini, moda transportasi yang digunakan oleh pendatang atau para turis di Nagari Pariangan merupakan kendaraan yang sudah di *booking* dari kota.

b) Retribusi Objek Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu hal penting yang masih belum tersedia di Nagari Pariangan agar mendukung terciptanya pemasukan desa wisata adalah tempat parkir serta gerbang *ticketting* untuk para pendatang. Karena tidak adanya kedua infrastruktur diatas, maka pemerintah Nagari Pariangan tidak dapat mengontrol siapa saja yang masuk ke Nagari Pariangan untuk tujuan wisata. Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah pengunjung Nagari Pariangan sebenarnya semakin meningkat dari tahun ke tahun semenjak desa tersebut dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia. Namun, sayangnya banyaknya pendatang yang datang ke Nagari Pariangan, tidak diikuti dengan Pendapat Asli Daerah. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Irwan Malin Basa pada saat acara Launching dan Ekspose Kegiatan

Kampung Literasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, diketahui bahwa pada tahun ini saja Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Nagari Pariangan belum signifikan, mengingat bahwa Nagari Pariangan memiliki potensi tempat wisata yang sangat banyak dan beragam. Jika dibandingkan dengan desa wisata lainnya, seperti Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tentunya Nagari Pariangan masih sangat tertinggal dalam aspek PAD yang dihasilkan dari objek wisata. Secara spesifik, Desa Ponggok yang bergantung dengan Objek Wisata Umbul Ponggok ini saja mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 6,5 miliar per tahun, dari yang awalnya hanya Rp 5 juta per tahun.

Salah satu penyebab rendahnya PAD Nagari Pariangan meskipun potensi wisatanya sangat banyak adalah tidak adanya infrastruktur berupa gerbang untuk mengontrol *ticketting* serta tempat parkir untuk para pendatang. Sehingga pengunjung yang datang ke Nagari Pariangan akan masuk begitu saja tanpa dikenai biaya retribusi untuk setiap tempat wisatanya di Nagari Pariangan.

c) Tanah Ulayat

Sulitnya ketersediaan infrastruktur maupun pembukaan tempat wisata di Nagari Pariangan juga erat kaitannya dengan permasalahan pembebasan lahan di Nagari Pariangan. Proses pembebasan lahan di Nagari pariangan lebih sulit prosesnya daripada pembebasan lahan tanah biasanya. Hal ini disebabkan oleh status tanah di Nagari Pariangan yang merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Karena Nagari Pariangan masih sangat memegang nilai-nilai adat Minangkabau di dalam kehidupannya sehari-sehari, maka persoalan kepemilikan tanahpun mengikuti aturan adat disana. Sehingga tanah di Nagari Pariangan tidaklah berstatus perseorangan untuk urusan terkait kepemilikannya. Lebih lanjut lagi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Menurut hukum online, diketahui bahwa Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban bagi suatu masyarakat hukum ada terkait dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayahnya tinggal. Jika kita merujuk kepada peraturan atau Undang-Undang, maka UU No 5 Tahun 1960 serta UU Pokok Agraria telah mengakui adanya Hak Ulayat tersebut. Jadi, jika ingin membangun infrastruktur baik berupa jalan, *homestay* ataupun pembukaan wahana untuk wisata, pemerintah tidak bisa hanya mengurus pembebasan lahan kepada perseorangan, namun juga harus

mengurus pembebasan lahan kepada kaum atau kumpulan warga masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Selain itu, menurut Buku Nagari Pariangan, diketahui bahwa Nagari Pariangan memiliki 271 tanah ulayat, yang terdiri dari: a) 39 Tanah Ulayat di Jorong Guguak; b) 74 Tanah Ulayat di Jorong Pariangan; c) 47 Tanah Ulayat di Jorong Padang Panjang serta d) 111 Tanah Ulayat di Jorong Sikaladi.

Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa sebenarnya sejak tahun 2016, Presiden Jokowi telah menjanjikan bantuan dana sebesar 200 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (PUPR) untuk mendukung proses Nagari Pariangan menjadi desa wisata. Uang tersebut dapat digunakan untuk proses revitalisasi dan renovasi berbagai situs sejarah, rumah gadang, maupun pembangunan wahana wisata tertentu. Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa apabila desa menggunakan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan wisata, maka terdapat syarat bahwa tanah desa tersebut harus dihibahkan kepada pemerintah desa. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai dari Hak Ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat Nagari Pariangan. Lebih lanjut, diketahui juga bahwa tanah ulayat di Nagari Pariangan ini tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain, mengingat bahwa tanah tersebut bukanlah hak pribadi namun hak dari kaum atau sekumpulan masyarakat adat. Sehingga tanah tersebut akan diwariskan turun temurun ke generasi dari kaum atau masyarakat adat tersebut. Sehingga akan sulit untuk membuat masyarakat adat Nagari Pariangan untuk menghibahkan tanah ulayatnya kepada pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Pemerintah Desa, melalui Wali Nagari yaitu Pak April Khatib sebenarnya telah melakukan beberapa usaha untuk bernegosiasi dengan masyarakat desa agar memberi ijin pembangunan berbagai infrastruktur ataupun wahana wisata di atas tanah ulayatnya. Sejauh ini, dari total 25 tempat wisata yang ada di Nagari Pariangan, pemerintah desa telah berhasil melakukan negosiasi untuk memperoleh pembebasan tanah dari masyarakat dan memperoleh ijin untuk pembangunan di atas tanah ulayat. Dengan kesepakatan bahwa setelah nantinya proses pembangunan situs-situs wisata di atas tanah ulayat tersebut selesai dilakukan, maka kaum atau masyarakat adat yang memiliki tanah tersebutlah yang diberi kewenangan untuk mengelola objek wisata tersebut. Selain itu, kesepakatan antara kedua belah pihak juga telah dicapai melalui penentuan bagi hasil pendapatan objek wisata antara masyarakat adat desa pemilik tanah dan pemerintah desa. Namun, permasalahan pembebasan tanah di Nagari

Pariangan tidak bisa selesai dengan adanya persetujuan pembangunan di atas tanah ulayat oleh masyarakat. Saat persetujuan pembangunan telah diperoleh oleh Wali Nagari dan diserahkan kepada Kementerian, namun persetujuan itu tetap ditolak dan pencairan dana juga tidak bisa dilakukan. Karena Pemerintah Pusat meminta agar masyarakat adat desa mau menandatangani dan menyetujui bahwa tanah ulayat tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah karena pembangunan yang nantinya dilakukan akan menggunakan dan pemerintah pusat. Masyarakat adat desa tidak mau untuk menghibahkan tanah ulayat, karena mereka menganggap bahwa tanah ulayat tetap tidak bisa dipindah namakan kepemilikannya. Maka dengan adanya hambatan untuk memperoleh dana pembangunan desa wisata dari Pemerintah desa terkait pembebasan tanah, Pemerintah Desa dirasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, diluar dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memperoleh dukungan dana lainnya terkait pembangunan desa wisata. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa sejauh ini, Pemerintah Desa melalui wali nagari telah melakukan beberapa kerjasama dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai pihak swasta, seperti: Pertamina, Semen Padang dan Bank Indonesia (BI). Kerjasama dengan pihak ketiga ini diharap dapat mendatangkan sumber dana lainnya yang layak dan dapat digunakan secara maksimal oleh Nagari Pariangan untuk pembangunan desa wisatanya.

d) Penginapan dan Infrastruktur lainnya

Selain tempat parkir dan gerbang *ticketting*, infrastruktur lainnya yang masih belum tersedia dan masih harus diperbaharui seperti: toilet, penginapan atau *homestay* dan rumah makan. Menurut hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa ketersediaan ketiga hal diatas masihlah sangat minim di Nagari Pariangan. Penginapan atau *homestay* yang dinilai pantas dan memadai di desa ini bahkan belum mencapai sepuluh rumah. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena tidak maksimalnya pemanfaatan rumah gadang oleh Desa yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dialihfungsikan sebagai penginapan bagi pendatang dan pengunjung. Lebih jauh lagi, banyak sekali Rumah Gadang disana yang sudah rusak dikarenakan sudah tidak ditempati dan tidak diurus dengan baik oleh penduduk desa. Sehingga potensi rumah gadang sebagai tempat penginapan yang kaya akan nilai adatnya ini pula tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa sebagai sumber pendapatan.

Saat ini masyarakat belum melihat potensi Desa mereka sebagai Desa Wisata yang dapat mendatangkan pemasukan bagi penduduk dan pemerintah desa. Karena itu masyarakat belum bergerak untuk terjun langsung untuk menggarap peluang-peluang ekonomi yang ada seperti penginapan, rumah makan, kafe, toilet, souvenir dan jajanan tradisional.

Apabila sebuah desa ingin berubah fungsi menjadi desa wisata tentunya tidak bisa hanya mengandalkan potensi wisatanya saja, melainkan harus didukung oleh berbagai aspek pendukung keberhasilannya. Salah satunya infrastruktur terkait rumah makan. Rumah makan menjadi salah satu aspek terpenting yang seharusnya tersedia di sebuah desa wisata. Hal ini perlu dipenuhi mengingat bahwa makan merupakan salah satu kebutuhan utama dari seorang manusia. Tentunya, pengunjung akan merasa nyaman ketika datang ke sebuah tempat wisata yang sangat indah, namun juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang membuatnya nyaman untuk berkunjung lama di tempat tersebut. Secara sederhana, ketika pengunjung lelah mengunjungi berbagai tempat wisata di sebuah desa, mereka akan mencari tempat makan untuk mengisi perut mereka yang lapar. Sedangkan, sejauh ini Nagari Pariangan tidak memiliki rumah makan yang cukup layak untuk para pengunjung. Sehingga apabila pengunjung merasa lapar dan ingin mencari rumah makan, mereka harus pergi ke luar daerah Nagari Pariangan. Hal itu tentunya menjadi sebuah ketidaknyamanan bagi para pengunjung yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur di Nagari Pariangan.

Infrastruktur lainnya yang masih harus diperbaiki serta dipenuhi oleh Pemerintah Desa Nagari Pariangan adalah tempat sampah. Menurut hasil observasi, Nagari Pariangan ini belum memiliki tempat sampah yang memadai dan tersebar merata di sudut-sudut pedesaan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan, mengingat bahwa adanya potensi yang sangat besar desa ini dikunjungi oleh banyak pengunjung yang pasti membutuhkan tempat sampah untuk mereka membuang sampah yang mereka punya. Jika mereka media tempat sampah saja tidak tersedia, maka hal itu dapat menjadi penyebab utama pengunjung membuang sampah sembarangan. Hal itu apabila dibiarkan terus menerus akan menjadi bencana yang sangat besar bagi Nagari Pariangan. Desa ini akan menjadi kotor dan mungkin bisa menyebabkan bencana yang lebih besar seperti banjir. Sehingga, tempat sampah merupakan salah satu infrastruktur yang harus dipenuhi oleh Nagari Pariangan untuk mengantisipasi bencana yang lebih besar akibat perbuatan membuang sampah sembarangan oleh para pengunjung.

e) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan desa wisata. Begitu pula dengan Nagari Pariangan. Selama masa observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan temuan bahwa aspek sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang juga masih perlu ditingkatkan kemampuannya oleh pemerintah Nagari Pariangan agar desa ini benar-benar siap untuk menjadi desa wisata nantinya. Salah satu permasalahan terkait aspek sumber daya manusia adalah kurangnya kapasitas *tour guide* atau pemandu wisata di Nagari Pariangan. Sejauh ini, Nagari Pariangan hanya memiliki dua orang pemandu wisata yang sudah dilatih dan mengerti sejarah Nagari Pariangan seutuhnya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa bahkan kedua orang ini pun tidak dibekali dengan kemampuan Bahasa Inggris yang memadai. Kemampuan Bahasa Inggris dilihat penting mengingat bahwa besar kemungkinan bahwa pengunjung yang datang bukan hanya dari dalam negeri, namun juga berasal dari luar negeri. Menurut informasi yang disampaikan oleh salah satu ketua komunitas, Pak Irwan, diketahui bahwa pada Tahun 2019 akan terdapat 800.000 orang Timur Tengah yang akan datang berkunjung ke Nagari Pariangan. Informasi ini diperoleh oleh Pak Irwan saat beliau menghadiri Kongres Pariwisata yang diadakan di Jakarta tahun ini. Lebih lanjut, Pemerintah Desa Nagari Pariangan sebenarnya memang sudah melakukan beberapa usaha untuk mempersiapkan daerahnya ketika turis dari Timur Tengah nantinya datang. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Nagari Pariangan adalah kerjasama dengan Kementerian Agama terkait dengan tenaga pengajar Bahasa Arab untuk warga di Nagari Pariangan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa orang-orang Ttimur Tengah atau orang Arab lebih senang berkomunikasi dengan bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Maka Nagari Pariangan mempersiapkan agar warganya memiliki kemampuan Bahasa Arab yang memadai. Selain itu, Nagari Pariangan juga telah berusaha untuk melabeli nama-nama tempat wisata atau petunjuk-petunjuk arah di sepanjang desa bukan hanya dengan bahasa Indonesia, namun juga dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Hal ini merupakan langkah yang sangat besar untuk mempersiapkan sumber daya manusianya menyambut berbagai turis yang datang dari mancanegara. Namun, kemampuan bahasa inggris seharusnya menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki baik oleh warga adat Nagari Pariangan maupun bagi *tour guide* disana. Mengingat bahwa Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, kemungkinan turis yang

akan berkunjung bukan hanya dari Timur Tengah melainkan dari berbagai daerah mancanegara lainnya. Selain itu, jumlah pemandu wisata juga perlu untuk ditingkatkan. Secara sederhana, 2 orang *tour guide* tidak mungkin bisa *handle* jumlah pengunjung yang sudah mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Maka Nagari Pariangan perlu melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan jumlah pemandu wisata yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris maupun Arab, serta memiliki wawasan sejarah yang banyak terkait Nagari Pariangan.

Permasalahan lainnya terkait dengan Sumber Daya Manusia adalah ketidaksiapan warga sekitar untuk berkontribusi dalam desa wisata. Ketidaksiapan ini sebenarnya lebih kepada ketidaksiapan secara pola pikir dan perilaku. Masyarakat adat yang terbiasa hidup dengan nilai-nilai adat yang mengajarkan mereka untuk hidup sederhana, tidak memiliki kemampuan untuk mengkomersilkan atau memperjualbelikan potensi yang ada di desa. Beberapa contoh potensi desa seperti: randai, silat, alat musik saluang dan bansi, tari piring, tidak dilihat sebagai potensi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi desa. Potensi-potensi ini belum digarap secara maksimal, sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi warga. Selain itu, situs sejarah yang ada di Nagari Pariangan yang pada dasarnya merupakan milik bersama, yaitu milik kaum atau warga adat, juga tidak dilihat potensinya sebagai pendapatan bagi warga. Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa mereka tidak merisaukan uang dari pengunjung yang berkunjung ke situs sejarah itu akan diberikan kepada siapa. Biasanya uang yang diperoleh dari pengunjung hanya akan dinikmati oleh perorangan, bukan untuk kaum atau warga adat yang memiliki hak kepemilikan atas situs sejarah tersebut. Hal ini sudah menjadi nilai adat yang dimiliki oleh Nagari Pariangan.

Karena pola pikir masyarakat yang tidak berorientasi kepada bisnis ini pulalah, maka perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat adapun masih belum siap untuk menjadi masyarakat yang tinggal di desa wisata. Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat Nagari Pariangan masih belum siap menghadapi turis atau pendatang yang berkunjung ke Nagari Pariangan. Mereka masih harus dilatih untuk bersikap ramah kepada pengunjung, seperti tersenyum kepada pengunjung. Sehingga dapat membuat pengunjung nyaman untuk berkunjung lama di Nagari Pariangan.

B.2. Catatan Khusus untuk Pengembangan Potensi Wisata

Pada sub bab ini, akan dipaparkan hambatan yang dihadapi oleh Nagari Pariangan secara lebih spesifik berdasarkan potensi tempat wisata yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun hambatan berdasarkan potensi tempat wisata dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini:

Situs Sejarah (Kuburan Panjang, Balai Saruang, Balai Katiak, dan lain-lain)

Sebagaimana deskripsi yang telah disampaikan sebelumnya, diketahui bahwa Nagari Pariangan memang daerah yang memiliki banyak sekali potensi tempat wisata yang berupa situs sejarah. Hal ini dipengaruhi oleh sistem adat istiadat Minangkabau yang masih dipegang erat dalam kehidupan sehari-hari warga Nagari Pariangan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi sistem kehidupan sehari-hari, namun juga mempengaruhi bentuk-bentuk tempat pertemuan yang ada di Nagari Pariangan, seperti Balai Saruang yang berfungsi sebagai Mahkamah Agungnya Nagari Pariangan. Sayangnya, banyaknya situs sejarah yang dapat menjadi tujuan wisata ini tidak berbanding lurus dengan pendapatan Nagari Pariangan yang diperoleh dari situs sejarah. Selain belum adanya sistem *ticketting* yang jelas pada setiap situs sejarahnya, namun Nagari Pariangan masih memiliki hambatan terkait memasarkan produk atau potensi yang mereka punya. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sejarah dan cerita unik di balik sebuah situs sejarah yang ada, belum dibungkus dengan cara yang menarik oleh Pemerintah Nagari Pariangan. Sebagai contoh, situs sejarah kuburan panjang, hanya ditampilkan dalam bentuk sesederhana mungkin, tanpa ada alat-alat peraga yang menarik perhatian pengunjung. Saat peneliti berkunjung kesana, memang ada satu papan yang bertuliskan cerita asal muasal atau sejarah dibalik kuburan panjang ini. Namun visualisasi papan cerita inipun terlalu sederhana dan tidak menarik perhatian para pengunjung.



Gambar 2.8. Papan Informasi Kuburan Panjang

Pengunjung yang hanya berkunjung ke situs sejarah tanpa didampingi oleh seorang *tour guide* yang mampu menceritakan sejarah dibalik situs sejarah tersebut, sudah dapat dipastikan tidak akan mampu memperoleh nilai dibalik perjalanannya. Keabsenan alat peraga, papan cerita yang menarik menjadi salah satu aspek yang harus dibenahi oleh Nagari Pariangan. Apabila pemerintah Nagari Pariangan mampu membungkus cerita atau sejarah dibalik situs sejarah yang ada dengan cara yang unik, kekinian dan kreatif, tentunya hal ini mampu menaikkan nilai jual dari sebuah produk.

Pemandian Air Panas

Salah satu aspek yang harus diperbaiki oleh Nagari Pariangan terkait Pemandian air panas adalah kebersihan dari tempat pemandian air panas tersebut. Secara sumber daya alamnya, Nagari Pariangan telah

memiliki potensi yang sangat besar dan unik, yaitu aliran air panas yang berada di antara aliran-aliran air dingin di lereng gunung. Namun, tempat pemandiannya masih tidak rapi dan kotor. Pengunjung tentunya ingin mandi dan menikmati pemandian air panas di tempat yang bersih, higienis dan nyaman untuk digunakan. Menurut hasil observasi yang dilakukan, tempat pemandian air panasnya tidak begitu bersih, dan masih dapat ditemui tumpukan lumut di dinding-dinding ataupun lantai tempat pemandian air panas. Sehingga tempat pemandiannya pun terkesan kotor dan licin. Selain itu, Tempat pemandian air panas ini juga tidak dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan baju atau barang yang dimiliki oleh pengunjung. Sehingga apabila pengunjung membawa baju bersih untuk ia gunakan saat setelah mandi, pengunjung hanya bisa meletakkan bajunya ditempat yang kira-kira bersih disekitar pancuran air panas, yang tentunya tidak menjamin tempat tersebut bersih dan tidak basah. Maka dari itu, perlu adanya penambahan tempat penyimpanan seperti loker, agar para pengunjung dapat menyimpan barang bawaannya di tempat yang aman dan bersih.

Kekurangan lainnya dari tempat pemandian air panas ini yaitu masih bergabungnya pemandian air panas untuk pengunjung dengan warga lokal. Hal ini tentunya akan membuat pengunjung yang baru pertama kali datang ke pemandian air panas akan merasa canggung dan tidak nyaman jika harus bergabung dengan warga lokal. Menurut hasil observasi, diketahui bahwa warga lokal juga mencuci baju di waktu yang sama saat mereka mandi di pemandian air panas. Sehingga tempat pemandian air panas itu dipenuhi dengan busa detergen pencuci baju warga lokal. Hal tersebut mungkin menjadi sebuah nilai negatif di mata pengunjung. Karena membuat mereka tidak nyaman untuk berlama-lama menikmati air panas disana. Maka dari itu, apabila pemandian air panas ini memang ingin dikomersialisasikan dalam cakupan yang lebih luas, perlu adanya pemisahan antara pemandian air panas bagi pengunjung dan warga lokal. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kenyamanan bukan hanya bagi para pengunjung, namun juga bagi warga lokal itu sendiri.

Rumah Gadang

Potensi rumah gadang yang banyak di Nagari Pariangan tidak didukung oleh keadaan dan kondisi rumah gadang yang memadai. Berdasarkan hasil observasi, kondisi rumah gadang disana banyak yang sudah tidak terurus dengan baik. Hal ini disebabkan karena rumah gadang tersebut sudah

jarang digunakan oleh pemiliknya. Sehingga banyak kayu yang ada di rumah gadang tersebut lapuk. Keadaan rumah gadangnya pun sangat kotor dan berdebu. Maka dari itu, perlu adanya revitalisasi atau renovasi Rumah Gadang tersebut agar dapat dialihfungsikan menjadi penginapan ataupun situs sejarah rumah gadang yang dapat menghasilkan pendapatan bagi warga Nagari Pariangan.

C. Peluang Potensi Wisata

Selain hambatan yang dimiliki oleh Nagari Pariangan, desa ini juga memiliki berbagai peluang yang dapat mendorong terciptanya desa wisata Nagari Pariangan. Adapun peluang tersebut adalah sebagai berikut:

Kerjasama

Sejauh ini pemerintah Nagari Pariangan telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa pihak, baik dengan pemerintah pusat, swasta maupun universitas. Pada September, 2018, Pemerintah Nagari Pariangan telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang terkait dengan pembinaan dan pendampingan Nagari Pariangan sebagai desa wisata. Selain itu, Nagari Pariangan juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan untuk memberi pelatihan pembuatan batik dan pelatihan pembuatan kotak untuk *packaging* atau kemasan batik yang diproduksi nantinya. Adapun yang menjadi sasaran dari pelatihan ini adalah para ibu-ibu di Nagari Pariangan yang tergabung dalam persatuan Bundo Kandung. Namun sejauh ini kelompok pengrajin batik minangkabau yang terbentuk setelah pelatihan hanya 4 kelompok. Dari empat kelompok tersebut, yang aktif hanya tiga, yang terdiri dari: 2 kelompok di Jorong Pariangan dan 1 kelompok di Jorong Padang Panjang. Informasi dan deskripsi lebih lanjut terkait potensi batik ini nanti akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Kerjasama lainnya adalah dengan pihak swasta yaitu Pertamina. Kerjasama ini bertujuan untuk mendanai Nagari Pariangan dalam membangun sentra batik berupa *showroom* batik di Nagari Pariangan. Adapun dana yang nantinya akan diberikan oleh Pertamina adalah sebesar 600 juta. Selain itu, Nagari Pariangan juga telah bekerjasama untuk memperoleh berbagai dukungan dana dari pihak swasta lainnya, seperti: Bank Indonesia, dan Semen Padang.

Anggaran

Diluar permasalahan terhambatnya dana dari Pemerintah Pusat akibat permasalahan tanah ulayat yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya dari segi anggaran Nagari Pariangan sudah cukup siap apabila digunakan untuk perbaikan hal-hal yang tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tanpa syarat pembebasan lahan adalah 700 juta yang diperuntukkan untuk empat jorong di Nagari Pariangan. Selain itu, Dana yang diperoleh dari Kabupaten adalah sekitar 800 juta. Selain itu, jika dilihat dari Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, diketahui bahwa alokasi terbesar yang dianggarkan oleh Nagari Pariangan untuk 2 Tahun belakangan ini adalah untuk irigasi, jalan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih jauh lagi, program pemberdayaan masyarakatpun diperuntukkan untuk pelatihan pembuatan cinderamata atau *souvenir*, baju khas Nagari Paringan dan batik. Jika melihat bagaimana Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa mereka sebenarnya telah mengerti prioritas kebutuhan desa mereka. Lebih lanjut lagi, mereka telah mengalokasikan anggaran yang mendukung proses pembagunan desa menuju desa wisata. Selain itu, kegiatan lainnya terkait dengan desa wisata adalah kegiatan studi banding ke berbagai tempat wisata di Indonesia, juga telah dianggarkan oleh Pemerintah Desa Nagari Pariangan. Salah satu contohnya adalah Studi Banding ke Pemandian Air Panas di Cipanas yang akan dilakukan Tahun 2019.

Makanan dan Minuman Khas Daerah

Selain situs sejarah dan hamparan alam yang begitu Indah, Nagari Pariangan juga memiliki kearifan lokal berupa makanan dan minuman khas daerah. Makanan khas daerah Nagari Pariangan adalah Kerupuk Bunga Durian yang terbuat dari Tepung Beras. Cita rasa dari Keripik inipun berbeda dari keripik-keripik pada umumnya yang ada di Indonesia maupun di Padang. Jika Sumatera Barat selama ini dikenal dengan Sanjainya sebagai Makanan Khas, maka Keripik Bunga Durian inipun bisa menjadi *icon* utama dan khas asli Nagari Pariangan. Keripik Bunga Durian ini memiliki rasa yang gurih, namun tidak terlalu asin. Keripiknya juga sangat renyah sehingga cocok untuk dijadikan salah satu oleh-oleh asal Nagari Pariangan. Selain makanan khas, Nagari Pariangan juga memiliki minuman khas yang dikenal dengan minuman kawa. Minuman kawa ini sejenis kopi. Jika kopi terbuat dari biji pohon kopi, maka minuman ini terbuat dari daun pohon kopi kawa.

Selain rasanya yang unik, penyajian minuman kawa inipun sangat unik. Minuman kawa ini disajikan pada sebuah batok kelapa. Sehingga aroma yang keluar pada minuman itu bukan hanya aroma khas kopi, namun juga berpadu dengan aroma batok kelapa yang khas. Makanan dan minuman khas ini dapat menjadi potensi yang sangat besar bagi Nagari Pariangan. Karena minuman dan makanan ini memiliki nilai yang sangat unik dan masih jarang ditemukan di daerah lainnya. Nagari Pariangan memiliki kuliner yang Khas yang dapat dinikmati oleh masyarakat diantaranya adalah :Lamang, Lapek Atun, Nasi Lamak Kuniang, Lapek Bugih, Singgang Ayam, Limpiang Ampok, Pinyaram, Nasi Lamak, Wajik, Dengkek, Sagun, Rakik Maco Daun Kunik, Randang, Bika, Kalio dan Bareh Ampiang.

Namun di sisi lain, potensi minuman dan makanan khas ini belum terlalu bisa menghasilkan pendapatan yang berarti bagi warga Nagari Pariangan. Hal ini dikarenakan belum ada langkah pemasaran yang kreatif pada makanan dan minuman khas tersebut. Menurut hasil observasi, Keripik Bunga Durian ini bahkan tidak dijual secara resmi di warung-warung sebagai oleh-oleh khas daerah. Keripik Bunga Durian ini dijual hanya berdasarkan informasi dari pemandu wisata dan skala penjualannya pun masih skala rumahan yang hanya akan diproduksi jika ada permintaan dari pengunjung. Keripik Bunga Durian ini belum diproduksi secara massal untuk sengaja dijual sebagai oleh-oleh khas Nagari Pariangan. Selain itu, kemasan dari keripik bunga durian inipun tidak kreatif. Keripik Bunga Durian ini hanya dibungkus dalam sebuah plastik bening tanpa merk atau label yang jelas. Hal inipun terjadi pada minuman khas Nagari Pariangan, yaitu Minuman Kawa. Minuman yang sebenarnya sudah memiliki cerita pembuatan yang unik dan tidak biasa, yaitu terbuat dari daun kopi kawa, dan disajikan pada sebuah batok kelapa ini juga tidak bisa menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi masyarakat Nagari Pariangan. Menurut hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa minuman kawa ini bahkan tidak dijual dalam produksi yang bisa dibawa pulang oleh pengunjung. Minuman kawa ini hanya bisa diseduh di tempatnya langsung, dengan harga yang juga dinilai sangat murah. Minuman khas ini sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar bagi Nagari Pariangan. Seharusnya banyak inovasi yang bisa muncul dari minuman ini. Sebagai contoh, masyarakat bisa menjual produk minuman kawa ini dalam produk yang ditujukan sebagai oleh-oleh atau buah tangan bagi pengunjung. Sehingga minuman ini mungkin nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk cair yang dapat langsung disantap, namun bisa dimodifikasi dalam bentuk

serbuk minuman kawa yang nantinya bisa diseduh sendiri oleh pengunjung saat pulang ke rumah. Modifikasi lainnya yang mungkin bisa dilakukan oleh warga Nagari Pariangan yaitu membuat produk minuman kawa dalam kemasan botolan.

D.Kesimpulan

1. Nagari Tuo Pariangan dinyatakan secara obyektif oleh media American Budget Traveler sebagai salah satu dari desa yang terindah di dunia dengan mengacu pada faktor-faktor berupa budaya, keadaan alam serta adat istiadat yang masih dipegang erat dalam kehidupan sehari-hari penduduknya.
2. Berdasarkan penelitian secara langsung, dapat disimpulkan bahwa potensi wisata Nagari Tuo Pariangan jangkauannya cukup luas, di antaranya adalah posisi yang berada di kaki gunung Marapi, pemandangan alam yang indah, sejarah sebagai tempat asal muasal budaya Minangkabau (berdasarkan fakta yang didapatkan dari wawancara dengan pemandu wisata, yang mengunjungi Nagari Tuo Pariangan dengan menjadikan sejarah tersebut sebagai bagian paket wisata Sumatera Barat), tempat-tempat bersejarah yang mendukung hal tersebut, tempat-tempat khas bernafaskan budaya Minangkabau, kesenian tradisional, tempat kunjungan religius bernafaskan agama Islam, makanan dan minuman tradisional, pemandian air panas, serta nilai adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini.
3. Nagari Tuo Pariangan juga memiliki potensi ekonomi selain pariwisata berupa pertanian dan hasil alam lain seperti buah-buahan, serta kerajinan Batik dengan corak khas Minangkabau yang didasarkan pada dokumen-dokumen bersejarah, dimana Batik ini dikembangkan dengan inisiatif tokoh masyarakat Nagari Tuo Pariangan yang bekerja sama dengan pemerintah Nagari.
4. Pengenalan akan salah satu desa terindah dunia sangat dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah Nagari, tetapi pengenalan berkembang dan jumlah wisatawan yang bertambah ternyata tidak memberikan kontribusi yang berarti akan peningkatan taraf hidup masyarakat.
5. Terdapat beberapa hambatan yang menjadi penyebab tidak bertambahnya pendapatan dari bidang pariwisata di Nagari Tuo

Pariangan, diantaranya adalah kurangnya armada serta infrastruktur transportasi yang memadai, kurangnya perawatan akan situs-situs sejarah dan budaya yang memiliki nilai jual tinggi, serta kurangnya fasilitas pendukung pariwisata yang memadai untuk tercapainya kualitas pengalaman yang baik untuk turis baik domestik maupun internasional. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya sudut pandang masyarakat yang sederhana dan kekuatan adat istiadat yang menyebabkan ketidaksadaran masyarakat akan tingginya potensi-potensi wisata tersebut.

6. Potensi pendapatan wisata Nagari Tuo Pariangan menjadi rendah karena banyak turis yang datang bukan untuk mengunjungi tempat ini secara khusus, tetapi sebagai bagian dari paket wisata yang lebih besar, di mana tempat ini masih dikunjungi secara gratis.
7. Sudut pandang masyarakat yang sederhana menyebabkan tidak banyaknya inisiatif dari masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas tempat-tempat kunjungan wisata dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendatangkan pendapatan tinggi, termasuk kebersihan, keindahan, perawatan, fasilitas tambahan serta nilai komersilnya. Sudut pandang ini juga menyebabkan tidak adanya kegiatan perdagangan hasil pertanian dan hasil alam lain yang dikhususkan. Dengan kata lain, masyarakat hanya melakukan kegiatan agraris untuk kepentingan pribadi, dimana sisanya saja yang akan dijual.
8. Bantuan pemerintah sudah disampaikan tetapi menjadi tidak efektif karena adanya penolakan berdasarkan adat istiadat terhadap hibah tanah. Hal kepemilikan tanah dalam adat istiadat Nagari Tuo Pariangan sangat kuat dan dipertahankan secara turun temurun.
9. Banyak persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan tamu asing dari Timur Tengah termasuk pendidikan bahasa Arab, promosi sebagai desa literatur, serta papan-papan yang menggunakan tulisan Arab. Hanya saja, kegiatan ini lebih banyak ditekankan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
10. Batik yang sedang dipromosikan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat Irwan Malin Basa, merupakan produk yang punya potensi tinggi, tetapi proses pengerjaannya masih menggunakan biaya yang tinggi karena ada bahan baku kain yang tidak berasal dari daerah Nagari Tuo Pariangan sendiri.

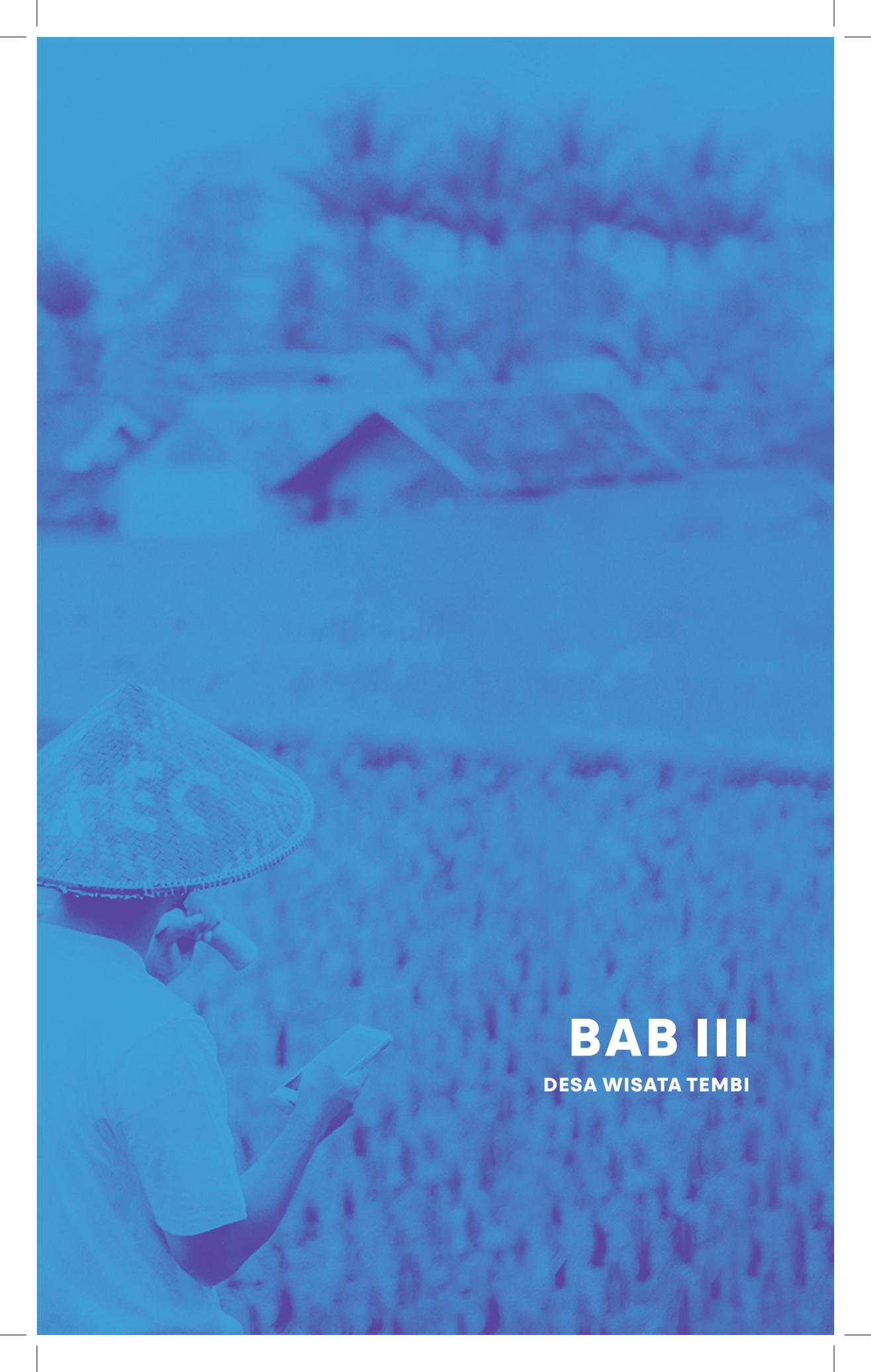
11. Terdapat produk-produk kuliner seperti Minuman Kawa dan Keripik Bunga Durian yang memiliki potensi sebagai jajan khas Nagari Tuo Pariangan. Kekurangannya adalah tidak banyaknya rumah makan yang tersedia untuk menyambut tamu wisatawan dengan jumlah yang banyak.
12. Transportasi seperti ojek dan travel tidak terorganisir dengan baik, serta jarangya fasilitas penginapan seperti homestay yang memadai.

E. Saran

1. Pembangunan gerbang masuk Nagari Tuo Pariangan yang dilengkapi dengan tempat pembelian tiket serta lahan parkir dan rumah makan atau food court yang memastikan adanya pemasukan bagi desa. Tiket yang dibeli sebaiknya disertai dengan secangkir minuman Kawa dan sedikit Keripik Bunga Durian. Hal ini akan mencegah banyaknya kunjungan gratis yang merupakan bagian dari paket wisata yang lebih luas
2. Kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta dalam hal pembangunan dengan adanya perjanjian khusus yang akan memungkinkan bukan hanya pengembangan fasilitas tetapi juga kepemilikan properti oleh masyarakat, dimana nantinya, setiap fasilitas akan ditangani oleh pemilik properti. Hal ini harus dijamin kualitasnya dengan adanya pelatihan dan klausa dalam perjanjian yang menetapkan standar penanganan fasilitas oleh pemilik itu sendiri.
3. Pencatatan keperluan fasilitas dan sumber daya manusia untuk setiap tempat wisata termasuk pengembangan fasilitas untuk menambah *gimmick* dan pelatihan keterampilan khusus untuk penanganannya (selain bahasa Inggris dan Arab untuk para pemandu wisata) yang akan meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan.
4. Penggunaan konsep bercerita untuk urutan kunjungan ke tempat-tempat yang ada, terutama karena pengenalan akan asal-usul Minangkabau lebih menarik ketika diceritakan. Hal ini bisa saja dipadukan dengan paket-paket yang dikategorikan misalnya paket menginap untuk mengenal kehidupan sehari-hari masyarakat, paket petualangan Gunung Marapi dan paket pertunjukan seni.
5. Penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan potensi wisata dan potensi ekonomi lainnya dalam meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para penduduk yang sebelumnya merantau untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas, disamping pemerintah desa yang diwakili Bapak Wali Nagari dan tokoh masyarakat seperti Bapak Irwan Malin Basa. Hal ini, dengan disertai bantuan pemerintah, akan dapat juga mendorong kelancaran kegiatan ekonomi lain seperti pertanian, kuliner dan pembuatan Batik.

6. Pendekatan *business to business* juga dapat dilakukan untuk meningkatkan *awareness* wisatawan, yaitu dengan menghubungi atau mencari rumah produksi yang tertarik menggunakan Nagari Tuo Pariangan sebagai latar belakang atau lokasi syuting untuk film-film atau iklan produksi mereka. Hal ini akan meningkatkan keingintahuan penonton dan keinginan mereka untuk berkunjung, terutama ketika film-film dan iklan-iklan tersebut memiliki penonton yang banyak.
7. Pendirian homestay serta rumah makan yang disertai penyuluhan akan peningkatan potensi ekonomi serta penetapan standar kualitas. Penetapan standar kualitas ini berlaku juga untuk semua fasilitas wisata yang lain.
8. Pendekatan terhadap para pemimpin adat termasuk juga kegiatan studi banding yang dilakukan bersama-sama dengan para pemimpin adat tersebut, yang diharapkan akan membuka pengertian akan potensi wisata ini.



BAB III

DESA WISATA TEMBI

BAB III

DESA WISATA TEMBI

PERJUANGAN KOMUNITAS MANDIRI DI TENGAH

KETERBATASAN POTENSI

Trisno Sakti Herwanto^a, Daniel Hermawan^b, William Tandi Wijaya^c

A. Sekilas Tentang Sejarah dan Potensi Tembi

A.1. Sejarah Singkat Tembi

Meskipun terkenal sebagai desa wisata, Tembi sebenarnya merupakan sebuah dusun yang terletak di wilayah administratif Desa Timbulharjo. Nama Tembi sebagai dusun tidak terlepas dari sejarah panjang di masa lampau. Pada abad ke 16, musuh dari Kesultanan Pajang, Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Ki Ageng Pemanahan. Tak seorang pun mengira bahwa peristiwa tersebut menjadi sebuah sejarah besar bagi eksistensi Desa Tembi. Kekalahan Arya Penangsang menghadirkan *Alas Mentaok* sebagai hadiah Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1558. Ki Ageng Pemanahan mengubah wajah *Alas Mentaok* menjadi lebih beradab. Kotagede adalah wajah baru yang mulai didirikan pada tahun 1557. Ki Ageng Pemanahan mendirikan dan memimpin Kotagede selama tujuh tahun sehingga dapat menghadirkan wajah baru bagi Kotagede. Akan tetapi pada tahun 1584, wajah baru itu ditinggalkan oleh pendirinya karena kematian. Kematian pendiri Kotagede tidak membuat si wajah baru merasa lelah untuk berdiri. Sutawijaya yang bergelar *Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama* menjadi penggantinya untuk mengawal wajah Kotagede. Sutawijaya yang lebih akrab disapa Panembahan Senapati itu membuat wajah Kotagede sedikit 'mendongak'.

^a Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^b Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^c Alumnus Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Selama 17 tahun dibawah kepemimpinan Panembahan Senapati, Kotagede semakin berkembang. Pada tahun 1601, Mas Jolang menggantikan Panembahan Senapati yang wafat. Selama kepemimpinan Mas Jolang, Kotagede tetap pada jalur yang tepat sehingga perkembangan dari desa cukup baik dan tetap ‘mendongak’ ke atas. Pengabdian dari Mas Jolang dilanjutkan oleh Pangeran Arya Martapura anak dari Mas Jolang. Dari pengabdian Pangeran Arya Martapura itulah, Raden Mas Rangsang masih dapat merasakan hadirnya kebesaran Panembahan Senapati. Raden Mas Rangsang mencoba untuk menghadirkan kembali semangat dari pada pendiri. Dengan bergelar *Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman*, diwujudkannya wajah Kotagede yang semakin kokoh dan makmur. Akan tetapi, sepeninggalan Sultan Agung pada tahun 1645, Kotagede mengalami perpecahan dan pertentangan di dalam keluarga kerajaan. Untuk menghindari anak-anak kerajaan tersiksa oleh kerasnya pertentangan di kerajaan, maka anak-anak raja ditiptikan di suatu tempat yang bernama Tembi. Situasi yang sunyi dari kegaduhan di kerajaan menjadikan tempat ini baik untuk mengolah kerohanian. Dibawah asuhan Kyai Tembini dan Nyai Tembini, anak-anak raja mengolah Kanuragan. Tak hanya itu, anak-anak raja juga diajarkan dan dibina agar kelak menjadi anak yang berbudi dan bermartabat. Anak-anak raja tersebut terus bertumbuh menjadi pribadi yang peka akan kebutuhan sesama. Dengan demikian Kyai Tembini dan Nyai Tembini mulai perlahan-lahan melepas anak-anak raja tersebut untuk dapat mengarungi kehidupan yang lebih luas. Tiga abad setelahnya, pada tahun 1997 Tembi ditetapkan menjadi kawasan desa wisata. Pohon *preh* besar di tengah desa Tembi menjadi tempat dimakamkannya Kyai dan Nyai Tembini bersama siswanya yang bernama Diposono.⁶⁴ Sejak saat itu muncul nama “Tembi” yang menjadi nama dusun di wilayah desa Timbulharjo tersebut.

A.2. Potensi Desa

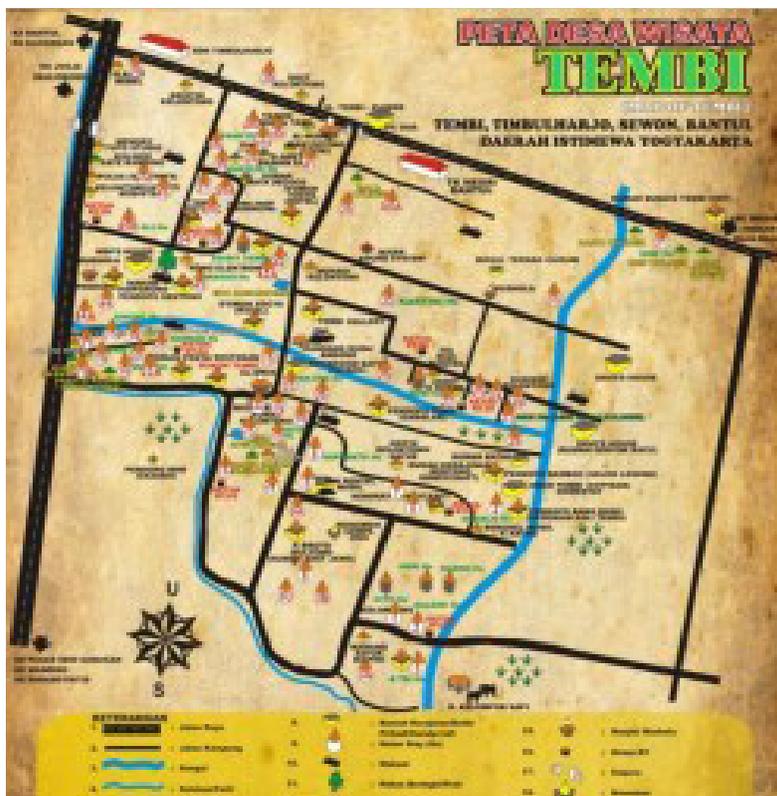
Desa Timbulharjo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Timbulharjo terbagi menjadi 16 pedukuhan dan 122 RT. Desa Timbulharjo memiliki wilayah seluas 777,89 ha. Letak topografi tanah dari Desa timbulharjo adalah datar dengan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga sebagian besar dari masyarakatnya memiliki mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani/perkebunan.

64 C-H. Putra, ‘Sejarah Desa Wisata Tembi’ <https://www.kompasiana.com/cosmashanda/54f6d08da3331183558b491e/sejarah-desa-wisata-tembi> (19.11.2018)

Berdasarkan data desa pada bulan Desember 2016, penduduk Desa Timbulharjo mencapai 22.576 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.391 KK.

Desa Timbulharjo berbatasan dengan banyak desa di Kecamatan Sewon, Pleret, Jetis hingga Kecamatan Bantul. Di sebelah utara Desa Timbulharjo berbatasan dengan Desa Panggungharjo dan Desa Bangunharjo. Di sebelah timur, wilayah desa berbatasan dengan Desa Wonokromo dan Desa Trimulyo. Di sebelah selatan, Timbulharjo berbatasan dengan Desa Sumberagung dan Desa Sabdodadi. Di sebelah barat, Desa Timbulharjo berbatasan dengan Desa Tirenggo dan Desa Pendowoharjo.

Desa Timbulharjo dengan wilayah seluas 777,89 ha terdiri dari fasilitas umum seluas 170,092 Ha, jalan 1,015 Ha, fasilitas pasar 1,625 Ha, lapangan olahraga 1,821 Ha, perkantoran pemerintah 3,127 Ha, Tempat Pemakaman Umum 3,928 Ha, Tanah Bengkok 52,550 Ha dan Sawah Desa 98,8310 Ha. Selain fasilitas umum, juga terdapat lahan persawahan yang terdiri dari tanah sawah 284,006 Ha, tanah sawah irigasi teknis 154,749 Ha dan tanah sawah irigasi setengah teknis sebesar 129,257 Ha.



Gambar 3.1. Peta Desa Wisata Tembi

Berdasarkan informasi mengenai fungsi dan luas lahan tersebut dapat diketahui bahwa pertanian adalah sektor utama yang menjadi potensi penting di Desa Timbulharjo. Sebagian besar penduduk Timbulharjo bekerja sebagai petani. Desa Timbulharjo dilalui dua sungai besar, yaitu Sungai Winongo dan Sungai Code sehingga tanah yang ada disekitar Desa Timbulharjo memiliki kesuburan yang baik. Potensi tersebut mendorong masyarakat untuk melestarikan lahan pertanian dan perkebunan dan menjadi salah satu mata pencaharian dari masyarakatnya. Komoditas utama pertanian Timbulharjo adalah padi. Meskipun potensi utama Timbulharjo adalah pertanian sebenarnya letak geografis desa sangat strategis karena dilalui jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Jalan Parangtritis dan Jalur Imogiri Barat.

B. Bentuk, Proses & Dampak Inovasi Desa Pujon Kidul

B.1. Bentuk Inovasi Desa

Tembi yang sebenarnya merupakan sebuah dusun saat ini terkenal dengan sebutan desa wisata karena karakteristik pedesaan yang sangat khas dan hal tersebut menjadi komoditas utama pariwisata. Desa Wisata Tembi dapat dijangkau dengan menggunakan perjalanan darat sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta. Jalur yang dapat digunakan, yaitu melalui Jalan Parangtritis ke arah selatan hingga wilayah Desa Timbulharjo.



Gambar 3.2. Desa Wisata Tembi

Pada tahun 2016, Desa Wisata Tembi memperoleh penghargaan sebagai desa wisata dengan pengelolaan homestay terbaik se-Asia Tenggara. Hal tersebut membuktikan bahwa homestay merupakan produk wisata unggulan yang ditawarkan Desa Wisata Tembi. Desa Wisata Tembi secara terfokus menawarkan suasana pedesaan yang masih sangat tradisional bagi para wisatawan. Pengunjung yang datang sebagian besar merupakan penduduk yang berdomisili di perkotaan sehingga suasana pedesaan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka.

Secara umum terdapat tiga jenis homestay di Desa Wisata Tembi berdasarkan tarif, kelas dan kepemilikan. Homestay kelas atas atau eksklusif merupakan homestay yang diinisiasi untuk pasar wisatawan internasional. Homestay tersebut biasanya dimiliki oleh pemilik modal besar dan tidak tergabung dalam komunitas desa wisata. Homestay kelas menengah adalah homestay dengan kamar yang sesuai dengan standar hotel berbintang. Pangsa pasar dari homestay jenis ini adalah wisatawan domestik menengah ke atas. Beberapa pejabat seperti Puan Maharani hingga Anies Baswedan pernah menginap dan menikmati fasilitas homestay ini.

Homestay terakhir adalah homestay kelas menengah ke bawah. Homestay ini memiliki segmentasi pasar para wisatawan *backpacker* dengan biaya terbatas. Homestay jenis ini biasanya menggunakan rumah-rumah warga dengan fasilitas yang terbatas seperti kamar, tempat tidur, tegangan listrik dan berbagai fasilitas lain seperti halnya rumah-rumah di daerah pedesaan.

Selain homestay, terdapat berbagai bentuk inovasi pariwisata di Desa Wisata Tembi meliputi paket kegiatan, kegiatan kuliner, kegiatan kesenian, dan kegiatan *outbond*. Paket kegiatan yang ditawarkan Desa Wisata Tembi meliputi aktivitas membatik kain, membatik topeng kayu, membuat kerajinan, membuat keramik, membuat wayang, mewarnai keramik, membuat serta melukis kipas. Paket kegiatan kuliner meliputi aktivitas membuat tempe berbahan dasar kedelai, memasak pisang goreng, dan membuat makanan lokal seperti sagon.

Menu kesenian yang ditawarkan di Desa Wisata Tembi meliputi karawitan, cokekan, wayang kulit, gejog lesung, musik angklung, tari-tarian, dan jathilan. Aktivitas *Outbond* yang ditawarkan di Desa Wisata tembi meliputi lomba banyu mili, lomba pegang belut di sawah, lomba pegang bebek di sawah, lomba bakiak/lari teklek, meyusuri pemat, bajak sawah, bertani, gobak sodor, dan taik tambang lumpur.

B.2. Proses Inovasi Desa

Desa Wisata Tembi dicetuskan atau dibentuk pertama kali pada tahun 1997 oleh pemerintah pusat. Saat itu terdapat sebelas desa di Indonesia yang ditetapkan sebagai desa wisata dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pembangunan desa wisata secara nasional. Meskipun pembangunan Desa Wisata Tembi telah ditetapkan secara nasional, aktivitas pariwisata di dusun tersebut belum dapat berjalan secara optimal.

Efektivitas pengelolaan Desa Wisata Tembi yang masih minim mendorong warga desa untuk mendorong kembali aktivitas pariwisata. Pada tahun 2005 akhirnya dengan swadaya masyarakat yang ada warga Desa Wisata Tembi bermusyawarah dan membentuk komunitas pariwisata. Selain komunitas pariwisata Desa Tembi juga terbentuk komunitas pariwisata Gabusan dan Manding. Gabusan dan Manding adalah wilayah dusun yang berada disekitar Tembi yang juga tumbuh dan hidup berdasarkan aktivitas pariwisata. Koordinasi komunitas ketiga wilayah tersebut kemudian melahirkan komunitas pariwisata Gabusan Manding dan Tembi atau yang biasa disebut dengan GMT. Terbentuknya GMT juga atas peluang geografis bahwa kawasan Gabusan Manding dan Tembi berada di dekat kawasan wisata pantai selatan.

Meskipun komunitas pariwisata telah terbentuk, pada tahun 2006 tantangan kembali datang saat kabupaten bantul mengalami gempa bumi. Akhirnya pada tahun 2008 masyarakat membangun kembali desa tersebut sampai dengan saat ini. Pada awalnya kawasan Tembi terkenal karena kawasan tersebut sering digunakan sebagai lokasi shooting film. Banyak artis dan juga kru film yang pernah menggunakan lokasi ini seringkali datang kembali untuk bernostalgia dan menginap di homestay yang ada disekitaran desa wisata.

Desa Wisata Tembi menawarkan konsep kehidupan pedesaan, kawasan pedesaan yang asri, banyak area persawahan, kearifan lokal, dan aktivitas kerajinan yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di kawasan Bantul. Semua aktivitas yang ada di Desa Wisata Tembi dikelola oleh kelompok atau komunitas masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat melalui komunitas yang ada dapat menghidupi kebutuhannya sendiri. Selain itu juga tersedia homestay yang dapat pengunjung gunakan untuk menginap. Homestay yang ada merupakan milik masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Tembi yang bersedia untuk dijadikan tempat menginap bagi para pengunjung Desa Wisata.

Untuk mendukung aktivitas pariwisata di Desa Wisata Tembi, selain homestay Desa Wisata Tembi juga menawarkan berbagai aktivitas pariwisata yaitu paket kegiatan (aktivitas membatik kain, membatik topeng kayu, membuat kerajinan, membuat keramik, membuat wayang, mewarnai keramik, membuat serta melukis kipas), paket kegiatan kuliner (aktivitas membuat tempe berbahan dasar kedelai, memasak pisang goreng, dan membuat makanan lokal seperti sagon), dan paket kegiatan *outbond* (lomba banyu mili, lomba pegang belut di sawah, lomba pegang bebek di sawah, lomba bakiak/lari teklek, meyusuri pemat, bajak sawah, bertani, gobak sodor, dan taik tambang lumpur).

Berbeda dengan homestay yang berasal dari warga Tembi, berbagai aktivitas pariwisata lainnya berasal dari komunitas-komunitas diluar Tembi. Sebagai contoh ketika terdapat rencana kunjungan wisatawan untuk melakukan kegiatan kesenian, komunitas Desa Wisata Tembi akan menghubungi komunitas kesenian diluar desa. Setiap penghasilan yang didapat dari berbagai jenis aktivitas di Desa Wisata, sepenuhnya akan diterima oleh pelaku usaha baik pemilik homestay maupun komunitas penyedia aktivitas atau pariwisata. Komunitas Desa Wisata Tembi hanya akan menerima 10% dari keuntungan bersih aktivitas pariwisata apabila wisatawan yang mengambil paket pariwisata lebih dari 40 orang. Proporsi sebesar 10% dari keuntungan bersih ini pun akan digunakan kembali untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan operasional Desa Wisata Tembi.

Hal yang menarik dari proses inovasi Desa Wisata Tembi yaitu seluruh aktivitas pariwisata diinisiasi oleh komunitas. Pemerintah tidak melakukan upaya langsung dalam menjamin keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Tembi. Ketika diwawancarai ketua komunitas Desa Wisata Tembi, Dawud, menyampaikan bahwa campur tangan pemerintah dalam bentuk pembelanjaan dana desa hanya terfokus pada pembangunan jalan desa. Meskipun berdampak tidak langsung terhadap aktivitas pariwisata Desa Tembi, pembangunan jalan tersebut bukan bentuk program yang secara spesifik yang diarahkan untuk pembangunan pariwisata.

Dana Desa yang dialokasikan bagi desa-desa di Indonesia sebenarnya dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata akan tetapi dana tersebut tidak diterima oleh Desa Wisata Tembi karena pemerintah desa memprioritaskan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur di desa Timbulharjo. Berdasarkan APBDes yang tersedia dapat dilihat dan

disimpulkan bahwa pemerintah Desa Timbulharjo masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa untuk penggunaan anggaran desa tahun ini.



Gambar 3.3. APBDesa Timbulharjo 2018

B.3. Dampak Inovasi Desa

Karena Desa Wisata Tembi tumbuh dan berkembang atas inisiatif komunitas maka secara umum dampak yang diarahkan atau dihasilkan dari berbagai aktivitas pariwisata lebih dirasakan oleh komunitas itu sendiri. Tidak terdapat dampak langsung bagi peningkatan Pendapat Asli Desa (PADes) dari aktivitas pariwisata di Desa Wisata Tembi.

Dampak ekonomi dirasakan oleh warga yang tergabung ke dalam komunitas berupa penambahan penghasilan dari aktivitas penyewaan homestay. Meskipun memperoleh dampak dari penyewaan homestay

aktivitas tersebut belum mampu menggantikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk Desa Timbulharjo. Para wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Tembi lebih memilih untuk menggunakan fasilitas homestay kelas eksklusif atau kelas menengah atas dibandingkan dengan fasilitas homestay kelas menengah kebawah.



Gambar 3.4. Rumah Warga yang Dijadikan Homestay



Gambar 3.5. Rumah Warga yang Dijadikan Homestay

Berdasarkan fenomena tersebut dampak ekonomi yang tinggi sebenarnya justru dirasakan oleh pemilik homestay kelas menengah keatas. Para pemilik homestay tersebut telah mampu menjadikan aktivitas pariwisata sebagai pekerjaan dan sumber penghasilan utama. Apabila dianalisis lebih lanjut keberadaan komunitas pariwisata di Desa Tembi belum benar-benar bisa memberdayakan masyarakat ditingkat yang paling bawah.

Selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh pemilik homestay, dampak ekonomi juga dirasakan oleh anggota komunitas lainnya yang hidup dari aktivitas pariwisata Desa Tembi. Pengusaha batik, komunitas jathilan, komunitas tari, komunitas wayang, dan komunitas lain yang berasal dari luar tembi turut memperoleh manfaat secara ekonomis.

C. Faktor Pendorong Inovasi Desa

Berdasarkan proses inovasi yang terus berlangsung di Desa Wisata Tembi, dapat diketahui bahwa modal sosial merupakan faktor utama pendorong kemunculan inovasi pariwisata. Secara umum modal sosial terdiri dari kemampuan komunitas membentuk jaringan, berkomunikasi, membentuk norma, dan akhirnya menghasilkan sebuah kepercayaan antar anggotanya. Komponen-komponen tersebut telah terkonfirmasi mampu mewujudkan inovasi dibidang pariwisata Desa Tembi secara berkelanjutan.

Terkait kemampuan membentuk jaringan, warga desa terbukti mampu menghidupkan kembali aktivitas pariwisata di Desa Tembi pada tahun 2008. Mereka terus menjalin koordinasi baik antar warga di Desa Tembi maupun antar komunitas di luar Tembi, yaitu Komunitas Gabusan dan Manding. Pada akhirnya koordinasi tersebut menghasilkan jaringan yang lebih kuat yaitu Komunitas Gabusan Manding dan Tembi.

Kemampuan komunikasi juga terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Karena tujuan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara intensif warga yang tergabung dalam komunitas Desa Wisata Tembi terus melakukan langkah komunikasi. Musyawarah dan pelaporan hasil usaha pariwisata selalu dikemas di dalam pertemuan rutin komunitas Desa Wisata Tembi.

Komunitas yang semakin kuat selanjutnya memunculkan berbagai aturan yang disepakati bersama. Penentuan tarif, fasilitas homestay, dan berbagai standar tata kelola pariwisata lainnya dikelola sedemikian rupa berdasarkan langkah musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif. Meskipun tata aturan telah tertulis dan disepakati bersama, tetap terdapat ruang bagi berjalannya norma-norma yang tidak diatur di dalam aturan yang jelas. Sebagai contoh pemilik homestay secara etis tidak diperbolehkan menerima tamu yang membawa minuman beralkohol.

Pada akhirnya dari proses komunikasi, pembentukan jaringan, serta pembentukan mekanisme kelembagaan yang mencakup norma-norma bersama memunculkan kepercayaan antar anggota komunitas Desa Wisata

Tembi. Dapat dipahami bahwa pada tahap ini masyarakat telah berada pada tingkat modal sosial yang paling tinggi sehingga keberlanjutan pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tembi dapat terjaga.

Ikatan atau relasi yang kuat antar warga Tembi sesuai penjelasan Lin (2001) merupakan sumber utama terbentuknya modal sosial. Menurut Lin relasi adalah sumber utama bagi terciptanya modal sosial di tengah masyarakat. Relasi tersebut terbentuk atas irisan kepentingan yang disebutkan Sato (2013) sebagai *actor utilities*. Relasi dalam modal sosial hanya akan terbentuk ketika terdapat pertukaran kepentingan atau kemanfaatan antar aktor.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Tembi dapat dipahami bahwa modal sosial terbentuk dan menciptakan ikatan yang kuat antar warga. Relasi yang kuat tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat untuk membuka jaringan yang lebih luas di luar Tembi. Proses ini dijelaskan oleh Badescu dan Uslander (2003) sebagai *bonding* dan *bridging social capital*. *Bonding social capital* adalah modal sosial yang ditandai dengan ikatan antar anggota komunitas. Setelah *bonding social* tercipta kemudian terbentuk *bridging social capital* yaitu ikatan komunitas pada aktor yang lebih luas. Dalam kasus Tembi, ikatan ini ditandai dengan munculnya komunitas Gabusan Manding Tembi (GMT).

Pada akhirnya baik *bonding* maupun *bridging social capital* menempatkan kepercayaan atau *trust* sebagai modal sosial yang paling tinggi. Menurut Liang (2006) kepercayaan yang muncul antar aktor pada proses modal sosial menjadi hal penting yang dibutuhkan bagi proses demokratisasi. Demokrasi yang semakin melibatkan masyarakat lokal perlu didasari oleh pelestarian modal sosial yang berbasis kepercayaan antar aktor.

D. Analisis Proses Produksi Produk Unggulan

D.1. Tata Kelola Homestay di Desa Wisata Tembi

Homestay yang ada di Desa Wisata Tembi secara umum dikelola dan dimiliki oleh komunitas dan pemilik rumah. Homestay yang dikelola oleh homestay memiliki kualitas pelayanan dengan standar layanan setara hotel. Sementara itu, homestay yang dikelola warga pada umumnya sangat menyesuaikan dengan kondisi fisik dari rumah warga tersebut, namun harus mencakup beberapa fasilitas dasar yang diperlukan, seperti spre, handuk, kamar mandi, dan sarapan pagi.

Di Desa Wisata Tembi, terdapat 92 homestay yang dikelola secara perorangan dan diberi nama sesuai dengan pemilik homestay tersebut, seperti Homestay Ali, Homestay Ari, Homestay Bambang, dan lain sebagainya. Homestay non AC ini memiliki fasilitas dasar, seperti makan pagi (*breakfast*), kamar mandi dalam, serta dikenakan biaya Rp 75.000,00 per orang per malam.

Dalam hal ini, peneliti mengunjungi salah satu homestay yang dimiliki oleh warga, yakni Homestay Wagiyu. Secara umum, proses reservasi dan pemesanan homestay yang dilakukan secara individu dilakukan langsung kepada homestay yang bersangkutan. Namun jika pengunjung berjumlah lebih dari 500 orang, maka proses reservasi dikoordinasi di kantor Desa Wisata Tembi dan dikenakan iuran sebesar 10% dari total pemasukan yang didapatkan.



Gambar 3.6. Kamar Homestay

Kondisi homestay sendiri dikondisikan sesuai dengan karakteristik pemilik yang memiliki homestay tersebut. Kondisi kamar dan sarapan pagi yang disiapkan sangat bergantung pada kebijaksanaan pemilik rumah.

Untuk menjamin kualitas dari homestay yang dikelola secara perorangan, Dawud Subroto selaku Kepala Desa Wisata Tembi melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kelayakan tempat tinggal yang akan dihuni oleh wisatawan guna menghindari citra buruk dari penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh warga di Desa Wisata Tembi.

Selain itu, kondisi kamar yang disediakan dipastikan bersih dan menggunakan sprei, selimut, dan disediakan handuk sesuai standar dasar yang dimiliki oleh akomodasi berbiaya rendah.

Sementara itu, untuk homestay yang dikelola oleh komunitas tersedia 17 homestay, semua kamar yang ditawarkan memiliki fasilitas AC, baik itu homestay Tembi, Omah Tembi, dan Kampung Tembi dengan fasilitas berupa makan pagi (*breakfast*), water heater, dan hotspot area. Adapun harga yang diberikan kepada wisatawan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Harga Homestay

No.	Tipe Kamar	Harga per malam
1.	Standard Room	Rp 300.000,00
2.	Family Room	Rp 500.000,00
3.	Deluxe Family Room	Rp 600.000,00
4.	Executive Room	Rp 750.000,00

Ketika tim peneliti berkunjung ke berbagai tipe kamar yang ada di Homestay Desa Tembi, terlihat bahwa setiap kamar telah memiliki tempat tidur, kamar mandi, serta fasilitas dasar setara hotel berbintang, mulai dari perangkat mandi dasar, botol minum, hingga kasur yang dilapisi sprei putih.



Gambar 3.7. Kamar Homestay Standar Hotel



Gambar 3.8. Kamar Homestay Standar Hotel



Gambar 3.9. Kamar Homestay Standar Hotel

Melihat kualitas dan pelayanan homestay yang ditawarkan, Homestay di Desa Tembi telah memperoleh penghargaan sebagai Peringkat I dalam Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata yang diberikan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Mengingat kualitas homestay Desa Wisata Tembi yang prima, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu baru saja terpilih pernah menginap di Executive Room dan memberi sebuah testimoni *"Tradisi dan suasana desa tanah Jawa dalam sebuah kemasan modern menjadi pengalaman yang mengesankan. Salut!"* pada 20 Juli 2017.

D.2 Proses Pembuatan Batik di Leksa Ganesha Batik Gallery

Selaku pengrajin batik di Desa Wisata Tembi, Ibnu Sudiro menjelaskan tentang teknik canting tulis yang dikerjakan secara bertahap. Proses pembuatan batik secara tradisional yang umum digunakan di Jawa ini dimulai ketika pengrajin membuat pola dalam kain mori. Kesulitan dalam proses pembuatan batik dengan canting tulis ini adalah membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Apalagi peran pengrajin menjadi sangat krusial karena proses pembuatan batik dengan teknik canting tulis ini dikerjakan 100% oleh tangan manusia, sehingga keterampilan dan kreativitas menjadi kunci dari pembuatan batik tulis. Adapun alat-alat dan bahan yang harus disiapkan dalam proses pembuatan batik tulis adalah sebagai berikut:



Gambar 3.10. Proses Pembuatan Batik

1. Canting adalah alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. Jadi fungsinya seperti pensil untuk lilin.
2. Pensil pola
3. Kain mori putih yang biasanya kain sutera atau kain katun
4. Lilin malam (*wax*)
5. Kompor atau alat pemanas lilin malam (*wax*)
6. Bahan pewarna kain

Teknik pembuatan batik tulis dilakukan dengan menorehkan cairan malam/lilin melalui media canting tulis. Proses pembuatan batik tulis malam/lilin hampir serupa dengan proses pembuatan batik cap. Cairan malam/lilin harus tetap terjaga pada kondisi suhu 70 derajat Celcius. Dengan menggunakan canting tulis cairan malam diambil dari nyamplung. Cucuk canting harus berlubang, sehingga perlu ditiup agar membran cairan terbuka. Setelah itu cairan malam baru dioleskan sesuai motif yang telah digambar di kain mori dengan pensil.

Dalam proses pembuatan batik tulis kita harus menyiapkan terlebih dahulu kain mori terbentang, menggambar sketsa motif batik yang akan dibuat dengan menggunakan pensil, kemudian menorehkan cairan malam/lilin dengan warna dengan menggunakan canting tulis secara teliti dan hati-hati. Apabila kain mori telah selesai digambar dengan cairan malam/lilin, selanjutnya dilakukan proses pewarnaan, lorot malam, membilas soda, dijemur, dan disetrika.

Proses Detail Pembuatan Batik Tulis

- a. Siapkan kain mori/sutera, kemudian dibuat motif diatas kain tersebut dengan menggunakan pensil.
- b. Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan.
- c. Nyalakan kompor/anglo, letakkan malam/lilin ke dalam wajan/nyamplung, dan panaskan wajan dengan api kecil sampai malam/lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor/anglo stabil, biarkan api tetap menyala kecil.
- d. Tahap selanjutnya, menutupi kain dengan malam/lilin pada bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih (sama dengan warna dasar kain). Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan/kain ke dalam larutan pewarna bagian yang diberi lapisan malam/lilin tidak terkena pewarna.

- e. Pada proses membatik dimulai dengan mengambil sedikit malam cair dengan menggunakan canting, tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas kemudian torehkan/goreskan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain, karena akan mempengaruhi hasil motif batik.
- f. Setelah semua motif yang tidak ingin diwarnai atau diberi warna yang lain tertutup oleh malam/lilin, selanjutnya dilakukan proses pewarnaan. Siapkan bahan pewarna di dalam ember, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam/lilin. Pewarnaan dilakukan dengan cara mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Kain dicelup dengan warna yang dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya.
- g. Setelah dicelupkan dalam pewarna, kain tersebut di jemur dan dikeringkan.
- h. Setelah kering dilakukan proses pelorodan, proses tehnik "pelorodan" dilakukan dengan cara lilin dikerik dengan pisau, kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu, atau menggunakan tehnik pelepasan lilin dengan dilumuri bensin, kemudian kain disetrika sehingga lilin menjadi meleleh. Dari keempat jenis pelepasan lilin di atas, tehnik perebusan kain dengan soda abu dan tehnik setrika adalah yang lazim digunakan oleh pembatik tradisional.
- i. Kain yang telah berubah warna tadi direbus dalam air panas. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan malam/lilin sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Apabila diinginkan beberapa warna pada batik yang kita buat, maka proses dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan.
- j. Setelah kain bersih dari malam/lilin dan dikeringkan, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam/lilin menggunakan alat canting untuk menahan warna berikutnya.
- k. Selanjutnya proses pencelupan warna yang kedua, dengan memberikan malam/lilin lagi, pencelupan ketiga, dst. Misalkan, dalam satu kain diinginkan ada 5 warna maka proses diatas tadi diulang sebanyak jumlah warna yang diinginkan berada dalam

kain tersebut satu persatu lengkap dengan proses membuka/nglorot dan menutup malam/lilin dilakukan berulang kali sesuai dengan banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan.

- l. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda ash untuk mematkan warna yang menempel pada batik, dan menghindari kelunturan.
- m. Proses terakhir adalah mencuci/direndam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai.

Mengingat proses yang lama dan membutuhkan ketelitian, maka harga batik tulis umumnya relatif mahal, apalagi jika dikombinasikan dengan bahan kain sutera. Ditambah penggunaan pewarna alam dalam proses pembuatan batik, yakni daun indigo untuk warna biru, kayu nangka untuk warna kuning, dan lain sebagainya. Adapun proses dalam pembuatan batik tulis ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan.

Secara khusus, Ibnu Sudiro mengatakan bahwa produk yang dijual bukan hanya kain batik tulis, melainkan juga lukisan dengan ornamen batik yang detail. Harga yang dijual bervariasi mulai dari Rp 250.000,- hingga Rp 2.000.000,- tergantung dari tingkat kesulitan dan keunikan dari lukisan yang dibuat. Secara umum, Ibnu Sudiro yang diwakili oleh Tatang, anaknya memberikan sketsa kasar atau gambaran umum tentang lukisan yang dibuat, sementara pengrajin memberikan detail sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki.

Lebih dari itu, Leksa Ganesha Batik Gallery juga sudah menjual beberapa produk pesanan ke IKEA, serta mengikuti pameran di Festival Peranakan Singapura. Hanya saja, Leksa Ganesha Batik Gallery menjual hanya produk batik semata tanpa merek, sehingga harga jual yang diberikan relatif rendah, yakni Rp 650.000,-, padahal penjual yang memasarkan produk batik tersebut dapat menjual produk tersebut hingga Rp 3.500.000,-. Sehingga proses pembuatan merek orisinal menjadi proses yang harus ditambahkan dalam pemasaran produk batik Leksa Ganesha Batik Gallery.

D.3. Rantai Pasok Industri Kerajinan di Desa Wisata Tembi

Desa Wisata Tembi pun mempunyai potensi dalam industri kerajinan tangan. Dalam hal ini, Eryanto selaku salah satu pengrajin yang ada mengungkapkan bahwa lahan hotel yang dikelola Desa Wisata Tembi awalnya adalah sentra kerajinan yang memproduksi berbagai kerajinan untuk dijual ke berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia.



Gambar 3.11. Aneka Kerajinan Desa

Bahan baku pandan umumnya didapatkan di Gombong, sementara itu bahan baku karton dan vinyl dapat didapatkan dengan mudah di wilayah sekitar Desa Wisata Tembi. Secara umum, proses pembuatan kerajinan dilakukan dengan pewarnaan pandan dengan proses perebusan, baik itu berwarna coklat, kuning, merah, dan lain sebagainya.

Secara umum, pengrajin yang mengerjakan produk kerajinan ini dilakukan oleh warga sekitar dan sudah dimulai sejak Warwick Pursen Larsen dari Australia menyulap Tembi menjadi Desa Wisata. Sayangnya, industri kerajinan ini belum menjadi sektor pendapatan utama di Desa Wisata Tembi, sehingga keberlanjutan bisnis kerajinan ini sangat bergantung pada pesanan yang dilakukan oleh konsumen. Padahal, sektor kerajinan ini sangat berpotensi untuk memberikan pemasukan yang signifikan bagi pendapatan desa di Desa Wisata Tembi.

Adapun berbagai paket kegiatan yang berkaitan dengan kerajinan tangan yang ditawarkan di Desa Wisata Tembi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Paket Kegiatan Kerajinan Tangan

No.	Kegiatan	Harga per Orang
1.	Membatik Kain	Rp 35.000,00
2.	Membatik Topeng Kayu	Rp 40.000,00
3.	Membuat Kerajinan a. Tempat Pensil b. Tempat Tisu	Rp 25.000,00 Rp 40.000,00
4.	Membuat Tembikar/Keramik	Rp 20.000,00
5.	Tatah Sungging Wayang	Rp 40.000,00
6.	Mewarnai Keramik	Rp 15.000,00
7.	Membuat dan Melukis Kipas	Rp 35.000,00

Pengrajin yang melatih wisatawan akan dihadirkan ketika ada pemesanan dari wisatawan sebelumnya, sehingga ketersediaan pelatihan bersifat temporer (*based on order*).

D.4. Pariwisata Pendukung

Kegiatan wisata lainnya yang ditawarkan di Desa Wisata Tembi adalah kegiatan membuat kuliner daerah, seperti membuat tempe dele, sagon, dan pisang goreng dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 3.3. Paket Kegiatan Kuliner

No.	Kegiatan	Harga per Orang
1.	Membuat tempe dele	Rp 20.000,00
2.	Membuat sagon	Rp 25.000,00
3.	Memasak pisang goreng	Rp 20.000,00

Kegiatan ini didukung oleh ibu-ibu rumah tangga sekitar yang juga menyediakan makanan untuk Homestay Tembi.

Selain itu, ada juga wisata keliling dengan naik dokar keliling desa wisata seharga Rp 450.000,00 per jam dengan kapasitas 5 orang. Ada juga sepeda onthel yang dapat disewa sebesar Rp 30.000,00 untuk tiap 10 jam.

Dari aspek kesenian, terdapat juga produk yang ditawarkan, seperti:

Tabel 3.4. Paket Kegiatan Kesenian

No.	Kesenian	Tarif
1.	Karawitan	Rp 1.500.000,00/3 jam
2.	Cokekan	Rp 700.000,00/3 jam
3.	Wayang Kulit	Rp 1.000.000,00/3 jam
4.	Gejog Lesung	Rp 700.000,00/3 jam
5.	Musik Angklung	Rp 700.000,00/3 jam
6.	Tari-Tarian	Rp 950.000,00/1 jam (2 tarian)
7.	Jathilan	Rp 1.900.000,00

Pelaku kesenian ini akan diundang jika terdapat pesanan jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak bisa dilakukan dengan mendadak (*on the spot*).

Sementara itu, dari wisata outbound harga yang diberikan adalah sebagai berikut dengan minimal keikutsertaan 25 orang dan dikoordinasi oleh warga di sekitar Desa Wisata Tembi.

Tabel 3.5. Wisata Outbound

No.	Kegiatan	Harga Pelajar/ Mahasiswa/ pack	Harga Umum/ pack
1.	Lomba banyu mili	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
2.	Lomba pegang belut di sawah	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
3.	Lomba pegang bebek di sawah	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
4.	Lomba bakiak/lari teklek	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
5.	Menyusuri pematang sawah	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
6.	Bajak sawah	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
7.	Bertani	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
8.	Gobak sodor	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00
9.	Tarik Tambang Lumpur	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00

E. Kesimpulan dan Saran

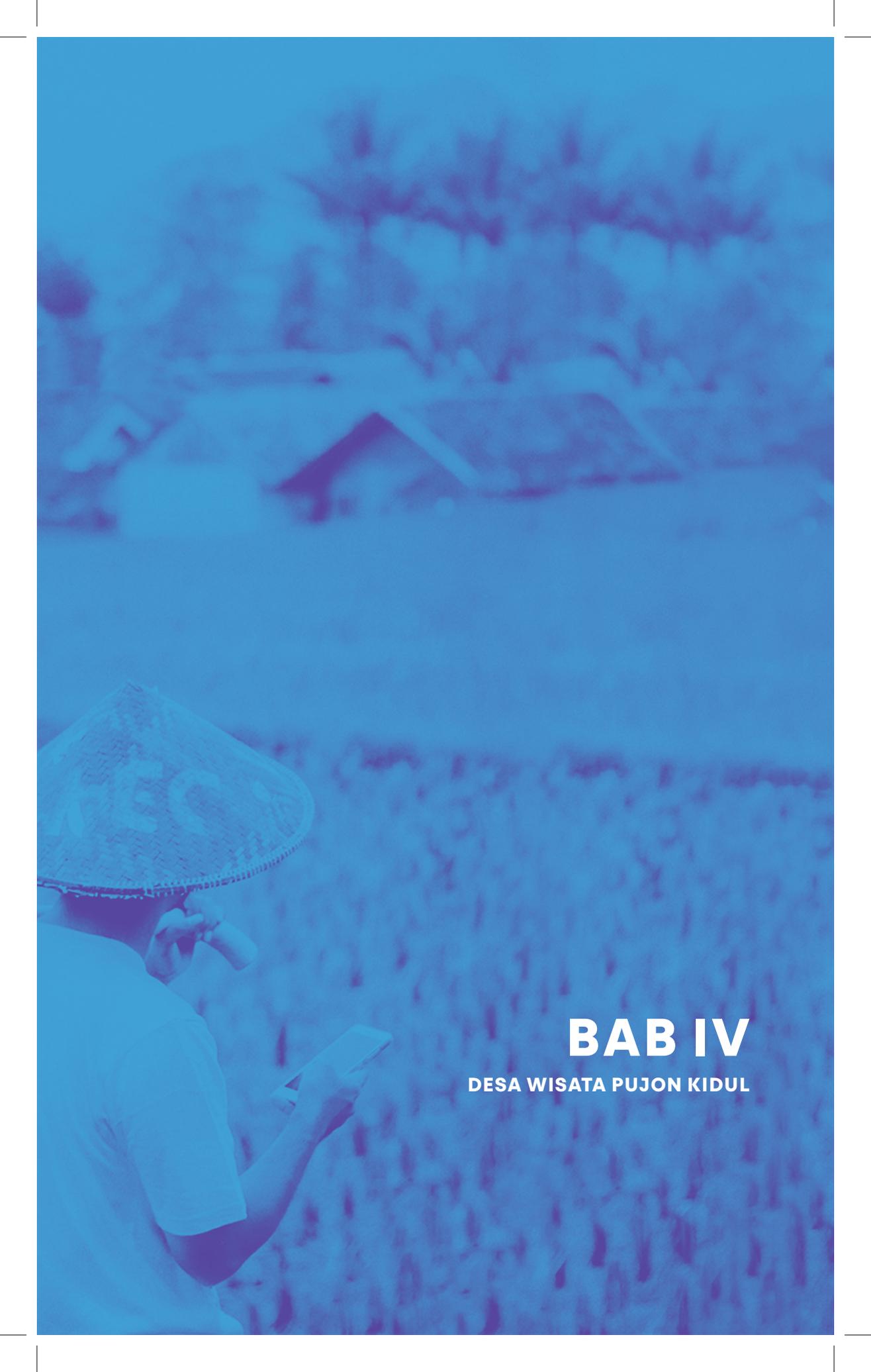
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, diperoleh beberapa pembelajaran penting dari dinamika inovasi yang dilakukan oleh Desa Wisata Tembi. Melalui analisis dinamika inovasi Desa Wisata Tembi dapat dipahami bahwa potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki desa bukanlah faktor utama dalam mendorong inisiatif warga untuk berinovasi. Tembi yang sebenarnya adalah dusun atau bagian dari desa mampu mewujudkan inovasi pengembangan ekonomi lokal dengan berfokus pada pemberdayaan komunitas. Langkah ini terbukti mampu mendorong transformasi potensi desa yang sangat terbatas menjadi produk unggulan pariwisata yang membawa dampak peningkatan ekonomi bagi komunitas.

Pembelajaran menarik yang juga penting untuk diamati adalah peran sentral komunitas dalam mengembangkan inovasi. Berbeda dengan sebagian besar inovasi desa yang berasal dan diinisiasi oleh *formal leader* seperti kepala atau perangkat desa, Inovasi pariwisata yang muncul di Tembi justru muncul dan berkembang karena peran komunitas masyarakat. Berdasarkan kepentingan yang sama, masyarakat Tembi bersatu dan mendorong kemunculan homestay serta berbagai aktivitas pariwisata yang memiliki nilai jual.

Peran sentral komunitas masyarakat tersebut menjadi pertanda bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat Tembi masih terjaga. Norma, komunikasi dan ikatan jaringan masyarakat sebagai komponen modal sosial mampu menjadi pondasi utama perkembangan pariwisata Tembi. Berbagai aturan yang bersifat formal seperti sistem bagi hasil usaha justru tidak menjadi prioritas bagi komunitas

Meskipun pariwisata di Tembi tidak dikembangkan atas ketersediaan modal pendanaan yang besar, anggota komunitas mengklaim bahwa aktivitas pariwisata Desa Wisata Tembi lebih berkelanjutan dibandingkan jika dikelola oleh Pemerintah Desa. Aturan atau payung hukum dalam bentuk peraturan desa dianggap terlalu kaku dan tidak dipahami sehingga justru dapat menjadi tantangan bagi pengelolaan Desa Wisata Tembi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim peneliti berpendapat bahwa tetap diperlukan campur tangan pemerintah dalam pengembangan inovasi desa. Meskipun demikian keterlibatan pemerintah desa tidak diarahkan sebagai aktor utama inovasi. Ketika komunitas masyarakat telah memiliki norma serta mekanisme kelembagaan inovasi kuat yang berbasis kearifan lokal, pemerintah cukup memberikan dukungan di sektor infrastruktur atau dukungan lain yang bersifat memfasilitasi komunitas.



BAB IV

DESA WISATA PUJON KIDUL

BAB IV

DESA WISATA PUJON KIDUL: CERITA KEBERHASILAN REVITALISASI PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNTUK MENEKAN LAJU URBANISASI

Trisno Sakti Herwanto^a, William Tandi Wijaya^b

A.Sekilas Tentang Desa Pujon Kidul

Desa Pujon kidul yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang memiliki luas wilayah desa sebesar 323.159 Ha. Luas lahan tersebut terdiri dari 45.807 Ha lahan pekarangan dan perumahan, 84.742 Ha lahan persawahan, 87.102 Ha lahan perkebunan, 227 Ha hutan lindung dan 578 Ha hutan produksi. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, saat ini terdapat 1.324 Kepala Keluarga yang tinggal di wilayah administratif Desa Pujon Kidul. Jumlah Kepala Keluarga tersebut meliputi 4.146 jiwa warga yang berstatus sebagai penduduk tetap.



Gambar 4.1. Akses Masuk Desa Pujon Kidul

^a Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^b Alumnus Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Desa Pujon Kidul berbatasan dengan berbagai desa dan wilayah milik pemerintah pusat terutama Perhutani. Di sebelah utara Pujon Kidul berbatasan dengan Desa Ngroto. Di sebelah selatan wilayah desa berbatasan dengan hutan milik perhutani. Di sebelah barat, Desa Pujon Kidul berbatasan dengan Desa Sukomulyo dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Desa Pujon Lor.

Jarak tempuh Desa Pujon Kidul ke Ibukota Kecamatan sejauh 3 Km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Selain itu, dengan kendaraan roda dua atau roda empat, Desa Pujon Kidul dapat ditempuh sekitar 20 hingga 30 Menit dari alun-alun Malang serta berbagai wahana wisata yang berada di kota Batu. Kondisi tersebut didukung dengan kondisi jalan kabupaten yang sangat baik pasca perbaikan yang dilakukan pemerintah kabupaten pada tahun 2015.

Sesuai dengan luas dan kegunaan lahan di Pujon Kidul seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar warga Pujon Kidul bekerja sebagai petani dan peternak. Selain padi, berbagai tanaman pangan dan sayuran dikembangkan oleh para petani Pujon Kidul. Jagung, kentang, cabai, tomat, terong, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya tumbuh dengan subur di Desa Pujon Kidul. Sapi, ayam, itik dan kambing menjadi berbagai komoditas peternakan yang dikembangkan oleh para peternak. Meskipun demikian, sapi perah merupakan jenis hewan ternak yang dikembangkan secara signifikan di Desa Pujon Kidul.

Kehidupan petani di Desa Pujon Kidul penuh dengan berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani padi adalah fluktuasi harga beras yang terjadi di pasar. Ketika musim pertanian masuk pada masa panen raya, secara tiba-tiba harga beras yang diambil dari petani mengalami penurunan. Selain harga, berbagai jenis hama juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat petani Pujon Kidul. Secara tidak langsung hama tersebut juga mempengaruhi kualitas dan harga jual beras para petani. Berbagai hama yang sering ditemui petani Pujon Kidul antara lain wereng, ingser, sundep, dan tikus.

Sejak tahun 2012 Pujon Kidul terkenal dengan aktivitas pariwisatanya. Aktivitas pariwisata desa juga semakin terkenal seiring dengan perkembangan media sosial. Fenomena ini didukung oleh kondisi sekeliling Desa Pujon Kidul yang terdiri dari hamparan sawah dan perbukitan. Pemandangan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan terutama bagi mereka yang ingin melakukan swafoto.

B. Bentuk, Proses dan Dampak Inovasi Desa Pujon Kidul

Sesuai dengan penjelasan Damanpour dalam Salge & Vera (2012), inovasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses dalam memunculkan, mengembangkan dan mengadopsi ide-ide atau perilaku yang baru. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menjelaskan bentuk, proses dan dampak inovasi Desa Pujon Kidul sebagai berikut:

B.1. Bentuk Inovasi Desa

Secara umum Desa Pujon Kidul merupakan desa yang memiliki inovasi di bidang pariwisata. Meskipun demikian, desa tersebut juga memiliki inovasi lain yaitu pengelolaan air secara terpadu (PAMDes) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Berbeda dengan inovasi di bidang pariwisata yang sangat berorientasi pengembangan ekonomi, inovasi pengelolaan air secara terpadu serta pengelolaan sampah lebih difokuskan untuk mengatasi masalah masyarakat terkait dengan ketersediaan air bersih dan kebersihan lingkungan. Pada akhirnya inovasi pariwisata, pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah terpadu dikelola oleh BUMDes yang dibentuk oleh Desa Pujon Kidul.

Berkaitan dengan inovasi di bidang pariwisata, Desa Pujon Kidul berhasil mengubah lahan sawah menjadi pusat berbagai aktivitas pariwisata. Sawah yang sebelumnya hanya digunakan untuk bercocok tanam berbagai tanaman pangan, diubah menjadi beragam wahana wisata yang memiliki daya tarik tinggi. Berbagai wahana wisata desa tersebut meliputi Cafe Sawah, Wisata Edukasi, The Roudh 78, dan Rumah Budaya. Selain wahana-wahana tersebut, terdapat industri pendukung pada aktivitas pariwisata Pujon Kidul yaitu homestay dan industri makanan ringan.

Cafe Sawah berdiri di atas dataran di lembah pegunungan yang memiliki pemandangan yang indah. Berbeda dengan cafe yang sering ditemukan di perkotaan, Cafe Sawah menjual suasana pedesaan bagi para pengunjung. Pengunjung dapat memesan dan menikmati berbagai menu makanan maupun minuman sembari menikmati panorama persawahan. Salah satu menu andalan Cafe Sawah adalah susu sapi murni. Meski pengunjung disuguhi dengan pemandangan sawah, mereka sangat tertarik melakukan swafoto di Cafe Sawah karena penataan lokasi yang

unik. Berbagai tanaman pangan seperti padi, cabai, tomat, serta aneka sayuran ditata menjadi pemandangan yang sangat indah untuk dijadikan latar belakang gambar.



Gambar 4.2. Cafe Sawah dengan Latar Belakang Pemandangan Alam

Wisata Edukasi merupakan aktivitas pariwisata Pujon Kidul yang menawarkan dua kegiatan utama yaitu peternakan dan pertanian. Pada wahana tersebut wisatawan dapat melakukan aktivitas wisata edukasi peternakan dengan serangkaian kegiatan seperti memberi pakan, memandikan, hingga pemerahan susu sapi. Terkait dengan aktivitas wisata edukasi di bidang pertanian, para wisatawan dapat melakukan penyemaian bibit hingga panen berbagai tanaman pangan seperti padi, jagung, tomat, cabai, terong dan beragam sayuran lainnya. Aktivitas ini tentu menjadi kegiatan menarik bagi para wisatawan yang sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan.

Wahana The Roudh 78 merupakan area di sebelah Cafe Sawah yang dikemas menjadi suasana peternakan kuda. Pada wahana tersebut, wisatawan dapat melakukan aktivitas layaknya seorang koboi yaitu menunggang kuda. Selain aktivitas tersebut, wisatawan juga dapat melakukan swafoto karena area The Roudh 78 ditata sedemikian rupa menjadi seperti kawasan peternakan kuda di amerika. Suasana tersebut menjadi nilai jual tersendiri bagi The Roudh 78 untuk terus menarik minat wisatawan.



Gambar 4.3. The Roudh 78

Berbeda dengan The Roudh 78, Rumah Budaya merupakan area yang ditata menjadi semacam panggung pertunjukan budaya. Bangunan joglo serta berbagai aksesoris seperti patung dan wayang menjadikan Rumah Budaya sangat kental dengan nuansa tradisional Jawa. Rumah Budaya sering digunakan sebagai pusat kegiatan budaya yang memiliki nilai jual pariwisata. Pertunjukan wayang orang, tari-tarian hingga upacara adat seringkali dilakukan di Rumah Budaya. Wahana ini menjadi daya tarik terutama bagi wisatawan asing yang ingin mengetahui berbagai warisan budaya Jawa secara khusus dan Indonesia secara umum.

Berbagai wahana dan aktivitas pariwisata di Pujon Kidul didukung oleh keberadaan homestay. Homestay di Pujon Kidul diinisiasi untuk meningkatkan durasi atau lama tinggal wisatawan. Ketika wisatawan semakin lama menghabiskan waktu di Pujon Kidul maka diharapkan tercipta kemungkinan peningkatan pendapatan ekonomi dari aktivitas pariwisata. Homestay di Pujon Kidul sebenarnya adalah rumah-rumah milik penduduk yang terkoordinasi oleh pemerintah desa serta terstandarisasi baik pelayanan maupun tarif yang ditetapkan bagi para wisatawan. Untuk setiap kamar yang disewakan, wisatawan akan dikenakan tarif sebesar Rp. 150.000,00 setiap malam. Tarif tersebut sudah meliputi fasilitas berupa dua handuk bersih, kamar mandi dan sarapan bagi para wisatawan.

Selain homestay, keberadaan industri makanan ringan menjadi pendukung bagi pariwisata Pujon Kidul. Meskipun dimiliki oleh perorangan

dan masih berada pada tahap pengembangan, sejumlah makanan ringan berhasil diproduksi oleh warga setempat. Pembelajaran menarik dari industri makanan ringan Pujon Kidul adalah selalu berfokus pada pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki. Berbagai produk makanan ringan yang ada menggambarkan potensi SDA yang ada di Pujon Kidul. Berbagai jenis makanan ringan tersebut meliputi kerupuk yang terbuat dari susu sapi, susu pasteurisasi, carang mas yang terbuat dari apel, permen susu sapi, yoghurt, jahe bubuk, kunyit bubuk dan berbagai makanan lainnya.

Selain berbagai inovasi di bidang pariwisata, pengelolaan air terpadu dalam bentuk PAMDes menjadi inovasi yang dikembangkan di Pujon Kidul. PAMDes diinisiasi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran suplai air bersih bagi seluruh warga Pujon Kidul. Pipanisasi dan pemasangan watermeter menjadi upaya penting yang dilakukan untuk tujuan tersebut. Untuk setiap kubik air bersih yang dinikmati, setiap kepala Keluarga Pujon Kidul hanya perlu membayar retribusi sebesar Rp. 325,00. Rata-rata untuk setiap bulan, setiap KK cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp.15.000,00 untuk mendapatkan fasilitas air bersih dari PAMDes Pujon Kidul.

Untuk mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan, Pujon Kidul juga melakukan inovasi berupa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). TPST Pujon Kidul selain didirikan untuk menjaga kebersihan lingkungan desa bagi warga juga didirikan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan desa agar lebih ramah dan siap menerima wisatawan. Setiap hari mobil pengangkut sampah akan mengambil sampah-sampah rumah tangga. Sampah-sampah tersebut selanjutnya dipilah antara organik dan anorganik. Sampah organik selanjutnya diolah menjadi pupuk untuk aktivitas pertanian, sementara sampah anorganik dijual dan menambah pemasukan bagi desa.

Secara umum tiga bentuk inovasi desa meliputi aktivitas pariwisata, PAMDesa dan TPST selanjutnya dikelola dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain berfungsi untuk mengadministrasi pembangunan pariwisata dan pengelolaan PAMDes serta TPST, BUMDes diarahkan untuk melakukan sistem pengelolaan berbagai bentuk inovasi desa secara profesional. Melalui asas profesionalitas tersebut, BUMDes diharapkan tidak hanya dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan secara ekonomi namun juga mampu menyediakan barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan warga.

B.2. Proses Inovasi

Proses inovasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan inovasi. Sesuai pendapat Birkinshaw, Bouquet & Barsoux (2011) inovasi merupakan 5% ide dan 95% usaha nyata. Berdasarkan pendapat tersebut proses inovasi dapat dijelaskan sebagai proses yang panjang. Proses ini juga dialami Desa Pujon Kidul sehingga dapat menjadi salah satu desa inovatif di Indonesia saat ini. Keberhasilan inovasi Desa Pujon Kidul dimulai dari proses yang panjang setelah Udi Hartoko terpilih sebagai kepala desa.

Secara mendasar penerapan konsep pembangunan pariwisata di Desa Pujon Kidul berasal dari inisiatif sang kepala desa, Udi Hartoko. Udi Hartoko merupakan mantan general manager salah satu hotel di Kota Malang. Melalui pengalaman tersebut, beliau memiliki konsep dan pengalaman yang matang untuk mendorong Desa Pujon Kidul menjadi desa wisata. Udi Hartoko bahkan rela meninggalkan jabatannya sebagai general manager dan beralih menjadi kepala desa untuk menerapkan konsep desa wisatanya.

Proses tersebut bermula ketika pada tahun 2011 dilakukan pemilihan kepala desa di Pujon Kidul. Saat itu Udi mencalonkan diri sebagai kepala desa meskipun masih memegang jabatan sebagai general manager hotel. Pariwisata menjadi visi besar beliau yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan kepala desa. Melalui mekanisme pemilihan yang demokratis akhirnya Udi terpilih menjadi Kepala Desa Pujon Kidul dan pada saat yang bersamaan beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai general manager hotel.

Visi besar pariwisata yang diusung Udi Hartoko tidak terlepas dari fenomena bahwa Desa Pujon Kidul hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 20 menit dari kota wisata Batu Malang. Udi Hartoko melihat kondisi ini sebagai peluang besar pembangunan pariwisata. Meskipun Pujon Kidul hanya memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan, beliau yakin bahwa langkah *branding and positioning* dapat menarik wisatawan Batu untuk berkunjung ke Desa Pujon Kidul. Pemikiran Udi Hartoko saat itu sesuai dengan penjelasan Hesselbein, Goldsmith & Somerville (2002) bahwa kreativitas sebagai basis inovasi dapat berawal dari masalah atau peluang dan dalam kasus Pujon Kidul, peluang pengembangan pariwisata menjadi titik awal kemunculan inovasi.

- a) Gagasan besar pembangunan pariwisata Pujon Kidul mulai dilaksanakan Udi Hartoko pada tahun 2012. Saat itu beliau mengubah lahan dengan status hak pakai bagi kepala desa

(bengkok) menjadi Cafe Sawah. Inisiatif ini selain merespon fenomena cafe yang sedang naik daun juga merupakan bentuk respon terhadap media sosial berbasis fotografi yang juga sedang marak di kalangan anak muda. Meskipun dengan modal yang sangat minim, langkah tersebut ditanggapi para wisatawan secara positif. Desa Pujon Kidul mulai dikenal karena keberadaan Cafe Sawah.

- b) Pembangunan pariwisata Pujon Kidul menjadi semakin berkembang pesat seiring kemunculan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2015 pembangunan infrastruktur pariwisata Cafe Sawah mendapat dukungan yang sangat besar dari keberadaan Dana Desa. Pembangunan cafe sawah yang memang membutuhkan perhatian lebih pada aspek pembangunan infrastruktur pada akhirnya memperoleh jawaban dengan kemunculan Dana Desa.
- c) Seiring perkembangan dan keberadaan Cafe Sawah, para pemilik lahan pertanian di sekitar Cafe Sawah juga tertarik untuk mengubah lahannya menjadi wahana wisata hingga akhirnya muncul The Roudh 78, Rumah Budaya dan wahana lain yang dimiliki warga secara personal. Meskipun dimiliki dan dikelola secara personal, wahana-wahana wisata tersebut menggunakan tenaga kerja yang hanya berasal dari wilayah Desa Pujon Kidul. Selain itu, sebesar 10% keuntungan yang mereka dapatkan akan diberikan kepada Pemerintah Desa Pujon Kidul.

Untuk memaksimalkan dampak dan pemanfaatan potensi desa, Udi Hartoko juga menginisiasi konsep desa wisata dalam aktivitas wisata edukatif. Aktivitas wisata di bidang pertanian dan peternakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani dan peternak di Pujon Kidul. Untuk mendukung aktivitas pariwisata, meningkatkan taraf hidup warga dan bahkan memberikan dampak yang lebih luas, konsep homestay juga diterapkan oleh Udi.

Terkait dengan kemunculan homestay, awalnya pemerintah desa mengumpulkan warga desa untuk melakukan sosialisasi visi besar pariwisata Pujon Kidul. Warga diberi pemahaman bahwa pariwisata Pujon Kidul tidak akan berkembang serta membawa dampak signifikan apabila tidak didukung kegiatan lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah desa kemudian mensosialisasikan konsep homestay kepada para warga desa. Homestay akan dijalankan dengan mekanisme kerjasama.

Untuk setiap kamar rumah warga yang dihargai sebesar Rp 150.000,00, para pemilik homestay akan memperoleh uang sebesar Rp 100.000,00. Uang sebesar Rp 50.000, akan dibagikan kepada koordinator lapangan pengelola homestay serta pengadaan maupun perawatan fasilitas homestay meliputi spreng, handuk, teko pemanas air, rak, gantungan baju dan lain sebagainya. Langkah ini dilakukan agar homestay di Pujon Kidul memiliki standar yang jelas. Saat ini telah terdapat 30 rumah warga yang digunakan untuk homestay dan 85% dari rumah tersebut telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Selain visi besar di bidang pembangunan pariwisata, Udi Hartoko juga menjadikan pengelolaan air secara terpadu sebagai fokus utama pembangunannya. Program ini lahir dari inefisiensi penggunaan air bersih oleh warga. Perilaku penggunaan air yang kurang bijak oleh warga Pujon Kidul dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan air bersih pada masa yang akan datang. Penggunaan air yang kurang bijak oleh warga juga disebabkan karena pengelolaan air di Desa Pujon Kidul awalnya dikelola secara terdesentralisasi oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat.

Merespon fenomena tersebut akhirnya pada tahun 2015 dilakukan musyawarah bersama warga masyarakat. Pada kesempatan tersebut dilakukan penjelasan bahwa ketersediaan air bagi seluruh warga menjadi kepentingan bersama yang seharusnya diperhatikan. Penggunaan air secara tidak efisien dapat menjadi ancaman ketersediaan air pada masa yang akan datang. Berdasarkan langkah musyawarah tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan program pipanisasi dan pengelolaan air secara terpadu.

Inovasi lain berupa TPST juga menjadi salah satu bentuk inovasi yang tidak berhubungan secara langsung dengan pariwisata Pujon Kidul. Inovasi ini berawal dari permasalahan perilaku pengelolaan sampah oleh warga yang kurang baik. Sebelum dibentuk TPST, warga cenderung membuang sampah rumah tangga secara sembarangan atau bahkan membakar serta menimbun sampah secara kurang bijak. Sampah rumah tangga yang dihasilkan kemudian langsung ditimbun tanpa terdapat langkah pemilahan.

Berdasarkan fenomena tersebut, dilakukan langkah musyawarah dan disepakati bahwa akan dilakukan pengelolaan sampah secara kolektif dan setiap KK akan dikenai retribusi sebesar Rp 3.000,00 untuk

setiap bulan. Meskipun pemerintah desa dapat dikatakan hampir tidak mendapatkan keuntungan ekonomi namun program ini juga muncul seiring pengembangan pariwisata Pujon Kidul yang pesat. Melalui TPST diharapkan pembangunan pariwisata Pujon Kidul semakin berkembang karena kebersihan lingkungan desa terjamin.

Seiring kemunculan UU 6 tahun 2014 akhirnya aktivitas pariwisata, PAMDes dan TPST menjadi ranah pengelolaan BUMDes Pujon Kidul. Secara mendasar terdapat 6 bidang kerja BUMDes Pujon Kidul yaitu Cafe Sawah, PAMDes, TPST, Voucher Wisata, Pertanian dan Perbankan. Secara aktivitas, voucher wisata sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cafe Sawah namun karena nominal ekonomi yang diperoleh cukup besar maka voucher wisata secara pengelolaan dipisahkan dari aktivitas Cafe Sawah.

Setiap pengunjung yang berwisata ke Cafe Sawah akan memperoleh voucher sebesar Rp 8.000,00. Voucher tersebut telah meliputi biaya retribusi parkir sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 5.000,00 dapat digunakan untuk membeli makanan maupun minuman. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan transaksi pariwisata di Cafe Sawah.

Terkait pertanian, BUMDes memberikan pinjaman modal bagi para petani. Upaya ini dilengkapi dengan jasa pengelolaan perbankan yang diberikan BUMDes. BUMDes Pujon Kidul bekerjasama dengan Bank BNI menyediakan jasa pinjaman bagi warga masyarakat dengan bunga yang sangat rendah. Selain itu warga juga dengan mudah dapat mengakses bank untuk melakukan investasi atau menabung. Untuk setiap transaksi yang dilakukan di Bank BNI, BUMDes memperoleh pemasukan sebesar Rp 1.000,00 hingga Rp 2.000,00.

B.3. Dampak Inovasi

Berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pujon Kidul secara umum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terutama bagi pegawai Cafe sawah dan pemilik homestay. Secara spesifik keberadaan Cafe Sawah mampu menekan angka urbanisasi terutama bagi para pemuda desa. Dampak ini muncul karena para pegawai Cafe Sawah memperoleh gaji sebesar Rp 1.200.000,00. Nominal ini memang berada di bawah gaji pegawai cafe yang ada di Kota Malang yaitu sebesar 1.500.000,00. Meskipun demikian para pegawai Cafe Sawah enggan melakukan urbanisasi dan

bekerja di kota. Untuk dapat bekerja di Cafe Sawah, tidak diperlukan ijazah tertentu sedangkan untuk dapat bekerja di cafe Kota Malang, diperlukan ijazah minimal SLTA.

Selisih Rp 300.000,00 antara gaji yang mereka dapatkan dari Cafe Sawah dan gaji pegawai cafe di kota dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Meskipun terdapat selisih gaji, mereka tetap memilih bekerja di desa karena lokasi yang dekat dengan rumah tinggal. Para pegawai tidak memerlukan tambahan biaya untuk berangkat menuju tempat bekerja. Kondisi inilah yang kemudian secara efektif mampu menjadi alasan utama bagi para pemuda Pujon Kidul untuk tidak meninggalkan desanya.

Dampak peningkatan taraf ekonomi juga dirasakan oleh para pemilik homestay. Saat ini mereka telah menjadikan pengelolaan homestay sebagai sumber penghasilan utama. Meskipun tetap menjalankan pekerjaan sebagai petani dan peternak, pengelolaan homestay secara efektif mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tim peneliti, pemilik homestay rata-rata dapat memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp 750.000, 00 hingga Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Selain dampak ekonomi bagi warga, aktivitas pariwisata Pujon Kidul juga berimplikasi pada peningkatan pendapatan ekonomi desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Pujon Kidul sie.pujonkidul.desa.id, pada tahun 2018 Cafe Sawah telah memperoleh pendapatan sebagai berikut

Tabel 4.1. Pendapatan BUMDes Pujon Kidul (Januari-Oktober 2018)

Sumber Pendapatan	Besaran	Satuan
Cafe Sawah	788,106,410	rupiah
PAMDes	1,000,000	rupiah
Pajak sudah terbayar	175,426,522	rupiah
Voucher Wisata	219,494,000	rupiah
Pengunjung Cafe (org)	120,945	orang

Data pendapatan BUMDes yang bersumber dari situs resmi Desa Pujon Kidul tersebut diolah secara *online* dan bersifat *real time*. Sistem informasi dalam situs tersebut secara otomatis akan mengubah jumlah pendapatan dari berbagai aspek pengelolaan BUMDes seketika saat berbagai transaksi terjadi. Mesin kasir Cafe Sawah, PAMDes, Voucher Wisata dan lain sebagainya terintegrasi dengan situs sie.pujonkidul.desa.id.

Keberadaan PAMDes di Desa Pujon Kidul juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan penyediaan air bersih bagi seluruh warga desa. Melalui pengelolaan air berbasis PAMDes, penggunaan air di Pujon Kidul menjadi lebih efisien. Subsidi infrastruktur pengelolaan air yang juga berhasil membuka akses air bersih bagi warga yang kurang mampu. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, seluruh warga Desa Pujon Kidul akan tetap memperoleh air bersih selama 40 tahun ke depan karena pengelolaan air yang dilakukan berada di bawah kendali PAMDes.

Bagi pemerintah Desa, keberadaan PAMDes juga menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah Desa memperoleh sekitar Rp 15.000.000,00 setiap tahun dari pengelolaan air oleh PAMDes. Pendapatan ini kemudian dapat dikelola kembali untuk perbaikan dan perluasan infrastruktur penyediaan air bersih bagi warga desa.

C. Faktor Pendorong Inovasi Desa

Berbagai inovasi yang muncul di Desa Pujon Kidul tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim peneliti, keberadaan dana atau potensi desa bukanlah faktor utama yang mendorong terbentuknya inovasi di Pujon Kidul. Faktor-faktor mendukung kemunculan inovasi di Desa Pujon Kidul dapat dijelaskan sebagai berikut

a) Kepemimpinan

(visioner, modal intelektual, pengalaman, jaringan)

Hughes, Moore and Kataria (2011) menjelaskan bahwa kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kemunculan inovasi. Konsep ini juga berlangsung dalam proses inovasi Pujon Kidul. Kepemimpinan menjadi faktor utama yang mendukung kemunculan inovasi Desa Pujon Kidul terutama yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Udi Hartoko, sang kepala desa sangat terbuka dengan berbagai gagasan baru demi menciptakan pembangunan desa. Selain itu keberhasilan pengembangan pariwisata Pujon Kidul juga didukung oleh

kepemimpinan beliau yang sangat visioner. Target yang jelas pada setiap periode pembangunan menghasilkan proses pengembangan pariwisata yang sangat progresif. Inovasi kemudian selalu muncul dari kepemimpinan seperti ini dan bentuk inovasi tidak hanya berhenti pada Cafe Sawah namun juga inovasi lain seperti wisata edukasi, outbond dan berbagai atraksi lain yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

Pengalaman Udi Hartoko mengelola sektor pariwisata ketika menjadi general manager hotel juga menjadi aspek kepemimpinan yang krusial dalam pengembangan pariwisata Pujon Kidul. Melalui pengalaman yang matang dalam bidang pariwisata, Udi Hartoko mampu menyusun konsep yang aplikatif dan berkontribusi langsung pada pembangunan pariwisata Desa Pujon Kidul. Selain itu sifat beliau yang selalu terbuka juga menghasilkan kepemimpinan yang sangat berfokus pada penciptaan jaringan (*networking*) yang baik. Perusahaan travel dan pelaku usaha lain yang terkait dengan aktivitas pariwisata desa selalu dirangkul oleh Udi Hartoko demi pengembangan pariwisata desa yang signifikan.

b) Kelembagaan

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan mekanisme kelembagaan yang baik dan operasional dapat mendukung terciptanya langkah-langkah inovasi. Pasca kemunculan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pujon Kidul menjadi semakin inovatif dan berkembang. Desa Pujon Kidul mampu menginisiasi dan menjalankan kegiatan BUMDes secara sistematis karena terdapat payung hukum yang jelas. Selain itu keberadaan Dana Desa yang bersumber dari mekanisme tata aturan tentang desa juga mampu membawa langkah pengembangan pariwisata secara signifikan di Desa Pujon Kidul pada tahun 2015. Pengembangan pariwisata berbasis infrastruktur dapat diimplementasikan dengan baik melalui penganggaran yang bersumber dari Dana Desa.

c) Partisipasi Warga

Partisipasi warga Pujon Kidul menjadi satu dari sekian banyak faktor penting yang mendorong inovasi desa. Setiap gagasan baru yang dimunculkan oleh pemerintah desa direspon secara positif oleh warga. Dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa, tidak terdapat bentuk resistensi yang dilakukan oleh warga Pujon Kidul. Lingkungan masyarakat yang sangat partisipatif seperti ini tentu kemudian berkontribusi positif dalam percepatan pelaksanaan inovasi di Desa Pujon Kidul.

d) Geografi

Dalam pengembangan inovasi yang berbasis pariwisata, kondisi dan letak geografis menjadi faktor yang sangat penting. Pujon Kidul mampu bertransformasi menjadi desa wisata yang sangat dikenal karena selain manajemen pengelolaan yang baik, desa tersebut terletak di dekat pusat pariwisata Kota Batu Malang. Alun-alun Batu dan Jatim Park yang selalu ramai wisatawan dan relatif dekat dengan wilayah Pujon Kidul turut menjadi keuntungan bagi upaya pengembangan pariwisata Pujon Kidul. Selain letak strategis, kenampakan alam Pujon Kidul yang terdiri dari hamparan sawah dan perbukitan yang indah turut menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan.

D. Analisis Proses Produksi Produk Unggulan

a) Cafe Sawah

Cafe Sawah merupakan ide pembangunan awal yang terlaksana dan dibangun oleh pemerintahan desa. Inovasi ini muncul melalui visi besar menjadikan Pujon Kidul sebagai desa wisata. Cafe Sawah mempunyai sistem berbasis *website* untuk mengatur sistem keuangan kafe. Sistem yang dibangun tersebut sangat mendukung kegiatan pariwisata desa dalam aspek pemasaran maupun pencatatan data. Secara tidak langsung sistem tersebut dapat berimplikasi positif terhadap efisiensi tata kelola keuangan Desa.

Cafe Sawah sangat berorientasi pada aktivitas pemberdayaan masyarakat dimana seluruh karyawan cafe berasal dari pemuda-pemuda desa. Pemuda desa yang direkrut oleh cafe Sawah awalnya tidak memiliki pekerjaan sehingga keberadaan Cafe Sawah diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran. Untuk dapat menjadi pegawai Cafe Sawah terdapat sejumlah persyaratan yang relatif tidak memberatkan. Syarat utama bagi pemuda desa untuk dapat bergabung dengan Cafe Sawah adalah memperoleh persetujuan dari orang tua. Langkah ini dilakukan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar pada masa yang akan datang serta resistensi dari warga Pujon Kidul terhadap aktivitas pariwisata.

Karyawan Cafe Sawah memperoleh gaji sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan dan nominal tersebut belum termasuk fasilitas makan siang yang mereka peroleh. Sistem upah tersebut sangat direspon positif oleh para pemuda desa. Mereka tidak perlu melakukan urbanisasi untuk memperoleh penghidupan yang layak. Secara spesifik mereka juga tidak

memerlukan ijazah khusus untuk dapat mengakses lapangan pekerjaan dan mendapatkan upah yang memadai.

Untuk tahun 2018, pemerintah Desa Pujon Kidul menetapkan target pemasukan sebesar Rp. 700.000.000,00 dari aktivitas pariwisata Cafe Sawah. Target tersebut sangat mungkin dicapai karena hingga trimester pertama 2018, Cafe Sawah telah menghasilkan pemasukan sebesar Rp 400.000.000,00. Fenomena ini merupakan bukti bahwa Cafe Sawah mampu berkembang dan menjadi wahana pariwisata yang berkelanjutan.

b) Wisata Edukasi

Berkaitan dengan pembangunan sektor pariwisata, terdapat berbagai wahana selain Cafe Sawah. Wahana, aktivitas dan sarana pendukung pariwisata juga turut dibangun di Pujon Kidul yaitu Wisata Edukasi Pertanian dan Peternakan, Outbond, Tracking, Kesenian dan Budaya, Kuliner serta Homestay. Wisata Edukasi Pertanian dan Peternakan merupakan aktivitas pariwisata Desa Pujon Kidul yang diinisiasi berdasarkan potensi yang ada di desa. Aktivitas pertanian seperti bercocok tanam dan panen serta aktivitas peternakan seperti memberi pakan dan menyusui hewan ternak dikemas menjadi kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Aktivitas pariwisata tersebut tidak hanya diharapkan dapat menghibur namun juga dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan terutama bagi generasi muda dan anak-anak yang sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan.

OUTBOND
Fasilitas outbond yang disediakan meliputi paintball, ATV, trail juga area panahan. Untuk trail disediakan pula mini trail untuk anak. Panguunjung dapat menggunakan ATV atau trail di sirkuit maupun area pertanian. Berlibur menjadi lebih menyenangkan sambil mengasah ketangkasan di fasilitas outbond Pujonkidul.

WISATA EDUKASI
Sarana belajar bagi para wisatawan dalam mengenal dunia pertanian dan peternakan. Wisatawan diperkenalkan mengenai beberapa ilmu terkait pertanian seperti pemilihan bibit, perawatan sampai panen. Selain itu, dalam bidang peternakan wisatawan akan diajak pemerah susu secara langsung berikut dikenalkan sampai pada bagian pengolahan. Wisatawan diperkenankan membawa hasil panen yang dipetik sendiri langsung dari ladang sekaligus mendapatkan wawasan terkait pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan sendiri.

WISATA TRACKING
Menjelajahi flora maupun fauna khas dataran tinggi dengan disuguhkan keindahan relief alam pegunungan, seperti air terjun dan hutan pinus.

KESENIAN & BUDAYA
Parade kesenian dan budaya warisan leluhur yang terus dilestarikan oleh masyarakat.

KULINER
Menyajikan menu yang cocok untuk dinikmati bersama sejuknya suasana.

HOME STAY
Fasilitas yang disediakan untuk wisatawan yang ingin menginap di desa wisata Pujonkidul ketika menikmati paket liburan berhari-hari. Wisatawan akan diajak menjadi warga pedesaan lengkap dengan aktivitas sehari-hari seperti pemerah susu dan bertani.

pujonkidul.desa.id **Informasi Lanjut**

Gambar 4.4. Aneka Produk dan Jasa Pariwisata Pujon Kidul

c) The Roudh 78

The Roudh 78 merupakan wahana yang tidak kalah menarik dan wajib dikunjungi oleh para wisatawan ketika berkunjung ke desa Pujon Kidul, karena konsepnya yang menarik yaitu mengusung suasana koboi. Suasana ini terasa sangat berkesan dengan hamparan padang pasir yang luas dan dihiasi dengan rumah ala pedesaan di Amerika. The Roudh 78 merupakan tempat wisata milik personal dan bukan milik pemerintah sehingga perawatan untuk kawasan langsung dilakukan oleh pemilik usaha. Area The Roudh 78 berada di dekat Cafe Sawah sehingga wisatawan tidak perlu berjalan jauh ketika ingin melihat kawasan ini. Pemandangan dan suasana yang dibuat seakan-akan kembali ke masa 70an menjadi kesan dan daya tarik tersendiri ketika wisatawan berada disana.

d) Homestay

Homestay merupakan tempat penginapan yang disediakan oleh pemerintah desa melalui beberapa kelompok UMKM, pada awalnya homestay didirikan untuk mendukung tujuan utama desa yaitu menjadikan desa Pujon Kidul menjadi desa wisata, tetapi semakin lama homestay memberikan dampak yang signifikan secara ekonomi bagi warga sekitar. Warga pemilik homestay mendapatkan keuntungan tambahan dari aktivitas penyewaan tempat tinggal yang dapat digunakan oleh wisatawan Desa Pujon Kidul.

Homestay dikoordinasikan dalam kelompok masyarakat dan dari kelompok tersebut muncul tata cara, serta aturan-aturan dasar, aturan-aturan dasar dan standar operasional prosedur (SOP). Homestay di seluruh desa memiliki standar yang disesuaikan dan disusun oleh kelompok tersebut meliputi ukuran kamar, peralatan yang harus ada di dalam satu kamar, fasilitas rak dan alat pemanas air, handuk, serta kasur yang dilapisi dengan bed cover putih dan tidak lupa satu selimut berukuran king size.

Saat ini jumlah masyarakat yang menjadikan rumahnya menjadi homestay di desa Pujon Kidul berjumlah sekitar 30 rumah dan 80% diantaranya telah mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan bagi hasil pendapatan homestay diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk setiap kamar yang disewakan, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp. 150.000,00
- 2) Dari perolehan tersebut, Rp. 100.000,00 diberikan kepada pemilik

homestay dan Rp. 50.000,00 akan diberikan kepada koordinator lapangan pengelola homestay

- 3) Dari perolehan sebesar Rp. 50.000,00 tersebut pengelola homestay akan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalam kamar seperti sprei, handuk, tempat pemanas air, rak, gantungan dan sebagainya, sehingga pemilik rumah tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan peralatan yang sesuai standar yang ditentukan bersama.

e) Produk-Produk Pendukung Pariwisata

Untuk mendukung industri pariwisata di Pujon Kidul, muncul produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM setempat. Pada umumnya masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai peternak sapi dan petani sehingga hasil produk olahan berasal dari susu, beras, jagung, kentang, cabai, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut berbentuk makanan ringan yang berbahan dasar komoditas lokal Pujon Kidul. Beberapa jenis makanan ringan yang menjadi produk unggulan di Desa Pujon Kidul yaitu carang mas, stick susu, kerupuk susu, yoghurt, permen susu, jahe bubuk dan kunyit bubuk.

Pada awalnya ide tersebut didapat dari pertanyaan-pertanyaan seperti, "ketika wisatawan datang apa yang dapat mereka bawa pulang nantinya? atau oleh-oleh khas desa apa yang bisa dibawa oleh para wisatawan?". Dari pertanyaan tersebut kemudian para warga berinisiatif membuat produk-produk makanan ringan yang bersifat khas dan dapat dijadikan sebagai buah tangan.



Gambar 4.5. Hasil Produksi UMKM

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, diperoleh beberapa pembelajaran penting dari dinamika inovasi yang dilakukan oleh Desa Pujon Kidul. Faktor utama yang menjadi pendorong kemunculan inovasi di Pujon Kidul adalah kepemimpinan kepala desa. Udi Hartoko yang merupakan mantan general manager hotel memiliki konsep yang matang mengenai pembangunan pariwisata. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang memiliki pengalaman serta konsep yang jelas menjadi sangat penting bagi upaya inovasi di sebuah desa.

Selain kepemimpinan yang berpengalaman dan memiliki konsep, kepemimpinan terbuka menjadi sifat pemimpin yang juga perlu dikembangkan untuk mewujudkan inovasi desa. Meskipun memiliki pengalaman di bidang pariwisata yang jauh melebihi masyarakat Pujon Kidul, Udi Hartoko tetap terbuka terhadap ide-ide baru dari semua pihak. Pemikiran ini terlihat dari musyawarah atau jaring aspirasi yang selalu dilakukan pemerintah desa.

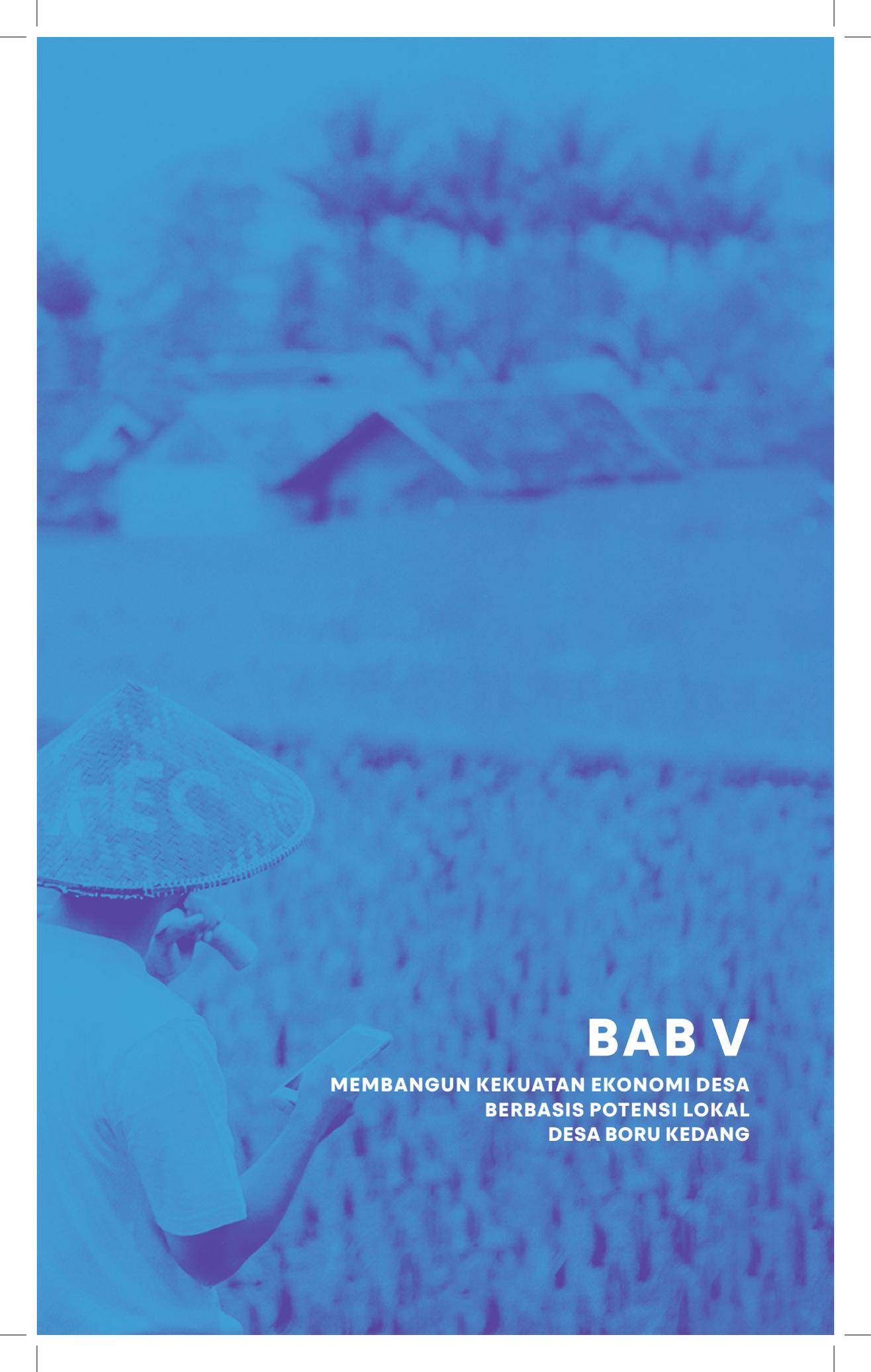
Langkah musyawarah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan aspek inovasi desa. Pemerintah tidak dapat memberikan dan mengimplementasikan ide tanpa dukungan masyarakat. Kepemimpinan kolaboratif menjadi penting dalam menumbuhkan komitmen masyarakat terhadap inovasi. Melalui langkah kolaborasi, masyarakat juga akan terlatih mengembangkan, mendukung serta mengimplementasikan berbagai ide-ide baru.

Pembelajaran berikutnya yang dapat diperoleh dari kasus Pujon Kidul adalah aspek pendanaan sebagai pendorong inovasi desa. Di era otonomi desa seperti saat ini ternyata Pujon Kidul tidak menempatkan Dana Desa sebagai faktor yang paling penting dalam inisiasi inovasi yang mereka lakukan. Dana desa dibutuhkan untuk pengembangan inovasi namun kemunculan inovasi lebih didorong oleh kepemimpinan yang terbuka dan visioner serta faktor partisipasi warga masyarakat.

Penjelasan mengenai kontribusi Dana Desa tersebut sebaiknya perlu menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain di Indonesia yang memiliki perhatian dalam pengembangan inovasi. Keberadaan Dana Desa perlu dimaknai sebagai stimulus dan bukan faktor utama sebagai syarat terbentuknya inovasi. Konsep dasar yang jelas serta inisiasi langsung lebih diperlukan untuk memulai inovasi dibandingkan pendanaan yang besar.

Selain kontribusi berbagai faktor dalam inovasi, melalui penelitian pada Pujon Kidul dapat disimpulkan bahwa inovasi desa terutama dalam bidang pariwisata memberikan dampak yang positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak lanjutan dari peningkatan ekonomi masyarakat adalah masalah pencegahan urbanisasi. Inovasi pariwisata Desa Pujon Kidul terbukti mampu menjawab permasalahan urbanisasi yang selalu menjadi masalah besar bagi desa-desa di Indonesia. Kesempatan kerja dengan sistem rekrutmen yang lebih fleksibel serta penggajian yang lebih baik menjadi dua faktor utama yang mampu mencegah penduduk usia produktif berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan.

Pembelajaran ini memberikan makna bahwa saat ini penduduk usia produktif perlu membangun desanya. Di era otonomi daerah seperti saat ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Desa telah menjadi pusat inovasi dan ekonomi karena saat ini pembangunan yang berkelanjutan justru dimulai dari tingkat lokal. Dari kasus Pujon Kidul juga dapat dipahami bahwa peluang untuk menjadikan desa sebagai pusat ekonomi semakin terbuka dengan dukungan perbaikan infrastruktur serta perkembangan teknologi informasi.



BAB V

**MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI DESA
BERBASIS POTENSI LOKAL
DESA BORU KEDANG**

BAB V

MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI DESA BERBASIS POTENSI LOKAL

DESA BORU KEDANG

KECAMATAN WULANGGITANG, KABUPATEN FLORES TIMUR - NTT

Pius Sugeng Prasetyo^a, Theresia Gunawan^b, Daniel Hermawan^c

A. Gambaran Umum Desa Boru Kedang

Desa Boru Kedang merupakan salah satu dari desa-desa yang berada di Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur, propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari sebelas desa di kecamatan Wulanggintang. Desa ini lebih diwarnai oleh kawasan perkebunan dan pertanian. Sebagaimana yang nampak menonjol bahwa perkebunan desa ini didominasi oleh perkebunan kopi dan utamanya adalah kemiri yang pada akhirnya menjadi salah satu produk andalan perkebunan.

Kondisi alam khususnya yang terkait dengan perkebunan yang ada di desa ini mendorong pemerintah daerah setempat untuk menjadikan desa Boru Kedang sebagai tempat wisata melalui konsep pengembangan Hutan Kemasyarakatan menjadi kawasan pariwisata.⁶⁶ Sebagaimana diketahui bahwa di desa ini banyak spot menarik. Ada lima air terjun selain Wair Poar yang telah dikenal kalangan luas. Semuanya itu memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Ada juga *nuba nara* dan rumah adat. Baik air terjun, *nuba nara* dan rumah adat itu semuanya berada dalam kawasan

^a Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

^{b c} Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

⁶⁶ Jadikan Hutan Boru Kedang Surganya Wulanggintang, balinewsnetwork.com, Desember 5, 2017

hutan kemasyarakatan. Secara geografis Desa Boru Kedang berbatasan dengan beberapa desa seperti: Sebelah Utara : Desa Boru, Sebelah Timur : Desa Hewa, Sebelah Selatan Desa Ojan Detun dan Sebelah Barat : Sudah berbatasan dengan Kabupaten Sikka.

Potensi alam yang dimiliki khususnya hutan dan keindahan yang ada didalamnya tersebut yang akhirnya mendorong upaya untuk menjadikan potensi tersebut sebagai modal untuk mengembangkan desa Boru Kedang sebagai Kawasan Wisata. Memang hingga saat ini belum nampak secara jelas peta jalan (*road map*) desa Boru Kedang untuk menjadi desa wisata. Namun di sisi lain potensi yang ada di dalam hutan tersebut sudah dikembangkan menjadi sumber kekuatan ekonomi desa. Salah satu yang akan dijelaskan adalah pemanfaatan sumber air yang kemudian diolah dan diproduksi menjadi air minum kemasan yang akhirnya menjadi produksi andalan Desa Boru Kedang.



Gambar 5.1. Peta Desa Boru

Tulisan ini merupakan hasil observasi / penelitian yang pada dasarnya untuk menunjukkan inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Boru Kedang dalam menopang dan memperkuat ekonomi desa yang dapat menjamin kemajuan dan keberlanjutan desa.



Gambar 5.2. Kantor Kepala Desa Boru Kedang

B. Membangun dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Boru Kedang dalam membangun kekuatan ekonomi desa dilakukan dengan berbagai cara dengan memperhatikan keberadaan sumber-sumber potensi yang dimilikinya baik dari aspek manusia, non manusia dan kelembagaan baik yang sudah dimiliki maupun yang diciptakannya. Semua aspek sangat diperhatikan secara integratif atau saling kait mengkait. Pada bagian berikut ini akan dipaparkan bagaimana alur pengembangan potensi ekonomi yang diawali dengan eksplorasi kelembagaan.

Secara organisasi, Desa Boru Kedang memiliki beberapa organisasi yang bergerak di bidang ekonomi lokal:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boru Kedang
- b. Koperasi Serba Usaha (KSU) Jantan
- c. BUMDes bersama di tingkat kecamatan. (Saat ini belum beroperasi)

B.1. Badan Usaha Milik Desa “Tanah Bojang”

Salah satu langkah yang disarankan oleh pemerintah dalam rangka menopang dan mengembangkan kehidupan ekonomi di perdesaan adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sangat disadari bahwa tujuan utama dari kebijakan pemerintah bukan semata-mata didirikannya BUMDes, melainkan agar kebijakan tersebut dapat mendorong dan menjamin keberlanjutan berbagai aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa BUMDes desa Boru Kedang memiliki 4 jenis usaha, yakni:

- a. Usaha Perkreditan Desa (“Anggur Merah” dan “Gerbang Emas”)
- b. Sektor wisata budaya menganyam dan latihan tenun ikat
- c. Air minum dalam kemasan (Boru Kedang Citra Mandiri (BCM))
- d. Bidang pertanian di bidang penyediaan pupuk kimia dan organik

B.1.1. Perkreditan Masyarakat

Kegiatan perkreditan ini dimulai sejak tahun 2013. Perkreditan rakyat dimodali oleh pemerintah dengan program Gerakan Pembangunan Peningkatan Ekonomi Masyarakat - “Gerbang Emas” dan Anggaran Pembangunan Untuk Rakyat Menuju Sejahtera - “Anggur Merah” masing-masing Rp 250 juta untuk simpan pinjam. Kegiatan ini tentu saja mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari warga Desa Boru Kedang dengan demikian banyak warga yang memanfaatkan kegiatan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa bahwa hingga saat ini ada 100 (seratus) lebih warga desa yang menjadi anggota usaha perkreditan desa ini. Sayangnya, penggunaan perkreditan yang diakses oleh masyarakat masih belum memenuhi pemodalan untuk usaha produktif. Banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtif, akibatnya banyak kredit yang macet. Namun demikian hingga saat ini usaha perkreditan desa ini telah memiliki omset sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sehingga bisa dikatakan bahwa ada peningkatan dalam usaha ekonomi desa melalui perkreditan. Langkah ini tentu saja juga sangat memberikan arti bagi peningkatan kesejahteraan warga desa dari sisi ekonomi. Memang belum dapat dipastikan secara rinci

sampai seberapa jauh peningkatan ekonomi masyarakat desa Boru Kedang. Namun demikian dengan peningkatan omzet tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perkreditan tersebut memberi dampak yang kontributif bagi ekonomi desa.

Berdasarkan fakta pemanfaatan kredit tersebut untuk keperluan pembelian barang konsumtif serta adanya beberapa kredit macet, maka dirasa perlu adanya langkah edukasi bagi masyarakat dan perhatian khususnya dalam memanfaatkan modal berapapun jumlahnya. Kredit-kredit yang hanya dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif memang pada akhirnya akan menjadi beban warga karena dana pinjaman yang diperoleh tidak dimanfaatkan tidak menghasilkan efek ekonomi produksi. Oleh karena itu diperlukan semacam penyuluhan atau pelatihan singkat bagi warga yang melakukan pinjaman khususnya dari lembaga seperti koperasi. Dengan demikian usaha perkreditan untuk masyarakat ini dapat terus berjalan dapat memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan.

B.1.2. Potensi Wisata Desa

Desa Boru Kedang memang dikenal sebagai desa yang mempunyai potensi keindahan alam yang menarik. Hal ini kemudian menumbuhkan tekad bagi warga dan aparat desa untuk mengembangkan desa menjadi desa wisata. Keinginan untuk mewujudkan desa wisata ini juga didukung oleh pemerintah daerah setempat khususnya pemerintah di Kecamatan Wulanggintang yang menegaskan bahwa Desa Boru Kedang ditetapkan sebagai kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata desa. Tekad ini tentu saja didasarkan pada sumber-sumber alam yang terdapat di Desa Boru Kedang yang sangat mendukung untuk pengembangan kawasan wisata desa. Sebagaimana yang dapat dilihat bahwa Desa Boru Kedang lebih banyak didominasi oleh perkebunan dan hutan yang menutupi kawasan perbukitan, serta terdapatnya air terjun yang akan menjadi daya tarik para pengunjung.



Gambar 5.3. Potensi Wisata Air Terjun Wair Poar – Desa Boru Kedang

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa sudah ada rencana untuk mengembangkan pariwisata desa dengan konsep Eco-Wisata. Untuk realisasi hal ini akan dilakukan dalam format kerjasama antara Desa Boru Kedang dengan Dinas Kehutanan dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Tekad yang ingin diwujudkan adalah bahwa Desa Boru Kedang bersamaan dengan pengembangan konsep wisata adalah dengan mengangkat produk kopi yang bisa menjadi icon desa. Alam pegunungan yang dimiliki oleh desa Boru Kedang sangat mendukung untuk mewujudkan impian menjadi desa wisata dengan kekhasan minuman kopi yang bisa dinikmati tengah alam pegunungan.

Pengembangan sektor wisata dilakukan dengan pelatihan peningkatan kapasitas pada masyarakat. Kegiatan pelatihan ketrampilan dilakukan di suatu tempat yang dinamakan “Rumah Belajar Kreatif”. Ketrampilan yang dilatihkan adalah menganyam bambu dan latihan tenun ikat. Materi kegiatan pelatihan ini diberikan oleh warga yang sudah mempunyai kemampuan untuk membuat tenun ikat. Dengan demikian ada proses

saling belajar antar warga masyarakat desa. Dari pelatihan ini sudah memberikan dampak yang positif dalam peningkatan ekonomi warga desa. Hal ini terlihat dari mulai adanya pemesanan atas produk-produk tenun ikat. Pemesanan bahkan juga sudah dilakukan oleh warga dari luar daerah khususnya dari Jakarta.



Gambar 5.4. Anyam Bambu yang Dilombakan - Sumber Foto: Hengky Ola 2017

Selain pengembangan produk kerajinan yang terus dikembangkan, maka upaya untuk mengembangkan potensi wisata di desa Boru Kedang setiap tahun juga diselenggarakan Festival Budaya yang menampilkan berbagai aneka penampilan budaya baik yang berupa tarian, ritual, dan juga aneka kerajinan yang merupakan produk khas dari desa Boru Kedang.

Gagasan untuk mewujudkan Desa Wisata tersebut tentu saja harus didukung oleh berbagai fasilitas yang secara minimal harus dipenuhi. Secara fisik memang masih menunjukkan perlunya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya desa wisata tersebut. Sebagai contoh peningkatan kualitas jalan untuk menuju beberapa titik obyek wisata yang ada di desa ini. Dengan adanya peningkatan infra struktur jalan ini akan memudahkan akses bagi mereka yang akan

berkunjung di obyek wisata seperti air terjun. Dilain pihak juga perlu adanya penyiapan masyarakat agar mempunyai kesiapan dan penyesuaian terhadap keterbukaan yang merupakan konsekuensi dari keinginan untuk menjadikan desanya menjadi desa wisata dimana kemungkinan akan terjadinya perubahan sosial yang mungkin diintroduksi oleh berbagai kunjungan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

B.1.3. Pengolahan Air Minum

Sebagaimana kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Boru Kedang, bahwa selain kekayaan dalam hal perkebunan dan perhutanan, maka desa ini juga memiliki kekayaan alam yang lain yaitu terdapatnya sumber-sumber mata air. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Boro Kedang mempunyai 6 (enam) titik mata air yang dapat menjadi sumber air minum bagi warga desanya. Selama ini seluruh warga desa dapat mengambil dan mengkonsumsi air dari mata air tersebut secara bebas. Belum ada upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan air minum yang dikelola secara bisnis untuk warga desa. Namun seiring dengan perkembangan dan pengetahuan yang dimiliki maka desa Boru Kedang sudah melakukan langkah dalam kaitannya dengan pengelolaan air minum yang bersumber dari potensi sumber air yang dimiliki tersebut. Langkah ini juga dapat dikatakan merupakan inovasi yang berdimensi ekonomi, mengingat potensi alam yang dimiliki kemudian dikelola dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi desa, serta menimbulkan efek peningkatan kesejahteraan bagi warga desa khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi. Sebenarnya ide awal berawal dari pemikiran Kepala desa melihat sumber daya mata air yang berlimpah di desa Boru Gedang. Mata air yang jernih dan murni menginspirasi kepala desa untuk memproduksi air minum dalam kemasan. Ide tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, masyarakat bersedia untuk menjalankan ide tersebut dengan honor yang sangat terbatas. Ide diuji dengan mengirimkan sampel air minum ke instansi pengukuran standar laboratorium standar air minum di ITS Surabaya dan hasilnya air hasil produksi desa memiliki kualitas di atas SNI.

Langkah inovasi yang diwujudkan adalah melakukan usaha air minum dalam kemasan galon yang sudah dimulai sejak tahun 2017 yang diberi nama Boru Kedang Citra Mandiri – BCM yang hingga saat ini sudah mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 6 – 8 juta per bulan. Pengolahan air

minum yang dilakukan oleh BUMDes Boru Kedang dapat menghasilkan 30 galon per hari. Setiap galon diberi harga Rp 5.000 apabila warga desa membeli dengan datang langsung ke tempat pengolahan air minum. Harga Rp 6.000 kalau diantar rumah di desa Boru Kedang, dan harga Rp 7.000 kalau diantar ke luar desa/daerah. Galon tersebut dipasarkan di KSU Jantan. Sebenarnya BCM punya potensi memproduksi 200 galon per hari, hanya kapasitasnya masih terbatas 38 galon. Jika ingin menyerap kapasitas produksi maksimal, maka penyediaan galon harus 1.200 galon dengan biaya 1 galon Rp 80.000.

Pemberian nama produk tersebut dengan menggunakan nama desa “Boru Kedang” pada hakekatnya juga ingin menegaskan adanya kearifan lokal yang ingin diangkat dalam produk air minum tersebut. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan, dan lokal (local) atau setempat. Jadi arti kearifan lokal secara sederhana bisa dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Hal ini tentu saja akan dapat memberikan efek psikologis khususnya untuk meningkatkan kebanggaan warga desa bahwa desa Boru Kedang dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan warga desa dan sekaligus juga warga di desa-desa lainnya.

Informasi juga diperoleh berkaitan dengan aset gedung senilai Rp 130 juta, alat filter Rp 80 juta, mobil pick up Rp 140 juta, di mana pendanaannya berasal dari dana desa. Dalam pengelolaan usaha air minum ini sebenarnya pihak desa juga mendapat tawaran untuk kerja sama dengan pihak eksternal yang dalam hal ini adalah dengan PT. Aquamore. Namun tawaran kerja sama ini tidak dilakukan karena khawatir akan menghilangkan identitas branding lokal. Langkah ini menjadi suatu hal yang baik ketika pihak desa dapat menetapkan identitas dan kemampuannya dalam mewujudkan kemandiriannya bahkan dalam menentukan jati dirinya. Tentu saja kerja sama tetap harus dipandang sebagai langkah yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada diperdesaan. Prinsip kerja sama harus menghindari adanya upaya untuk memarginalkan salah satu pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Kerja sama memang sudah seharusnya tetap berpegang teguh pada prinsip yang saling mengembangkan dan menguntungkan semua pihak yang tergabung dalam suatu kerja sama.



Gambar 5.5. Instalasi Pengolahan Air Minum dari Sumber Air di Desa Boru Kedang



Gambar 5.6. Instalasi Pengolahan Air Minum dari Sumber Air di Desa Boru Kedang

Untuk menjaga kualitas air, maka pihak desa melakukan kerja sama dengan pihak eksternal khususnya perguruan tinggi, yaitu ITS Surabaya. Kerja sama ini sangatlah penting mengingat produk yang dihasilkan merupakan produk yang dikonstruksi oleh warga masyarakat yang harus dapat dijamin aspek kesehatannya. Dengan demikian kerja sama dengan pihak perguruan tinggi ini akan terus menjamin kredibilitas atau tingkat kepercayaan publik kepada produk yang dihasilkan.

INSTITUT TEKNOLOGI SURABAYA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN KIMIA
Kampus ITS Suroboyo Utara Pabelan
Telp. 031-5943353 Fax. 031-5922174 Email: kimia@its.ac.id www.its.ac.id

Kepada Yth
BUM DESA BORU KEDANG NTT
Di - Tempat

LAPORAN ANALISIS
Subyek Air Sumber Mata Air

No 565/112.1.1.43/PM/DE/2016
Tanggal 22 Desember 2016
Metode
Diteliti Oleh Falsi K

Tanggal diterima sampel: 16 Des 2016

No	Parameter Uji	Satuan	Syarat Air Minum No.452/Menkes/Per/V/2010	Hasil Analisa Air Sumur Bor	Metode
A Fisika					
1	Bau	-	-	Tak berbau	Organoleptik
2	Dissolved Solid	mg/l	500	95	Gravimetri
3	Kekeruhan	-	5	0,12	Turbidimetri
4	Rasa	-	-	Tak berasa	Organoleptik
5	Suhu	°C	Suhu udara	30	Termometri
6	Warna	Skala PCo	15	0	Spektrofotometri
B Kimia					
7	pH	-	6,5 – 8,5	7,34	pH metri
8	Air Raksa (Hg)	mg/l	0,001	<0,001	AAS
9	Aluminium (Al)	mg/l	0,2	<0,02	AAS
10	Arsen (As)	mg/l	0,01	<0,001	AAS
11	Besi (Fe)	mg/l	0,3	0,08	AAS
12	Boron (B)	mg/l	0,5	<0,01	Spektrofotometri
13	Barium (Ba)	mg/l	0,7	<0,01	AAS
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	<0,005	Spektrofotometri
15	Kadmium (Cd)	mg/l	0,003	<0,001	AAS
16	Kesabitan (CaCO ₃)	mg/l	500	66	Titrimetri
17	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	250	14	Argentometri
18	Krom (Cr6 ⁺)	mg/l	0,05	<0,005	Spektrofotometri
19	Mangan (Mn)	mg/l	0,4	<0,01	AAS
20	Natrium (Na)	mg/l	200	8	Flamefotometri
21	Nikel (Ni)	mg/l	0,07	0,00	AAS
22	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	50	0,04	Spektrofotometri
23	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l	3	<0,005	Spektrofotometri
24	Ammonia (NH ₃ -N)	mg/l	1,5	<0,01	Spektrofotometri
25	Seng (Zn)	mg/l	3	<0,002	AAS
26	Sianida (CN)	mg/l	0,07	<0,001	Spektrofotometri
27	Sulfat (SO ₄)	mg/l	250	0,56	Spektrofotometri
28	Sulfida (H ₂ S)	mg/l	0,05	<0,01	Titrimetri
29	Tembaga (Cu)	mg/l	2	<0,03	AAS
30	Timbal (Pb)	mg/l	0,05	<0,001	AAS
31	Detergen (LAS)	mg/l	0,05	<0,02	Spektrofotometri
32	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/l	10	2,42	Titrimetri
33	Sisa Klor (Cl ₂)	mg/l	5	<0,01	Iodometri
C Bakteriologi					
34	T. Coliform	MPN	0	0	Media Fermentasi

Catatan
Hasil analisis ini mengacu pada sampel yang diterima laboratorium Kimia ITS dan tidak dapat digunakan sebagai alat
pengambilan sampel tidak dilakukan oleh Laboratorium Kimia ITS

Hormat Kami
Jember, Prof. Dr. Dwik Prasetyoko, M.Sc
Head

Gambar 5.7. Hasil Pengujian Air Minum Oleh ITS

Hasil produksi air galon dipasarkan di 3 kecamatan dan desa-desa sekitar. Bentuk pemasaran yang dilakukan, yaitu membangun hubungan yang baik dengan warga dan desa-desa lain dengan memberikan air bersih ke desa-desa dengan biaya yang sangat murah, yaitu Rp 1 juta per dim dengan catatan desa-desa tersebut akan membeli kebutuhan air minum galon dari BCM.

B.1.4. Pengecer Pupuk Bersubsidi

Sebagian besar warga desa Boru Kedang pada dasarnya merupakan petani dan mengelola perkebunan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa kebutuhan akan pupuk yang merupakan barang utama bagi para petani sudah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagaimana para petani di desa-desa lainnya yang pada umumnya membeli pupuk dengan harga yang sudah sangat berbeda dari harga asal yang dalam hal ini adalah harga pupuk yang sudah diberi subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu kepala desa Boru Kedang berusaha keras untuk menembus akses pihak yang terkait langsung dengan penjualan pupuk dengan harga yang sudah diberi subsidi. Dalam hal ini Kepala Desa Boru Kedang telah berhasil melakukan negosiasi dan memperoleh kepercayaan untuk dapat bertindak sebagai distributor pupuk dengan harga sama dengan pupuk harga yang sudah bersubsidi. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat positif bagi para petani untuk dapat meningkatkan hasil pertaniannya karena tidak kekurangan pupuk yang harganya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan khususnya harga tersebut tidak dipermainkan oleh distributor atau pengecer yang selalu mengambil keuntungan yang besar.

Pengeceran pupuk bersubsidi untuk pertanian, BUMDes ini menjalankan usaha distribusi pupuk bersubsidi untuk 3 kecamatan di Flores, yaitu Kecamatan Wulanggintang, Kecamatan Ilebura, dan Kecamatan Titehena. Pupuk yang sudah berhasil dikomersialisasi adalah pupuk kimia, yaitu pupuk NPK dan pupuk Urea. Suplai pupuk tersebut diperoleh dari PT. Pupuk Kaltim untuk kegiatan penjualan, pupuk tersebut, BUMDes hanya mengambil keuntungan yang sangat kecil, yaitu untuk Urea hanya Rp 50 per kilogram dan NPK Rp 75 per kilogram.

JENIS PUPUK	PER Kg	PER KARUNG
• UREA	Rp. 1.800,-	Rp. 90.000,-
• ZA	Rp. 1.400,-	Rp. 70.000,-
• SP-36	Rp. 2.000,-	Rp. 100.000,-
• NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
• PETROGANIK	Rp. 500,-	Rp. 20.000,-

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV (Kios Resmi PT Petrokimia Gresik) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan sebagai berikut :
UREA = 50 kg ; ZA = 50 kg ; SP-36 = 50 kg ; PHONSKA = 50 kg ; Petroganik = 40 kg

Gambar 5.8. Harga Eceran Pupuk Bersubsidi

Adapun tujuan BUMDes memasarkan produk tersebut dengan harga yang sangat murah dikarenakan BUMDes mempunyai misi untuk menyejahterakan petani dengan kesempatan untuk mengakses pupuk bersubsidi sebagai perbandingan harga pupuk non bersubsidi harganya pupuk urea Rp 150.000 per karung, sedangkan untuk pupuk yang bersubsidi harganya hanya Rp 90.000 per karung. Untuk pupuk NPK non subsidi Rp 180.000, sedangkan subsidi harganya Rp 115.000. Jenis pupuk yang dijual ini tersebut memang yang kebanyakan digunakan oleh para petani khususnya untuk jenis tanaman di sawah seperti padi, Namun demikian BUMDes juga menyediakan jenis pupuk yang lain dengan harga non-subsidi.

Selain pupuk kimia, BUMDes juga sedang mengupayakan pembuatan pupuk organik. Untuk membuat pupuk organik ini BUMDes bekerja sama dengan Oxfam dan IPB Bogor. Warga dilatih untuk membuat pupuk kompos/organik dari kotoran sapi. Perencanaan jangka panjang, hasil olahan masyarakat akan dijual dengan menggunakan brand IPB karena brand IPB karena sudah diakui secara nasional dan punya reputasi yang baik. Selain itu, IPB juga membantu untuk menguji lab hasil pengolahan kotoran sapi untuk menjadi pupuk organik. BUMDes ini mempunyai jejaring dengan pihak eksternal, yakni PT. Kaltim secara langsung tanpa perantara atau pihak ketiga.



Gambar 5.9. Poster Pupuk Non Subsidi

Dari beberapa usaha ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Boru Kedang menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun aparat pemerintah desa mempunyai tekad yang sangat kuat serta tindakan nyata untuk mengangkat dan mengembangkan potensi baik manusia dan alam yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mereka mempunyai kesadaran dan akhirnya mendorong munculnya ide-ide kreatif untuk melakukan sesuatu terhadap kekayaan baik manusia dan potensi alam di desanya. Mereka tidak mau hanya berdiam dengan potensi alam yang dibiarkan memberikan hasil-hasil tanpa adanya upaya untuk mengolahnya agar menjadi lebih produktif. Langkah yang mereka lakukan memang menuntut adanya ketajaman berpikir dan memprediksi atas hasil dan akibat yang akan mereka hadapi ketika tindakan konkrit diwujudkan.

B.1.5 Pengembangan Potensi Desa Dengan Kelembagaan Desa

Tindakan yang berawal dari ide yang muncul tersebut seperti terlihat ketika potensi sumber air minum dikembangkan untuk menjadi salah satu sumber kegiatan yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi desa. Tindakan untuk mengolah dan mengelola air dari mata air yang ada di desa menjadi sumber air minum pada dasarnya merupakan tindakan yang semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan finansial saja. Tindakan ini telah menimbulkan dampak yang bergulir pada berbagai aspek baik dari sisi kesehatan, kelangsungan lingkungan hidup, termasuk juga pelebagaan.

Dengan dikelolanya sumber mata air menjadi menjadi air minum olahan, maka masyarakat bisa mengakses air minum yang dijamin kesehatannya. Pengolahan air minum dengan sistem pengolahan yang digunakan dapat menjamin tingkat kebersihannya. Dengan demikian masyarakat dapat dijamin kesehatannya jika mengkonsumsi air minum olahan tersebut. Dari aspek lingkungan hidup menunjukkan bahwa dengan pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh desa, maka hal ini bisa memberi jaminan akan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini prinsip pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan lingkungan hidup bisa lebih jelas yang dalam hal ini adalah BUMDes sebagai pihak pengelola. Lain halnya jika akses terhadap sumber air di mata air tersebut dilakukan oleh orang per orang maka hal ini akan dapat mengancam kelestarian alam atau terjadinya kerusakan lingkungan dikarenakan setiap warga akan membuat jalur atau saluran sendiri misalnya menggunakan slang-slang air dari sumber mata air sampai ke rumah masing-masing.

Aspek kelembagaan menjadi hal yang sangat signifikan untuk diberi catatan penting dari usaha pengolahan dan pengelolaan bisnis air minum tersebut. Dengan langkah tersebut menunjukkan bahwa desa Boru Kedang menjalankan usaha bisnisnya dengan pengelolaan secara professional. Mereka tidak hanya memikirkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat desa Boru Kedang saja, melainkan mereka juga memasarkannya sampai keluar desa di kecamatan-kecamatan kawasan Flores Timur. Dengan demikian jaringan pasokan mereka bangun secara luas sehingga secara ekonomi mendapatkan keuntungan dan jaminan akan keberlanjutan usaha ekonomi desa tersebut. Langkah ini tentu saja sangat menuntut kemampuan berwirausaha yang harus dimiliki oleh pengelola usaha tersebut. Dalam arti bahwa beberapa orang di desa Boru Kedang memang sudah mempunyai kredibilitas dalam mengelola kegiatan ekonomi tersebut.

Salah satu orang yang sangat diandalkan dalam menopang pengelolaan air minum kemasan galon ini adalah Kepala Desa Bapak Don Boruk. Orang ini yang menjadi pionir dan terutama kemampuannya dalam memimpin. Dari perbincangan yang dilakukan dengan Kepala Desa ini memang terlihat kemampuan manajerial yang dimilikinya. Disamping kemampuan dalam memimpin organisasi publik ditingkat desa, beliau juga mempunyai pengalaman dalam mengelola unit usaha ekonomi yang dalam hal ini adalah koperasi yang diberi nama Koperasi Jantan. Koperasi

yang ditangani ini memang bukan merupakan koperasi milik desa Boru Kedang, namun merupakan koperasi yang mempunyai wilayah kerja yang luas dan berlokasi di Kecamatan Wulanggitang. Ini berarti bahwa koperasi ini mempunyai wilayah kerja dan melayani secara luas. Koperasi ini yang meskipun bukan milik desa Boru Kedang, namun perannya yang sangat berarti dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, maka untuk koperasi ini akan dibahas dalam paragraf khusus.

B.2. Dukungan Jejaring Pendukung Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan Ekonomi lokal sebagaimana yang dilakukan di desa tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang dalam hal ini adalah lembaga-lembaga diluar desa. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh desa Boru Kedang bahwa usaha ekonomi yang dilakukan pada dasarnya sangat didukung oleh keberadaan dan peran koperasi dan juga lembaga non pemerintah. Hal ini juga akan menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak akan pernah bisa dilakukan sendiri mengingat adanya berbagai keterbatasan baik yang menyangkut isu sumber daya manusia maupun non-manusianya. Pada bagian berikut ini akan dipaparkan mengenai kedua lembaga yang berperan tersebut yaitu koperasi dan lembaga non pemerintah.

B.2.1. Koperasi Serba Usaha Jaringan Petani Wulanggitang (KSU Jantan)

Koperasi yang dibentuk di luar desa Boru Kedang mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di desa. Koperasi yang diberi nama Koperasi Serba Usaha - KSU Jantan berawal dari sebuah asosiasi (asosiasi Jantan) yang dideklarasikan pada 12 Mei 2007 di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang yang fokus kerjanya saat itu lebih kepada advokasi hak-hak rakyat (hutan, tanah, dan air). Sebenarnya gagasan, ide untuk melahirkan KSU Jantan ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 2002.

KSU Jantan sendiri merupakan singkatan dari Koperasi Serba Usaha Jaringan Petani Wulanggitang. Kata Wulanggitang dalam konteks ini lebih bermakna “bulan baru”, yang selalu memberi harapan baru, bahwa pada saat bulan baru (Wulan Gitang) petani berkeyakinan akan mendapatkan

tambahan penghasilan karena air laut surut (kemudahan mendapatkan hasil laut) dan madu lebah di hutan mulai bisa dipanen, dan untuk urusan kebun pada saat Wulan Gitang orang bisa “membaca” masa baik atau buruk untuk hidup petani dalam siklus musim tersebut;- dan untuk siklus hidup organisasi Jantan, Wulan Gitang boleh dipahami sebagai semangat baru, serta obsesi baru menuju masa depan yang lebih menjanjikan;

KSU Jantan didasari semangat kearifan lokal bahwa ciri khas masyarakat Lamaholot adalah “ada bersama” yaitu “Epu Boit Gelekat Gewayan” yang secara harafiah dapat berarti :” bersatu untuk saling membantu” dan “Baun Basa Koda kirin” yang artinya : “duduk,omong dan putuskan bersama’;- Model demokrasi ala Lamaholot ini selalu dijadikan roh dalam menggerakkan roda organisasi apa saja di bumi Lamaholot dan satu diantaranya yang sangat nyata adalah lembaga perkoperasian;- Salah satu dasar pemikiran ini pulalah yang menginspirasi para penggagas akhirnya bersepakat memilih bentuk koperasi sebagai pengalihan dari asosiasi.

Moto KSU Jantan : “Epu Boit Gelekat Gewayan : Bersatu untuk saling membantu”

VISI : Terwujudnya petani anggota laki-laki dan perempuan yang sejahtera, adil, mandiri dan berkelanjutan dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong

MISI : - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani anggota

- Memperkuat posisi tawar petani terhadap pasar melalui pengembangan bisnis pemasaran bersama
- Meningkatkan akses petani anggota terhadap kebutuhan sarana produksi pertanian melalui pengembangan JANTAN MART
- Meningkatkan akses petani anggota terhadap sumber daya finansial (modal) untuk pengembangan usaha tani melalui pengembangan simpanan usaha tani
- Meningkatkan kewirausahaan perempuan melalui pengembangan usaha yang berorientasi bisnis

KSU Jantan merupakan koperasi yang bergerak di bidang pemasaran komoditas bersama untuk produk-produk, seperti coklat, mete, kemiri, dan kopra. Pendirian koperasi ini dibantu dengan dana dari sebuah NGO yang bergerak di bidang pertanian, yaitu Veco Indonesia yang saat ini lebih dikenal dengan Rikolto Veco. Koperasi ini berdiri di tahun 2012 dan saat ini sudah memiliki anggota lebih kurang 1.000 petani. Omzet dari Koperasi Jantan ini sudah mencapai 300 juta dengan profit sebesar 25 juta per bulan. Selain Rikolto, ada bantuan dari PT. Mars Makassar, yakni bantuan untuk budidaya kakao.

Dampak dari keberadaan koperasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di desa Boru Kedang, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan pertanian. Petani mengetahui informasi pasar terkait dengan harga yang berlaku di pasaran karena masyarakat memasarkan produknya ke KSU Jantan yang telah menetapkan satu standar tertentu, sehingga dapat memenuhi standar dari PT. Mayora, sehingga petani selalu menjaga kualitas kakao nya. Sebagai dampak kualitas kakao yang selalu terjaga, maka nilai jual kakao petani juga mengalami peningkatan. Dengan jejaring yang dimiliki oleh Koperasi Jantan dengan PT Mayora, maka masyarakat Boru Kedang ikut mempunyai jejaring secara tidak langsung, namun dapat berdampak positif secara langsung khususnya yang berkaitan dengan akses informasi harga produk pertanian sesuai dengan harga pasar yang saat itu berlaku. Dengan demikian petani sangat diuntungkan dengan jejaring tidak langsung (indirect networking) yang dimiliki tersebut.

Koperasi KSU Jantan berlokasi di Desa Hokeng. Khusus untuk daerah NTT, istilah koperasi masih mendapatkan respon yang positif dari masyarakat yang ditunjukkan dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap koperasi. Hasil dari pertanian yang dipasarkan oleh KSU Jantan ditampung oleh PT. Mayora. KSU Jantan juga memiliki dua buah kendaraan untuk membawa hasil-hasil komoditas ke Maumere.

Dinamika kehidupan ekonomi di desa Boru Kedang selain ditopang oleh keberadaan dan peran Koperasi Jantan juga didukung oleh topangan ekonomi desa yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah - PAD. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Desa Boru Kedang yaitu memanfaatkan sebagian PAD yang dialokasikan untuk dana pendidikan. Dampak dari PAD terhadap kondisi kehidupan masyarakat adalah meningkatnya pendidikan generasi muda kearah pendidikan tinggi. Pemerintah desa memberikan

beasiswa kepada 20 mahasiswa selama 3 tahun berturut-turut (2015, 2016, 2017). Adapun besar dana yang dialokasikan untuk pendidikan lanjut adalah sebesar Rp 100 juta per tahun.

Program beasiswa tersebut telah berhasil meluluskan 15 orang mahasiswa S1 dan 1 orang mahasiswa S2. Pemerintah desa memiliki program peningkatan pendidikan tinggi dalam masyarakat dengan target 1 sarjana untuk 1 KK. Selain beasiswa untuk mahasiswa, pemerintah desa juga mengalokasikan dana untuk TK PAUD. Dana yang diberikan untuk TK PAUD tersebut dialokasikan untuk membebaskan seluruh siswa PAUD dari biaya uang sekolah.

Untuk menutup biaya operasional dan gaji guru yang seharusnya dibiayai dari uang sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah desa. Adapun alokasi dana untuk biaya sekolah Rp 60 juta, sedangkan untuk membiayai subsidi honor guru, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp 36 juta.

Sebagai kompensasi dari biaya sekolah yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah desa, orang tua siswa harus berkontribusi dalam menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak-anak mereka yang bersekolah di PAUD. Sekolah PAUD mewajibkan setiap anak untuk membawa bekal dan makan bersama di sekolah (harapannya orang tua menyiapkan bekal yang bergizi, sehingga dapat mengurangi angka stunting (kurang gizi) di Wulanggintang.

Pemerintah desa juga mempunyai visi untuk bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan di desa, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 60 juta - Rp 80 juta per tahun untuk membiayai tenaga kesehatan (perawat dan ahli gizi, obat-obatan, program kesehatan untuk ibu hamil, lansia, pendampingan masyarakat, dan posyandu bapak-bapak). Hal yang cukup menarik dari posyandu bapak-bapak adalah bapak-bapak diwajibkan untuk membawa anaknya ke posyandu.

Posyandu hanya menerima anak dan ibu yang didampingi oleh bapaknya. Bapak terlibat dalam mengetahui pelayanan di posyandu. Selain itu, para bapak juga diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai kesehatan dalam keluarga. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan genap (Februari, April, Juni, dst.) sebagai dampak dari bertambahnya pengetahuan dan kesadaran bapak-bapak dalam aspek kesehatan, peserta KB menjadi

meningkat dan laju pertumbuhan penduduk dapat lebih terkendali karena masyarakat mulai merasa malu kalau memiliki anak lagi di usia 40.

Program posyandu bapak-bapak ini mendapat apresiasi dari para peserta dalam sebuah forum desa di Jakarta. Dana desa juga mendukung terselenggaranya seremonial adat dan upacara-upacara adat yang diupayakan pelestariannya sebagai kearifan lokal. Sebagai contoh, ritual meminta hujan, acara potong kambing atau babi, pemerintah desa mendukung pelaksanaan seremonial adat ini agar masyarakat dapat mengenal dan mencintai adat istiadat setempat. Dana yang diberikan untuk lembaga adat adalah Rp 15 juta untuk pembelian hewan kurban dan sebesar Rp 5 juta per tahun per lembaga adat.

Untuk mendukung kemajuan teknologi informasi di desa, pemerintah juga memasang infrastruktur untuk akses internet sebesar Rp 30 juta per tahun. Adapun pemanfaatan internet sejauh ini masih hanya sebatas mengirim dan menerima e-mail dan WhatsApp Group. Pemanfaatan internet harus dapat ditingkatkan, sehingga menjadi lebih optimal.

B.2.2. Badan Usaha Milik Desa – BUMDes Bersama

BUMDes bersama di Kecamatan Wulanggiting merupakan hasil kesepakatan kerja sama antar desa yang terdiri dari 11 desa. Adapun latar belakang pendirian BUMDes bersama adalah keinginan pemerintah di tingkat kecamatan untuk membentuk konsep pemasaran bersama, terutama dalam pemasaran biji kemiri. Hasil dari biji kemiri desa banyak dipermainkan harganya oleh para pengepul dan pengijon.

Proses pengolahan biji kemiri secara umum memakan cukup banyak waktu dan energi jika diproses secara tradisional. Oleh karena itu, mempertimbangkan hasil potensi dominan dari desa, masalah pemasaran yang dihadapi potensi kemiri yang berlimpah di 11 desa, maka digagaslah BUMDes bersama dengan mengajukan proposal program bantuan kepada Kementerian Desa untuk mendapatkan mesin pemecah kemiri.

Mesin pemecah kemiri tersebut sudah didatangkan dan ditempatkan di Desa Boru Kedang dengan menempati lahan yang dihibahkan dari tanah hak milik Kepala Desa. Dipilihnya Desa Boru Kedang sebagai tempat pengoperasian mesin pemecah kemiri adalah ijin hutan kelola masyarakat (HKM) hanya dimiliki oleh desa Boru Kedang.



Gambar 5.10. Gedung Pemecah Kemiri

Tindak lanjut pertama yang dilakukan setelah mesin dipasang instalasinya adalah uji coba mesin pemanas. Dari hasil uji coba tersebut, ditemukan kendala kurangnya daya listrik untuk menjalankan mesin. Daya yang ada di tempat pengolahan adalah 1.300 watt, sedangkan kebutuhan adalah 5.000 watt. Kendala pengoperasionalan mesin pemecah kemiri selain daya listrik juga modal awal yang harus diberikan oleh setiap desa sebesar Rp 3 juta per tahun.



Gambar 5.11. Mesin Pemecah Kemiri

Hingga saat ini, kerja sama 11 desa terkait dengan pengoperasian hasil pemecah kemiri masih di godok untuk bentuk kerja sama bisnis yang dapat memberikan manfaat terbaik untuk 11 desa. Kendala lain yang sudah diperkirakan muncul berkaitan dengan pemasaran kemiri, apakah akan dipasarkan melalui tengkulak atau pengepul. Alternatif pemasaran bisa melalui koperasi Jantan dan kekurangan permodalan dapat diminimalisir dengan kerja sama bagi hasil dengan koperasi simpan pinjam.



Gambar 5.12. Biji Kemiri

Pada tahap awal pembentukan BUMDes Bersama ini memang muncul isu kelembagaan, pada dasarnya akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sebuah program yang nantinya akan sangat ditentukan oleh model kelembagaan yang ditetapkan. Kelembagaan yang dimaksud bisa bersifat top down, maupun bottom up. Dalam kasus pengembangan ekonomi desa, ternyata dihadapkan pada benturan kelembagaan yang diciptakan dari pemerintah pusat dan masyarakat setempat. Ini berkaitan dengan kasus pengembangan produksi biji kemiri yang merupakan potensi sangat besar di desa-desa yang ada di Kecamatan Wulanggitang.

Di satu sisi, masyarakat sudah mempunyai Koperasi Jantan (akomodasi kegiatan usaha desa-desa di Kecamatan Wulanggitang), di sisi lain pemerintah kecamatan mendorong untuk penggunaan BUMDes Bersama. Format kelembagaan perlu disesuaikan dengan konten lokal (kearifan dan aktivitas yang sudah diciptakan di tingkat lokal), sehingga format atau penamaan lembaga tidak harus mengikuti pola seragam yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan.

B.2.3. Yayasan Ayu Tani

Lembaga eksternal di luar desa Boru Kedang yang punya peran signifikan dalam pengembangan kehidupan ekonomi di kawasan Kecamatan Wulanggitang, khususnya di Desa Boru Kedang adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Ayu Tani. Lembaga ini merupakan sebuah LSM lokal yang berdiri tahun 1990 bergerak di bidang penguatan dan pemberdayaan petani dan bergerak untuk penguatan BUMDEs yang bergerak di bidang pertanian. Untuk pendanaannya, Ayu Tani bekerja sama dengan LSM internasional, seperti Rikolto Veco, Oxfam, KRKP Bogor, Burung Indonesia, dan CEPM Amerika. Sebagai NGO yang bergerak di bidang pertanian, Ayu Tani memberikan pelatihan dalam aspek teknik pertanian, namun belum menyentuh sampai ke entrepreneurship dalam bidang pertanian.



Gambar 5.13. Gedung Yayasan Ayu Tani



Gambar 5.14. Dialog dengan Kepala Yayasan Ayu Tani

Ayu Tani menjadi partner dari BUMDES Boru Kedang dalam memberikan analisis dan rekomendasi dalam bidang pertanian. Salah satu bentuk analisis Ayu Tani yang diterapkan kepada BUMDEs adalah kebutuhan penggunaan pupuk dalam meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Selama ini, masyarakat desa menanam padi dan mete tanpa menggunakan pupuk sama sekali, sehingga hasil produktivitasnya dinilai masih rendah.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, Ayu Tani menyarankan BUMDes untuk membangun kerja sama dengan PT. Kaltim yang bergerak di bidang pupuk kimia. Bentuk kerja sama yang digagas antara BUMDes Boru Kedang dan PT. Pupuk Kaltim adalah memberikan lisensi pengecer kepada BUMDes Boru Kedang. Bentuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Wulanggitang. Selain berperan dalam mengembangkan ekonomi di desa Boru Kedang, maka LSM ini juga sangat berperan dalam memberdayakan koperasi Jantan yang mana koperasi ini juga menjadi jejaring untuk pengembangan kehidupan ekonomi di Desa Boru Kedang.

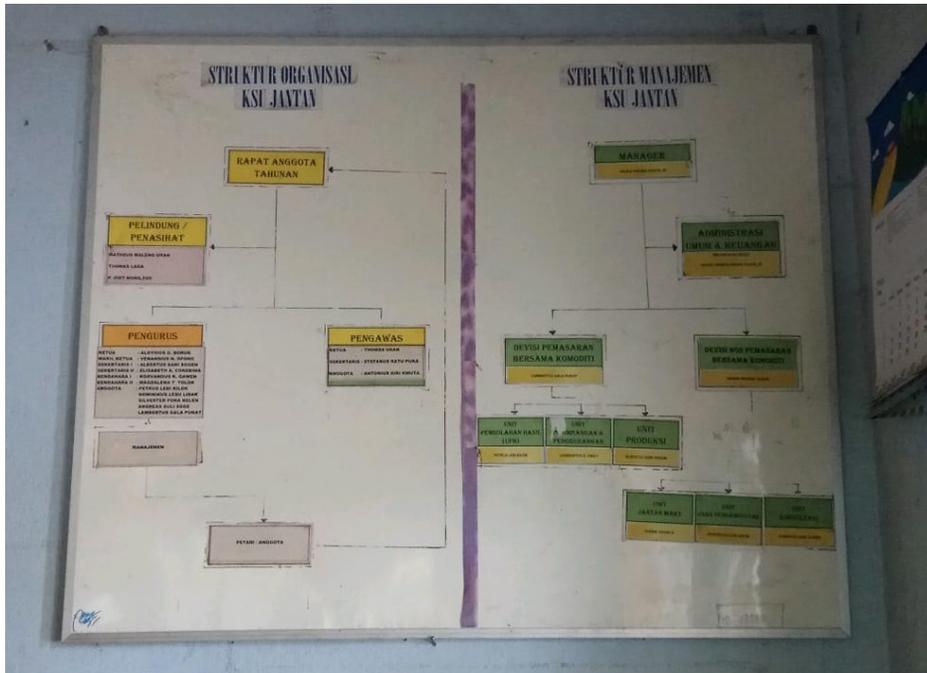


Gambar 5.15. Gedung KSU Jantan

Oleh karena itu sering dikatakan bahwa KSU Jantan merupakan buah dari LSM Ayu Tani yang didirikan tahun 1990 dan persiapan pendirian dimulai tahun 2007 - 2010. Mulai diresmikan tahun 2013. Bergerak di bidang komoditas pertanian, seperti kakau, mete, kemiri, kopra, alat-alat pertanian, pupuk, dan tidak bergerak di bidang simpan pinjam.

Jaringan yang dimiliki KSU Jantan dengan pihak eksternal, terutama yang dapat memasarkan produksi pertanian, salah satunya dengan pihak PT. Mayora. Alasan berjejaring dengan PT. Mayora dapat memberikan jaminan dan kepastian harga yang tidak dipermainkan.

Informasi harga selalu diberikan setiap hari, sehingga petani mengetahui secara pasti perubahan-perubahan harga. Koperasi Jantan pada dasarnya juga menjadi muara pemasaran dari produk-produk pertanian, sehingga para petani di Kecamatan Wulanggiting, khususnya produk dari Desa Boru Kedang dapat memasarkan hasil pertanian maupun usaha ekonomi lainnya, termasuk produk air kemasan. Tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Jantan adalah aspek manajerial karena orang-orang yang mengelola masih mempunyai keterbatasan kemampuan.



Gambar 5.16. Struktur Organisasi dan Struktur Manajemen KSU Jantan

Kerja sama yang dilakukan oleh Koperasi Jantan dilakukan juga dengan aktor lokal keagamaan, dalam hal ini adalah gereja (Paroki Maria Ratu Semesta Alam Hokeng). Contohnya pihak Paroki (1) mendampingi, (2) menyewakan gedung dengan sewa 3 juta setahun. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi unit usaha masyarakat yang ditopang oleh lembaga lokal yang ada.

Paroki mengizinkan lahan perkebunan kakao untuk dijadikan laboratorium praktik untuk para pengurus Jantan dalam pemberdayaan kapasitas teknis pengurus koperasi (cara menyortir kakao, mengeringkan kakao, mengolah kakao, dan menilai kualitas).

Selain itu, gereja juga memberikan dukungannya dalam bentuk penyebaran informasi keberadaan dan fungsi KSU Jantan di tengah-tengah masyarakat gereja. Pastor Paroki juga ikut mengawal pembentukan Jantan pada masa-masa awal kelahiran Jantan. KSU Jantan mempunyai kapasitas membeli 4 ton. Tujuan pendirian KSU Jantan adalah bisnis yang bisa memberdayakan masyarakat secara sosial dan KSU Jantan tidak mampu memenuhi pesanan dalam kuantitas yang besar karena keterbatasan nasional.

**KSU JANTAN
DATA PEMBELIAN & PENJUALAN KAKAO**

PERIODE	DONASE BELI		RENDEMEN		DONASE JUAL		RENDEMEN		HARGA BAHAN		NILAI JUAL			JLH PEGAMI		REB
	CMF	FAQ	CMF	FAQ	CMF	FAQ	CMF	FAQ	CMF	FAQ	CMF	FAQ	TOTAL	CMF	FAQ	
1. 10/11/2017					1066				28.000		29.228.000	37.325.000				1.280
2. 10/11/2017					1308.15				28.300		36.898.850	44.300.000				2.584.5
3. 10/11/2017					1370				28.200		38.576.000	44.300.000				3.959.5
4. 10/11/2017					670.5				28.500		17.167.500	18.000.000				11.637
5. 10/11/2017					880.5				28.400		19.405.500	18.000.000				5.441.5
6. 10/11/2017					641				27.300		17.491.800	16.000.000				6.045.5
7. 11/11/2017					462				24.500		11.321.000	12.000.000				6.504.7
8. 10/11/2017					1180				32.500		11.260.000	12.000.000				7.004.5
9. 10/11/2017					600.5				27.200		11.881.500	12.000.000				7.885
10. 10/11/2017					440.1				25.000		12.265.000	12.000.000				8.238
11. 10/11/2017					430.5				26.300		11.309.500	12.000.000				8.726.5
12. 11/11/2017					621.5				28.300		16.323.500	12.000.000				9.346
13. 11/11/2017					1.000				26.000		26.000.000	22.300.000				10.348
14. 11/11/2017					677.5				28.800		19.488.000	22.300.000				11.025.5
15. 11/11/2017					648				29.700		19.111.000	22.300.000				11.673.5
16. 11/11/2017					930.5				29.000		25.083.500	22.300.000				12.604
17. 11/11/2017					901.5				25.500		22.020.000	22.300.000				13.506.5
18.					580.0				25.500		11.777.500	14.300.000				580.5
19.					301				27.200		8.177.800	11.000.000				800.5
20.					3.5				4.500		15.588.000	22.300.000				100.5

Gambar 5.17. Data Pembelian dan Penjualan Kakao

Jejaring yang dilakukan KSU Jantan adalah Aliansi Petani Indonesia yang sekretariat nasionalnya ada di Jakarta. Untuk menambah modal, maka kemungkinan akan dilakukan peminjaman dana dari anggota. KSU Jantan sendiri tidak mempunyai asset tanah karena hak guna bangunan tersebut dimiliki oleh Paroki. Komoditas utama yang dijual adalah kakao dan mete. Bantuan dari pemerintah untuk KSU Jantan yang diberikan adalah 1 mobil pick up untuk operasional.



Gambar 5.18. Timbangan Elektronik KSU Jantan

C. Belajar dari BUMDes Bangkit Mandiri, Desa Nita - Kecamatan Nita

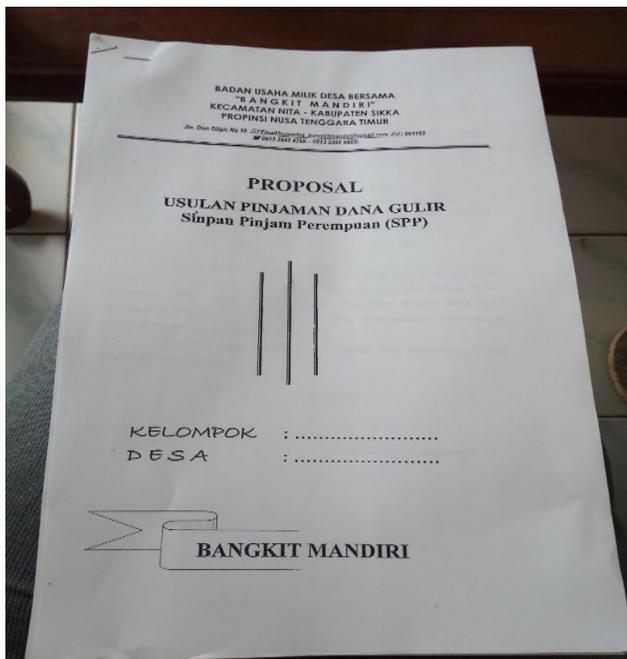
Eksplorasi yang dilakukan dalam rangka mengetahui dinamika perkembangan ekonomi lokal di tingkat desa sekaligus juga dilakukan di Kecamatan Nita, khususnya di Desa Nita. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan referensi perbandingan khususnya berkaitan dengan praktek BUMDes Bersama yang saat ini bisa dikatakan sudah berjalan dan mapan. Dengan demikian hal ini bisa digunakan sebagai referensi praktek baik (best practices) bagi desa-desa lain yang akan mengelola ekonomi desa dengan format BUMDes Bersama. Dalam hal ini keanggotaannya meliputi desa-desa yang bersepakat untuk menggabungkan diri dalam usaha ekonomi bersama tersebut. BUMDES bersama yang dibentuk pada tahun 2014 merupakan kelanjutan PMPM yang berakhir pada tahun 2014. Pengelolaan dana bergulir dari PMPM dilanjutkan dalam bentuk BUMDes bersama dari 12 desa di Kecamatan Nita. Modal awal dana bergulir dari PMPM sebesar 4,7 Miliar ditambahkan penyertaan modal dari 12 desa sebesar 575 juta rupiah. Selain menjadi lembaga pendampingan, BUMDes juga menjadi unit pemasaran. Ciri perbedaan BUMDes dengan lembaga lain adalah mempunyai semangat pemberdayaan.

Omzet BUMDes Bersama Bangkit Mandiri per bulan adalah sebesar Rp 250 juta - Rp 270 juta. Dengan profit sebesar 60 - 70 juta per bulan. Dampak dari keberadaan BUMDES Bangkit Mandiri adalah membantu

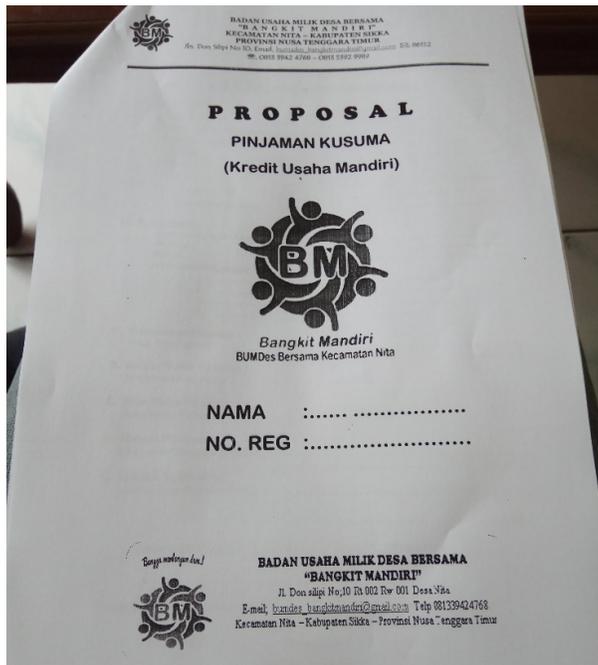
masyarakat untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan produksi dengan harga yang lebih murah dan membantu masyarakat untuk berhemat biaya transportasi (masyarakat tidak perlu berbelanja sampai ke Maumere). Maka di samping pemasaran, mereka juga melakukan pendampingan mulai dari saat penanaman sampai pemeliharaan produk pertanian. Kepengurusan BUMDes (lihat SK). BUMDEs ini juga bergerak di bidang simpan pinjam di samping penyedia alat-alat pertanian dan bahan tenun.

Dana yang sudah digulirkan ke masyarakat Rp 1,7 miliar untuk mengakses pinjaman tersebut masyarakat yang baru pertama kali ingin meminjam, maka plafon pertama yang diberikan adalah Rp 5 - 15 juta dengan jaminan sertifikat rumah dan BPKB. Pinjaman yang diberikan terdapat 2 jenis, yakni pinjaman kelompok dan perorangan. Pengajuan peminjaman harus dilakukan dengan pengajuan proposal yang harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing kepada desa.

Jika peminjam berhasil mengembalikan dana pinjaman sesuai jadwal, maka pada tahun berikutnya, maka dana pinjaman yang dapat 2 kali lipatnya, yakni Rp 10 - 30 juta. Demikian untuk tahun-tahun berikutnya. Jika peminjam tidak sanggup untuk memberikan jaminan sertifikat atau BPKB, maka peminjam akan dikenakan potongan biaya jaminan sebesar 1x cicilan pertama.



Gambar 5.19. Proposal Usulan Pinjaman Dana Gulir



Gambar 5.20. Proposal Pinjaman Kredit Usaha Mandiri

Untuk peminjam kelompok (jumlah anggota berkisar 7 – 15 orang) dikenakan sistem tanggung renteng sebesar 10% dari biaya pinjaman, tidak diperlukan sertifikat rumah dan BPKB. Untuk tahun 2018, ada sekitar 133 peminjam perorangan dan 15 peminjam kelompok yang mengakses pinjaman di Bangkit Mandiri. Bunga pinjaman untuk kelompok 1%, kalau perorangan 1,2% per bulan.

Persyaratan lain untuk meminjam dalam bentuk kelompok adalah para peminjam harus terdaftar di kantor desa dan proposalnya mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Untuk suplai bahan pertanian dan penenunan, BUMDes bersama mengambil dari salah satu kota besar di Jawa, kemudian dipasarkan di toko BUMDes dan dipasarkan ke pasar dengan menggunakan mobil kios berjalan. Harga yang ditawarkan oleh BUMDEs bersama dapat dikatakan cukup bersaing karena harganya jauh lebih murah. Misalnya harga yang dijual Rp 1 juta di luar BUMDEs, harga tersebut dijual Rp 700 ribu.

Selain menjual produk langsung kepada konsumen, BUMDes juga memasarkan produknya kepada Badan Usaha Milik desa yang ada di sekitar Kecamatan Nita. Sebagai contoh, BUMDes Cerminkasih Desa Buluutik mengambil bahan-bahan pertanian dari BUMDEs bersama. BUMDes

Domuskaritas Desa Lusitada membeli benang tenun dari BUMDes bersama, adapun harga jual yang diberikan BUMDes bersama kepada kepala desa jauh lebih murah dibanding harga langsung ke konsumen.

Di samping itu, BUMDes bersama juga bersedia membantu menjual hasil pertanian dari masyarakat untuk dipasarkan ke daerah lain. Contohnya membantu petani memasarkan tomat untuk dijual di Larantuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar BUMDes tidak saling berkompetisi, melainkan saling mendukung.



Gambar 5.21. Contoh Produk Kain Tenun yang Dijual di BUMDes Bangkit Mandiri



Gambar 5.22. Peneliti dan Pengurus Koperasi BUMDes Bersama Kecamatan Nita

Dampak lain adalah masyarakat terbantu permodalannya dalam upaya peningkatan operasional dan produktivitas dalam bidang pertanian maupun penenunan. Jika peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, BUMDEs juga menyediakan alternatif pembiayaan lain, yaitu hasil pinjaman dapat dikembalikan dalam barang yang diproduksi warga, misalkan kain tenun yang diproduksi yang akan dijual oleh BUMDes dan hasil dari penjualan tersebut akan dipotong dari cicilan dan sisanya akan dikembalikan pada warga yang meminjam.



Gambar 5.23. Kartu Nama BUMDes Bangkit Mandiri

Pengurus BUMDes Bangkit Mandiri terdiri dari 6 orang pengurus dan 12 orang BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa), masing-masing dibagi dalam tim kerja. Sebagai contoh tim verifikasi, tim pinjaman, tim pengawas internal. BUMDes BM bertanggung jawab kepada BKAD, kemudian BKAD bertanggung jawab melaporkan kepada Forum Kepala Desa setiap 3 bulan sekali. Tantangan dan rencana ke depan BUMDes BM belum memiliki website, sehingga keberadaan BUMDes Bangkit Mandiri belum diketahui oleh masyarakat di luar Kecamatan Nita.

Kemudian, rencana pembangunan BUMDes ke depan adalah pembuatan air minum dalam kemasan (cup), menjadi pengecer pupuk bersubsidi, membuat pom bensin di Kecamatan Nita dengan modal 2 miliar yang ditanggung oleh 12 desa.

D. Kesimpulan

- a. Pengembangan ekonomi lokal khususnya di desa Boru Kedang pada dasarnya merupakan hasil eksplorasi pemanfaatan atas potensi sumber yang dimiliki baik yang menyangkut potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Keterbatasan yang dihadapi oleh desa tidak menjadi penghalang dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Komitmen yang kuat yang dimiliki pimpinan desa yang didukung oleh partisipasi warga desa telah menjadi modal utama dalam mewujudkan ide dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan aspek kehidupan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan warga di desa Boru Kedang.
- b. Dalam upaya mengoptimalkan potensi yang ada di desa, prinsip kerja sama merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dari proses membangun ekonomi yang berkelanjutan di Desa Boru Kedang dan Kecamatan Nita. Kerja sama yang dilakukan hendaknya memiliki orientasi jangka panjang, adil dan saling menguntungkan pihak yang berkerja sama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang kelanjutan kerja sama adalah memasukkan rencana kerja sama dalam RPJM Desa.
- c. Dalam tahap awal pembentukan pelaksanaan kerja sama, ada beberapa tahap yang dapat dikaji lebih dahulu seperti:
 - i. *Kerja sama apa yang dibutuhkan, dari BUMDes Bersama yang dibentuk di Kecamatan Nita, para kepala desa menyadari adanya kebutuhan yang besar dari masyarakat akan pupuk, peralatan pertanian dan peralatan tenun, juga disadari bahwa belum ada pom bensin di kecamatan Nita.*
 - ii. *Bentuk kerja sama dan pengelolaan, dalam hal ini BUMDes Bersama Kecamatan Nita merupakan bentuk aliansi 12 Desa yang ada di kecamatan Nita yang bersepakat untuk membentuk BUMDES Bersama dengan menyetor dana bersama. Pengelolaan BUMDES di serahkan kepada karyawan profesional yang fokus untuk mengurus BUMDES Bangkit Mandiri. Pengurus BUMDes Bangkit Mandiri terdiri dari 6 orang pengurus dan 12 orang BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) yang menjadi perwakilan*

dari masing-masing 12 Desa sehingga transparansi dan keadilan dalam pengelolaan BUMDES ini dapat terjaga.

- iii. Monitoring dan evaluasi serta pembagian hasil kerja sama*, seharusnya sudah diatur dalam anggaran dasar kerja sama. Sebagai contoh, BUMDes Bangkit Mandiri menetapkan untuk setiap 3 bulan sekali dan pertemuan akhir tahun melakukan pertemuan Forum kepala desa, dimana dalam pertemuan tersebut keberadaan BUMDES bersama juga di bahas rencana, progress dan tantangannya.
- d. Aspek penting dari pembelajaran tentang proses kerja sama yang dilakukan di desa;
- i. Kepemimpinan*, dari catatan pengalaman yang kami dapatkan dari penelitian di berbagai desa yang inovatif, faktor kepemimpinan merupakan aspek penting dalam *menerobos dan mengawal pembaharuan di desa*. Sebagai contoh, Kepala Desa Boru Kedang berhasil melakukan negosiasi dan memperoleh kepercayaan dari perusahaan Pupuk Kaltim untuk menjadi distributor pupuk di kecamatan Wulanggitang, kerja sama dengan IPB dalam pengelolaan pupuk organik, kerja sama dengan KSU Jantan, LSM Ayu Tani dsb.
 - ii. Kesepakatan kerja sama*, perlu diatur dengan jelas agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Bahkan sanksi dan bentuk penyelesaian konflik sebaiknya disepakati di awal sehingga respek dan komitmen dari masing-masing pihak dapat terjaga.
 - iii. Komunikasi dan Edukasi Publik*, upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di desa perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar upaya tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan bahkan masyarakat dapat dilibatkan dalam kerja sama tersebut. Sebagai contoh, Kepala Desa Boru Kedang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk hasil produksi desanya dan berbangga untuk produk hasil desanya. Sebaliknya, karena komunikasi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan percepatan pembangunan melalui BUMDes Bersama Pemecah Kemiri Kecamatan Wulanggitang masih mengalami banyak kendala.

- iv. Pemantauan Pelaksanaan Kerja sama, harus ada tim khusus yang memantau dan tata cara koreksi, dan perbaikan dalam kerja sama yang dilakukan.
- e. Apapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Desa, baik itu BUMDes maupun koperasi atau bentuk-bentuk pelebagaan ekonomi lainnya yang ada di desa, ada 2 pilar kegiatan yang harus dijaga keseimbangannya yaitu: sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersil, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden RI (2016) , BUMdes harus dapat:
 - i. Meningkatkan Perekonomian Desa
 - ii. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
 - iii. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - iv. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada akhirnya akan dapat dilihat adanya keunikan pengembangan ekonomi desa yang tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip ekonomi yang mendatangkan keuntungan semata, namun pengembangan ekonomi yang tetap mempunyai dimensi sosial dan berbasis pada potensi serta kearifan lokal yang melibatkan dan menyejahterakan warga desa secara berkelanjutan.

This Page is Intentionally Left Blank

CATATAN AKHIR

Pembangunan desa di Indonesia pada hakekatnya harus disadari sebagai wujud pembangunan desa seutuhnya yang berarti suatu pembangunan yang mencakup seluruh dimensi, baik dimensi pembangunan manusia maupun dimensi pembangunan non manusia. Buku penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya lebih merupakan wujud komitmen berbagai pihak yang peduli dengan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan di desa. Kegiatan ini juga merupakan penegasan akan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pihak pemerintah bersama Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia yang merupakan NGO dari Jerman, serta Universitas Katolik Parahyangan sebagai masyarakat akademik yang secara bersama-sama menggali esensi-esensi praktek baik (*good practices*) yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa. Hal ini dapat menumbuhkan optimisme bagi berbagai kalangan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan desa. Dari riset yang dilakukan di lima desa yaitu Desa Pariangan – Sumatera Barat, Desa Tembi – Daerah Istimewa Jogjakarta, Desa Pujon Kidul – Jawa Timur, Desa Tajun – Bali, dan Desa Boru Kedang – Nusa Tenggara Timur dapat diformulasikan beberapa catatan yaitu:

- a) Pembangunan ekonomi desa paling tidak dapat ditelaah dari suatu model atau sistem yang bersifat dinamis. Dalam hal ini pembangunan desa ditempatkan dalam suatu format sistem yang mengasumsikan

adanya keterkaitan dan ketergantungan dinamis antara berbagai komponen yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan desa. Pembangunan desa untuk mewujudkan desa unggul dan berkelanjutan melalui berbagai inovasi akan sangat tergantung dari berbagai sumber yang dimiliki oleh desa (input internal) maupun dari pihak di luar desa (input eksternal). Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ide kreatif dan inovatif dari pihak desa baik dari kepala desa, maupun warga desa menjadi suatu hal yang sangat essential sebagai langkah awal dari pembangunan untuk kemajuan desa. Oleh karena itu kecerdasan kepala desa / tokoh desa bersama warga desa sangat dibutuhkan dalam membidik dan menetapkan potensi yang bisa diunggulkan dan diandalkan untuk menopang kehidupan, kemajuan dan keberlanjutan desa.

- b) Ide untuk mengunggulkan potensi alam yang ada di 5 desa lokasi penelitian menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan self-assessment. Bahwa mereka mampu untuk mengembangkan misalnya potensi alam yang dimiliki yang dapat berimplikasi pada peningkatan aspek kehidupan ekonomi desa. Sebagaimana contoh dalam mengunggulkan potensi alam untuk wisata di Desa Paringan, Desa Tembi, Desa Pujon Kidul ataupun juga Desa Boru Kedang yang mengandalkan potensi alam sumber air minum. Demikian juga Desa Tajun yang mengandalkan potensi hasil perkebunan cengkeh. Potensi di semua desa tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya untuk menopang kekuatan ekonomi desa setelah potensi-potensi yang dimiliki tersebut masuk dalam ranah proses pengelolaan. Pada tahap inilah mobilisasi seluruh kemampuan yang dimiliki oleh desa dilakukan untuk mendorong proses pembangunan ekonomi desa. Kemampuan untuk memobilisasi potensi internal mulai dari membangun komitmen aparat sampai dengan partisipasi warga desa. Demikian juga dengan kemampuannya untuk membuka jejaring (networking) baik dengan pihak pemerintah daerah setempat maupun pihak non pemerintah, baik dari kalangan pengusaha maupun perguruan tinggi.
- c) Kekayaan akan potensi tentu saja tidak langsung menjamin kemajuan ekonomi masyarakat desa yang bersangkutan. Dari kasus di lapangan menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki kemudian dikelola sesuai dengan memanfaatkan kekuatan lokal desa yang dalam hal ini adalah

warga desa yang didukung oleh kelembagaan atau komunitas desa setempat. Hal ini juga menegaskan bahwa dukungan kelembagaan harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan langkah yang dalam hal ini adalah usaha ekonomi yang dilakukan di desa. Untuk mendukung langkah ini pihak pemerintah juga sudah memberikan fasilitasi kelembagaan yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa - BUMDes. Lembaga ini pada hakekatnya tidak hanya diarahkan untuk kegiatan ekonomi bisnis desa saja, melainkan diharapkan dapat juga dijadikan wadah masyarakat desa dalam merespon dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa, sehingga pilihan atas solusi dapat sesuai kondisi dan kebutuhan desa setempat. Namun demikian, desa setempat dalam praktiknya juga dapat menggunakan kelembagaan setempat yang sudah didirikan dan beroperasi sebelumnya, misalnya seperti koperasi desa atau bahkan komunitas tertentu yang menekuni bidang tertentu, misalnya komunitas yang mengembangkan desa wisata.

- d) Dari penelitian tentang ekonomi lokal desa ini perlu mendapat catatan bahwa jejaring dengan pihak eksternal desa menjadi isu yang sangat esensial. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan melengkapi kekurangan sumber internal seperti kemampuan sumber daya manusia maupun hal lain yang terkait, misalnya dengan membuka jaringan pemasaran produk-produk desa. Dengan jejaring yang dibangun tersebut bahkan bisa memberikan keuntungan dalam menjalankan usaha ekonomi yang dilakukan di desa. Jejaring bisnis yang dimiliki pada kenyataannya dapat memberikan informasi harga komoditas yang sesuai dengan harga komoditas yang saat itu berlaku. Dengan demikian para petani tidak dimainkan dan dirugikan oleh para tengkulak. Demikian juga jejaring yang dimiliki juga dapat memberikan keuntungan bagi desa, khususnya warga desa dalam meningkatkan kualitas produk-produk dari desa. Dalam hal ini masyarakat desa terus berusaha untuk meningkatkan daya saingnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar desa. Jejaring yang dimiliki jelas semakin meningkatkan kekuatan dan daya tawar (*bargaining position*), serta dapat menjamin peningkatan dan keberlanjutan usaha yang dimiliki oleh desa.
- e) Belajar dari pengalaman di 5 (lima) desa tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya desa mempunyai kemampuan untuk berkreasi dan

berinovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan kesempatan dan kemandirian bagi desa, yang dalam hal ini aparat desa, tokoh desa, serta warga desa untuk menentukan arah perkembangan desa sebagaimana karakter dan potensi yang dimilikinya. Kecenderungan untuk terjadinya penyeragaman dalam berbagai hal, khususnya dalam mengembangkan ekonomi desa sudah seharusnya dihindari. Desa lebih membutuhkan mentoring sehingga tetap dapat menjaga fleksibilitas desa untuk berkembang melalui inovasi sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dapat diunggulkan dan dapat mensejahterakan masyarakat desa secara berkelanjutan.

REFERENSI

Khan, Rifaqat & Kazmi (2002), *Harnessing and Guiding Social Capital for Rural Development*, Palgrave Macmillan.

The Springfield Centre. (2009). *A Synthesis of the Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach*. Funded by DFID and SDC.

Woolcock, M., 1998, "Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework" *Theory and Society*, Vol. 27, No. 2

Buku Nagari Pariangan, dikutip dari file pemerintah daerah Nagari Pariangan

Zamris, Amri, Fuazan. (2004). *Budaya Alam Minangkabau*, Jakarta: Bumi Aksara

Antara Sumbar (24 April 2018), Ini dia 13 motif batik khas Nagari Pariangan yang telah memiliki HKI. Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/224718/ini-dia-13-motif-batik-khas-nagari-pariangan-yang-telah-memiliki-hki> pada tanggal 10 November 2018

Antara Sumbar. (22 Desember 2017), Pariangan Simpan Banyak Naskah Kuno. Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/217695/pariangan-simpan-banyak-naskah-kuno> pada tanggal 10 November 2018.

Harian Haluan (29 September 2016), Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Nagari Tuo Meningkat. Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/60340/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-nagari-tuo-meningkat> pada tanggal 10 November 2018

Kaba 12. (18 April 2018), Ada Motif Batik Kuno di Nagari Pariangan Tanah Datar. Diakses dari <https://kaba12.co.id/2018/04/18/ada-motif-batik-kuno-di-nagari-pariangan-tanah-datar> pada tanggal 9 November 2018

Badescu, Gabriel. and Uslaner, Eric M. (Ed.). 2003. *Social Capital and The Transition to Democracy*. Routledge. London

Liang, Tan Wee (Ed.). 2006. *Social Capital In Asia: An Exploratory Study*. The Asian Productivity Organization. Tokyo

Lin, Nan. 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press. New York

Putra, C-H. 'Sejarah Desa Wisata Tembi' dalam [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/cosmashanda/54f6d08da3331183558b491e/sejarah-desa-wisata-tembi), diakses dari <https://www.kompasiana.com/cosmashanda/54f6d08da3331183558b491e/sejarah-desa-wisata-tembi> (19.11.2018)

Sato, Yoshimichi. 2013. *Social Capital*. Sociopedia.isa. DOI: 10.1177/205684601374

Birkinshaw, J., Bouquet, C., & J.L. Barsoux. (2011). The 5 Myths of Innovation. MIT Sloan Manage Rev 52 Vol 2.

Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Somerville, I. (2002). *Leading for Innovation*. San Fransisco: Jossey-Bass.

Hughes, A., Moore, K., & Kataria, N. (2011). *Innovation in Public Sector Organisations: A Pilot Survey for Measuring Innovation Across the Public Sector*. London: Nesta

Salge, T. O., & Vera, A. (2012). *Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating Role of Customer and Learning Orientation*. Public Administration Review.

Penulisan laporan untuk Desa Boru Kedang merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boru Kedang dan aparat BUMDes Boru Kedang, Pengurus KSU Jantan, Pimpinan LSM AyuTani dan Ketua BUMDes Bersama Kecamatan Wullang Gitang.

Penulisan laporan untuk BUMDes Bersama Bangkit Mandiri merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nita yang juga merupakan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Nita, Ketua dan staf BUMDes Bersama Bangkit Mandiri.

Ayu Tani (2017). Ayu Tani dan Usaha Memberdayakan Petani Wulan Gitang Melalui KSU Jantan. Diakses dari <http://ayutani.blogspot.com/2017/> pada tanggal 26 desember 2018

Presiden RI (2016). Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes. Diakses dari <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html> pada tanggal 25 Desember 2018.

Vox NTT (2017). Belajar dari Desa Boru Kedang Flotim. Diakses dari <http://VoxNtt.com/2017> pada tanggal 26 Desember 2018